

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN
LESTARI (KRPL) DALAM RANGKA MENDUKUNG
KETAHANAN PANGAN**

(Studi Implementatif Pada KRPL Di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan
Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

APRILIA DWI MARIYATI

NIM. 105030101111081



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2014**

MOTTO

**“Sesungguhnya Shalatku, Ibadahku, Hidupku
dan Matiku hanyalah untuk Allah SWT”**

(Q.S: Al-an'am:162)

**“Setiap Orang Punya Waktu Yang Sama, Jika
Orang Lain Bisa Maka Kita Juga Pasti Bisa”.**

**“Jangan Anggap Remeh Hal Yang Kecil,
Karena Tanpa Hal Kecil Tidak Akan Jadi Hal
Yang Besar”**



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : "Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan" (Studi
Implementatif Pada KRPL di Desa Puhjark Kecamatan
Plemahan Kabupaten Kediri)

Disusun Oleh : Aprilia Dwi Mariyati

NIM : 105030101111081

Fakultas : Ilmu Administrasi

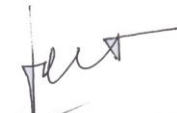
Jurusan : Administrasi Publik

Malang, 15 Juli 2014

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota


Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS
NIP. 19540306 197903 1 005


Dr. Hermawan, S. IP., M.Si
NIP. 19720405 200312 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 15 Juli 2014

Mahasiswa



Nama: Aprilia Dwi Mariyati
NIM. 105030101111081

TANDA PENGESAHAN

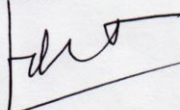
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Agustus 2014
Jam : 11.00
Skripsi atas nama : Aprilia Dwi Mariyati
Judul : "Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari
(KRPL) Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan"
(Studi Implementatif Pada KRPL di Desa Puhjark
Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)

Dan dinyatakan LULUS

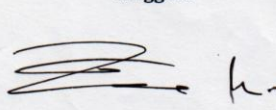
MAJELIS PENGUJI

Ketua



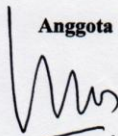
Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS
NIP. 19540306 197903 1 005

Anggota



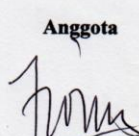
Dr. Hermawan, S. IP., M. Si
NIP. 19720405 200312 1 001

Anggota



Dr. Irwan Noor, MA
NIP. 19611024 198601 1 002

Anggota



Wima Yudo Prasetyo, S.Sos., M.AP
NIP. 19790523 200604 1 002

Saya Mempersembahkan Karya ini untuk:

Bapak & Ibu tersayang,

Kakak tersayang,

Dan Kawan-kawan saya semuanya

Semoga Karya ini bermanfaat dalam mendukung
berkembangnya pengetahuan selanjutnya.

RINGKASAN

Aprilia Dwi Mariyati, 2014, **Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan** (Studi Implementatif pada KRPL di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri), Komisi Pembimbing, Ketua: Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS., Anggota: Dr. Hermawan, S. IP., M. Si.

Latar belakang penelitian ini dilakukan karena adanya ironi bahwa Indonesia sebagai negara agraris yang seharusnya menyediakan pangan untuk penduduknya namun masih saja melakukan impor bahan pangan. Padahal pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap warga dalam suatu negara. Oleh karena itu perlu alternatif untuk mendukung ketahanan pangan. salah satunya dengan mengimplementasikan program KRPL. Namun dalam implementasinya rentan terhadap keberlanjutannya. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui peran dan sinergitas *stakeholders* dalam mendukung keberlanjutan implementasi program KRPL di Desa Puhjarak, dan juga ingin mengetahui faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat keberlanjutan implementasinya, serta ingin mengetahui manfaat adanya implementasi program KRPL dalam mendukung ketahanan pangan di desa tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis Bogdan dan Taylor yang terdiri dari tahap pralapangan, dilapangan, dan pasca lapangan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran dan sinergitas *stakeholders* dalam keberlanjutan implementasi program KRPL di Desa Puhjarak masih belum optimal. Faktor yang mendukung dalam keberlanjutan implementasi program antara lain tanah yang subur, potensi pekarangan yang masih cukup luas, sarana dan prasarana yang mendukung, kelembagaan yang tersedia serta KRPL merupakan program pemerintah. Sedangkan faktor yang menghambat antara lain karena adanya permasalahan teknis yang belum terselesaikan dan berkurangnya motivasi pelaku RPL. Dari implementasi program KRPL tersebut bermanfaat dalam mendukung ketahanan pangan yang ada di desa tersebut minimal ditingkat rumah tangga.

Saran yang dapat disampaikan peneliti yaitu perlu melakukan pemilihan jenis tanaman yang tidak perlu pemeliharaan intensif. Untuk meningkatkan motivasi pelaku RPL perlu diadakan perlombaan KRPL. Diperlukan juga pemahaman tugas dan fungsi masing-masing *stakeholders*. Memberikan pemahaman mengenai pentingnya RPL bagi pelaku RPL. Perlu pendampingan secara intensif serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi agar implementasinya dapat berlanjut dan pada akhirnya dapat mendukung ketahanan pangan secara optimal di desa tersebut.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Ketahanan Pangan.

Summary

Aprilia Dwi Mariyati, 2014, **Implementation Program of Sustainable Reserve Food Garden (SRFG) to Support Food Security** (Implementation study of SRFG in Puhjarak Village Plemahan Subdistric Kediri Regency), Supervisor: Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS., Co-Supervisor: Dr. Hermawan, S. IP., M. Si.

Basic of this research because of the irony that Indonesia as an agricultural country that is supposed to provide food to its citizen, but still imports of food products. Although food is a basic need that must be met every citizen in the country. Therefore, necessary alternative support food security. one of them in implementing SRFG programs. However, in setting vulnerable implement sustainability. So, researchers wanted to know the role and synergy of stakeholders in the implementation of sustainable SRFG programs in the town Puhjarak, and also want to know the factors that can support or hinder the implementation of sustainability and want to know the benefits from implementation of SRFG programs to support food security in the village.

The research method used is a descriptive study with a qualitative approach. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Data analysis is used Bogdan and Taylor analysis comprising the steps before-field, in field and post-field.

The results of the study indicate that the role and synergy of stakeholders in the implementation of sustainable SRFG programs in the town Puhjarak not yet optimal. Factors that support the implementation of sustainable programs, such as arable land, the potential is still very extensive grounds, facilities and infrastructure support, institutional SRFG is available, as well as government programs. Although the factors that inhibit the uncertainty, parasites and chicken, stakeholders are not yet optimal synergy and reduced motivation of actors recognition. The implementation of the program SRFG useful to support food security in the household at the small village.

Suggestion from reseachers, in order to choice of plants that do not require intensive care need to tell. To increase the motivation of the subjects of SRF must take SRFG race. Also necessary to understand the roles and functions of each stakeholders. An understanding of the importance of SRF for the SRF's subject. Need intensive care as well as monitoring and evaluation on a regular basis to finally solve the problems thus continue to implement and able to support an optimal food safety in the community.

Key: Implementation of policy, Sustainable Reserve Food Garden (SRFG), Food security

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas limpahan rahmat serta karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan (Studi Implementatif pada Program KRPL di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan)”

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa keterlibatan dari berbagai pihak yang berkenan membantu memberikan pemikiran baik berupa kritik maupun saran. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M. Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Adminitrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Prof. Dr. Soesilo Zauhar, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan yang berarti untuk penulis.

5. Bapak Dr. Hermawan, S. IP., M. Si selaku dosen Pembimbing 2 yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh dosen fakultas ilmu administrasi, khususnya dosen jurusan ilmu administrasi publik yang selama ini telah memberikan bimbingan serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama dalam proses perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
7. Bapak, Ibu serta kakakku tersayang yang senantiasa menyayangi, memberikan doa serta dukungannya baik materil maupun moril selama ini sehingga penulis selalu bersemangat mengerjakan skripsi ini.
8. Para Narasumber yang telah banyak memberikan informasi, data, masukan maupun petunjuk dalam penyusunan skripsi ini yaitu:
 - a) Bapak Kepala BKP3 serta bapak Junadi dari BKP3 Kab. Kediri dan seluruh jajaran pejabat di BKP3 kab. Kediri.
 - b) Bapak Wanoto, SE serta bapak Ir. Karno serta seluruh PPL BPP Plemahan.
 - c) Bapak Sugiyo Selaku Kepala Desa Puhjarak beserta jajarannya.
 - d) Ibu Sumirah Selaku Ketua PKK.
 - e) Bapak Sayuti Selaku Tim Teknis KRPL Desa Puhajarak.
 - f) Serta Beberapa narasumber lain yang juga sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman saya yang telah banyak membantu serta memberikan motivasi kepada penulis selama ini.

10. Keluarga besar RSC yang banyak memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang penulisan.

11. Serta semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa serta dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 15 Juli 2014

Penulis

Aprilia Dwi Mariyati

GLOSARIUM

No	Istilah	Keterangan
1.	Rumah Pangan Lestari (RPL)	Rumah yang memanfaatkan pekarangan secara intensif melalui pengelolaan sumberdaya alam lokal secara bijaksana, yang menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya.
2.	Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Himpunan dari Rumah Pangan Lestari (RPL) yaitu rumah tangga dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan, serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3.	Pekarangan	Lahan yang ada di sekitar rumah dengan batas pemilikan yang jelas (lahan boleh berpagar dan boleh tidak berpagar) serta menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman dan tempat memelihara berbagai jenis ternak dan ikan.
4.	Diversifikasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan lokal dengan prinsip gizi seimbang
5.	Kebun Bibit Desa (KBD)	Unit produksi benih dan bibit untuk memenuhi kebutuhan pekarangan, satu RPL maupun kawasan.
6.	Pola Pangan Harapan (PPH)	Susunan ragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan).
7.	Pangan	Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8.	Ketahanan pangan	Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari

		tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
9.	Kemandirian pangan	Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan keraifan lokal secara bermartabat.
10.	Kedaulatan pangan	Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
11.	Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)	Aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak yang apabila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
GLOSARIUM	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Publik	18
1. Pengertian Kebijakan Publik	18
2. Jenis-jenis Kebijakan Publik	22
B. Implementasi Kebijakan	23
1. Model Implementasi Kebijakan	25
2. Aktor Implementasi Kebijakan	32
3. Kebijakan Ketahanan Pangan	33
4. Isu-isu Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan	35
5. Ketahanan Pangan	37
C. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	44
1. Dasar Hukum KRPL	44
2. Pengertian Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	46
3. Tujuan KRPL	47
4. Penerapan KRPL	48
5. Prinsip KRPL	49
D. Pengelolaan Sumber Daya Lokal	49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	52
B. Fokus Penelitian	53
C. Lokasi dan Situs Penelitian	55
D. Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Instrumen Penelitian	61
G. Analisis Data	63

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Wilayah Kabupaten Kediri	69
a. Kondisi Geografis dan Demografi Kabupaten Kediri	69
b. Visi dan Misi Kabupaten Kediri	73
2. Profil Badan ketahanan Pangan dan pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Kediri	74
a. Visi dan Misi BKP3 Kab. Kediri	74
b. Tugas Pokok dan Fungsi BKP3 Kab. Kediri	77
3. Profil Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Plemahan	98
a. Kelembagaan BPP Plemahan	98
b. Kegiatan BPP Kecamatan Plemahan	99
4. Profil Desa Puhjarak	103
a. Pemerintahan desa Puhjarak	103

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Peran dan Sinergitas <i>stakeholders</i> dalam Mendukung Keberlanjutan Implementasi Program KRPL di Desa Puhjarak	105
a. Implementasi Program KRPL di Desa Puhjarak	105
b. Peran dan sinergitas <i>stakeholders</i> dalam Keberlanjutan Implementasi Program KRPL di Desa Puhjarak	120
2. Faktor Pendukung dan penghambat dalam keberlanjutan Program KRPL di Desa Puhjarak	130
a. Faktor Pendukung	130
1) Tanah yang subur	130
2) Potensi Pekarangan yang masih cukup luas	130
3) Sarana dan prasarana	131
4) Kelembagaan	131
5) Program pemerintah	132
b. Faktor penghambat	132
1) Permasalahan teknis yang belum terselesaikan	132
2) Motivasi pelaku RPL menurun	134
3. Manfaat Implementasi program KRPL dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat Desa Puhjarak	137
a. Organisasional	137
b. Sosial	138
c. Ekonomi	140

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Peran dan Sinergitas <i>stakeholders</i> dalam Mendukung Keberlanjutan Implementasi Program KRPL di Desa Puhjarak	144
a. Implementasi Program KRPL di Desa Puhjarak	144
b. Peran dan sinergitas <i>stakeholders</i> dalam Keberlanjutan Implementasi Program KRPL di Desa Puhjarak	147
2. Faktor Pendukung dan penghambat dalam keberlanjutan Program KRPL di Desa Puhjarak	153
a. Faktor Pendukung	153
1) Tanah yang subur	153
2) Potensi Pekarangan yang masih cukup luas	154
3) Sarana dan prasarana	154
4) Kelembagaan	155
5) Program KRPL merupakan program pemerintah	156
b. Faktor penghambat	157
1) Permasalahan teknis yang belum terselesaikan	157
2) Motivasi pelaku RPL menurun	158
3. Manfaat Implementasi program KRPL dalam mendukung Ketahanan pangan masyarakat Desa Puhjarak	162
a. Organisasional	162
b. Sosial	163
c. Ekonomi	164

BAB V PENUTUP

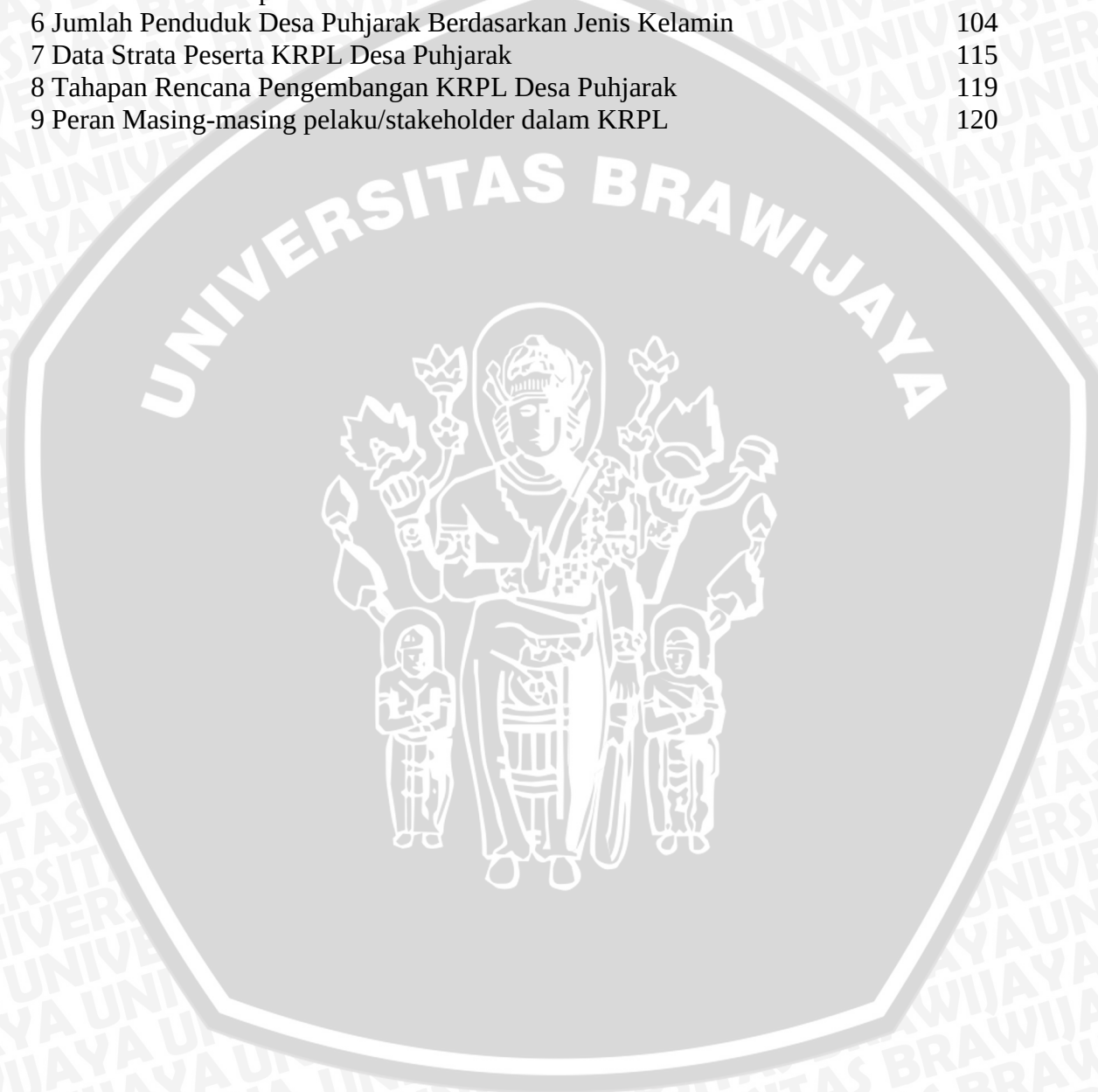
A. Kesimpulan	167
B. Saran	169

DAFTAR PUSTAKA	171
----------------------	-----

LAMPIRAN	174
----------------	-----

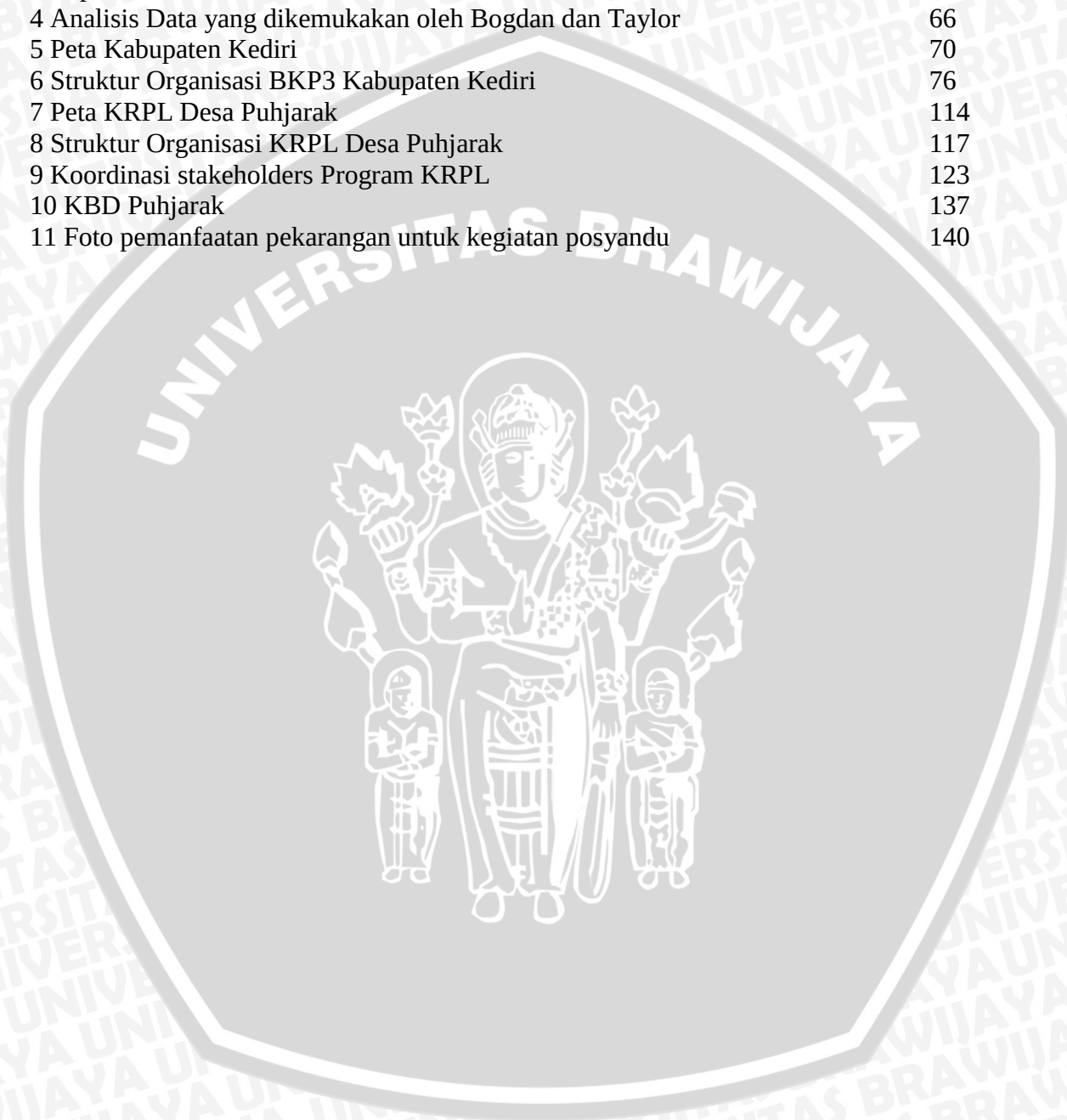
DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal.
1	Perkembangan Jumlah Penduduk dari tahun 1971-2010	2
2	Wilayah Administratif Kabupaten Kediri	71
3	Perangkat Kelembagaan BPP Kecamatan Plemahan	99
4	Jumlah Kelompok Tani di Kecamatan Plemahan	99
5	Pembinaan Kelompok Tani di Kecamatan Plemahan	99
6	Jumlah Penduduk Desa Puhjarak Berdasarkan Jenis Kelamin	104
7	Data Strata Peserta KRPL Desa Puhjarak	115
8	Tahapan Rencana Pengembangan KRPL Desa Puhjarak	119
9	Peran Masing-masing pelaku/stakeholder dalam KRPL	120



DAFTAR GAMBAR/ BAGAN

No	Judul	Hal.
1	Implementasi Model Meter dan Horn	26
2	Implementasi Model Grindle	28
3	Implementasi Model Sebatier dan Mazmanian	30
4	Analisis Data yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor	66
5	Peta Kabupaten Kediri	70
6	Struktur Organisasi BKP3 Kabupaten Kediri	76
7	Peta KRPL Desa Puhjarak	114
8	Struktur Organisasi KRPL Desa Puhjarak	117
9	Koordinasi stakeholders Program KRPL	123
10	KBD Puhjarak	137
11	Foto pemanfaatan pekarangan untuk kegiatan posyandu	140



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hal.
1	Dokumentasi Kegiatan KRPL di Desa Puhjark	174
2	Interview Guides Penelitian	175
3	Surat Rekomendasi BAKESBANGPOLLINMAS	181
4	Curriculum Vitae	182



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sejarah Indonesia menunjukkan bahwa sektor pertanian (melalui beras) telah mampu membawa Indonesia sebagai negara agraris terdepan, khususnya di kawasan Asia. Sebagai negara agraris dengan kondisi alam yang subur seharusnya Indonesia mampu mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri sendiri bahkan bisa sampai melakukan ekspor. Ironisnya, sebagai negara yang terkenal dengan potensi pertaniannya, Indonesia tetap melakukan impor hasil pertanian pokok seperti beras, kedelai, gula, jagung dan kebutuhan pokok lainnya yang seharusnya bisa diproduksi sendiri semaksimal mungkin. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Wahyuni (2013: 1), “Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya mempunyai pencaharian sebagai petani. Ironisnya, negeri ini kini harus mengimpor sejumlah komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya”.

Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Ruslan (2011: 1) selama semester I 2011 (Januari-Juni), Indonesia telah mengimpor bahan pangan. Nilai bahan pangan, baik mentah maupun olahan 5,36 miliar dollar AS atau sekitar 45 triliun rupiah dengan volume impor mencapai 11,33 juta ton. BPS mencatat, Indonesia mengimpor sedikitnya 28 komoditi pangan diantaranya beras, jagung, kedelai, gandum, terigu, daging sapi, dan bahkan singkong juga

diimpor serta komoditi pangan lainnya. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa Indonesia belum bisa mencukupi ketahanan pangan dalam negeri.

Banyak ilmuwan memperkirakan bahwa jumlah penduduk yang akan mengalami kerawanan pangan akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan jumlah penduduk yang belum diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta terus berkurangnya sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan akan memperparah ancaman kekurangan pangan. Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar yakni kurang lebih sebesar 237 juta jiwa pada tahun 2010 (Seperti yang terlihat pada Tabel 1 mengenai perkembangan jumlah penduduk) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ketahanan pangan Indonesia rawan. “Teori Thomas Robert Malthus menilai penduduk senantiasa bertambah sedangkan pertumbuhan produksi pangan tidak terus bertambah maka perlu ada pengendalian atau pembatasan jumlah penduduk pada satu wilayah” (Malau, 2013: 1). Berdasarkan teori Malthus, dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung. Jumlah penduduk yang semakin lama berkembang pesat namun tidak sebanding dengan ketersediaan pangan yang ada sehingga hal ini bisa menyebabkan krisis pangan.

Tabel 1 Perkembangan Jumlah Penduduk dari Tahun 1971- 2010

Tahun	Jumlah Penduduk
1971	119.208.229
1980	147.490.298
1990	179.378.946
1995	194.754.808
2000	206.264.595
2010	237.641.326

Sumber: BPS, 2010 (Diolah Penulis)

Laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat namun tidak diimbangi dengan luas lahan pertanian yang ada. Luas lahan pertanian justru semakin berkurang dan hal tersebut juga akan mengganggu ketahanan pangan di Indonesia. Seperti yang diungkapkan pula oleh Pitakasari (2012: 1) bahwa jumlah lahan pertanian di Indonesia menuju kondisi kritis. Luas lahan pertanian di Indonesia sekitar 13 juta hektare. Lahan yang kecil tersebut masih harus menghadapi alih fungsi lahan yang terus terjadi. Bukan perluasan, tapi yang terjadi justru penurunan. Lahan pertanian yang terkonveksi di Pulau Jawa, mencapai 50 ribu hektare per tahun.

Fenomena konversi lahan pertanian di pulau jawa yang semakin mengkhawatirkan juga mengganggu ketahanan pangan. Berdasarkan hasil sensus lahan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan), “lahan sawah pada 2010 susut menjadi 3,5 juta hektare (ha) dari 4,1 juta ha di 2007. Dalam rentang waktu tiga tahun, konversi lahan mencapai 600 ribu ha” (Musta'idah, 2011: 1). Akibat laju konversi lahan pertanian produktif yang cepat maka kemandirian pangan khususnya beras, kedelai, dan jagung juga ikut terancam.

Sebagai kebutuhan yang mendasar bagi manusia, dalam bukunya Suryana (2003: 237) menjelaskan pangan yang cukup dan bergizi merupakan komponen utama dalam pembangunan manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Memperoleh pangan yang cukup, aman, dan bergizi merupakan hak asasi setiap orang untuk bebas dari kelaparan. Serta, ketahanan pangan merupakan pilar bagi ketahanan nasional, karena tanpa pangan yang cukup,

tidak ada satu bangsa pun dapat melaksanakan pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya hingga keamanan Negara dengan baik. Anderson, Molly D., & Anne C. Bellows, (2012: 179) berpendapat pula bahwa “*The right to adequate food and nutrition is a normative condition (everyone should have adequate food and nutrition) upheld by more than 60 years of an evolving international juridical framework*” (Hak atas pangan dan gizi yang cukup merupakan kondisi normatif (setiap orang harus memiliki cukup makanan dan nutrisi) yang diamati oleh lebih dari 60 tahun dari sebuah kerangka hukum internasional berkembang).

Ketahanan pangan dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2012, diartikan sebagai:

Kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Sedangkan pangan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, dimaknai sebagai:

Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Berdasarkan definisi tersebut, terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga merupakan tujuan sekaligus sebagai sasaran dari ketahanan pangan di Indonesia. Oleh karenanya pemantapan ketahanan pangan dapat dilakukan melalui pemantapan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga (Saliem, 2011:

1). De Haen & Thompson (2003) yang dikutip Shetty & Prakash (2006: 9) juga berpendapat mengenai makna dari ketahanan pangan bahwa *“Food security exists when all individuals at all times have the physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life”* (Ketahanan pangan terjadi ketika semua orang setiap saat memiliki akses fisik, sosial dan ekonomi untuk cukup, aman dan bergizi makanan yang mereka butuhkan makanan dan pilihan makanan untuk hidup aktif dan sehat).

Penyelenggaraan urusan pangan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 pengganti Undang-undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996, yang dibangun berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Dalam undang-undang pangan ini yang menjadi poin penting adalah pada pemenuhan pangan ditingkat perorangan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermanfaat (Kementrian Pertanian, 2013: 1). Hanjra, & M. Ejaz Qureshi (2010: 365) juga menyatakan pendapatnya mengenai kebijakan pangan bahwa *“Food policy should serve humanity by advancing the humane goals of eradicating extreme poverty and hunger”* (Kebijakan Pangan harus berperikemanusiaan dengan memajukan tujuan manusiawi melalui pemberantasan kemiskinan yang ekstrim dan kelaparan).

Timbulnya kebijakan pangan sebagai suatu cara mengatasi permasalahan mengenai pangan serta cara pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Amara Raksataya yang dikutip Islamy (2009:

17) bahwa kebijakan adalah “suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah mengenai ketahanan pangan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 adalah sebagai suatu cara dan strategi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Dalam Undang-undang tersebut pasal 11 menyebutkan salah satu upaya atau strategi pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan adalah dengan penganeekaragaman/diversifikasi pangan.

Tahapan setelah penetapan kebijakan adalah implementasi dari kebijakan yang telah dibuat. Implementasi perlu dilakukan agar kebijakan yang telah dibuat tepat kearah tertentu yang dikehendaki. Santosa (2009: 43), juga berpendapat bahwa “implementasi kebijakan merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam suatu kebijakan”.

Salah satu implementasi dari kebijakan ketahanan pangan diwujudkan melalui diversifikasi/penganeekaragaman pangan. Penganeekaragaman pangan yaitu proses pengembangan produk pangan yang tidak tergantung kepada satu jenis bahan saja, tetapi memanfaatkan macam-macam bahan pangan. Kesadaran tentang pentingnya upaya penganeekaragaman pangan telah lama dilaksanakan di Indonesia. BKP (2010) yang dikutip oleh Saliem (2011: 1) menyebutkan kebijakan penganeekaragaman pangan diawali dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1974 tentang Upaya Perbaikan Menu Makanan Rakyat (UPMMR), dengan menggalakkan produksi Telo, Kacang dan Jagung yang dikenal dengan Tekad. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009

tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal yang dijadikan pedoman dalam melakukan kebijakan diversifikasi pangan.

Implementasi program dari kebijakan P2KP salah satunya diwujudkan melalui kegiatan pemberdayaan kelompok wanita melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan atau yang dikenal dengan Rumah Pangan Lestari (RPL). “RPL merupakan rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumberdaya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam” (Kementrian Pertanian, 2012: 1). Kumpulan dari RPL yang berkembang dalam skala luas, berbasis dusun, desa atau wilayah pada akhirnya akan membentuk sebuah kawasan rumah pangan lestari (KRPL). “KRPL merupakan kawasan pengembangan aneka komoditas tanaman, ternak (unggas), ikan secara terpadu dipekarangan, fasilitas umum milik desa dan kanan kiri jalan desa untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat desa dan sekaligus sebagai cadangan pangan hidup keluarga” (Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim, 2012: 1).

Program KRPL merupakan program pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan yang dirancang untuk ketahanan dan kemandirian pangan. Pengembangan KRPL diharapkan memenuhi kebutuhan pangan gizi dan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan secara lestari. Selain itu, dengan program ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga untuk kebutuhan belanja pangan.

“Kegiatan optimalisasi pekarangan atau KRPL ini sudah dilakukan sejak tahun 2010, yang diawali dengan pembinaan terhadap 2000 desa. Sampai tahun 2013, telah dilakukan pembinaan terhadap 11.000 desa pada 497 kabupaten/Kota di 33 provinsi” (Sekertaris Jendral Pertanian: 2013: 1). Pelaksanaan KRPL ini juga dilaksanakan di Jawa Timur atas permintaan Presiden Republik Indonesia maka pada tahun 2012 melalui Gubernur Jatim menginstruksikan *stakeholder* terkait untuk mengalokasikan program dan pembiayaan penumbuhan KRPL di tingkat Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur (BPTP Jatim, 2012: 2). Pelaksanaan KRPL di Jawa Timur juga didukung dengan kondisi yang ada di Jawa timur itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh BPTP Jatim (2012: 33) sebagai berikut:

Kondisi agroekologi di Jawa Timur yang sangat luas dan beragam merupakan potensi dalam penumbuhan semua kegiatan pertanian baik dalam skala luas maupun kecil. Berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ) diperkirakan pada tahun 2020 Propinsi Jawa Timur akan menjadi pusat agribisnis, karena mempunyai keunggulan di sektor pertanian. Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang mempunyai nilai $LQ > 1$ di bidang pertanian yaitu Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Blitar, Kediri, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, dan Kota Batu. Pembangunan pertanian tidak dapat terlaksana hanya oleh para petani sendiri, akan tetapi perlu campur tangan pembuat kebijakan.

Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan instruksi Gubernur Jatim tersebut. Kegiatan KRPL yang pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Kediri terletak di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan. Desa Puhjarak terletak dibagian barat Kabupaten Kediri. Pada Pertengahan tahun 2012, *stakeholder* terkait seperti BPTP Jawa timur bersama Dinas Pertanian Kediri, BKP3 Kediri, Badan Ketahanan Pangan Propinsi dan

Pemerintah Kabupaten Kediri, menjadikan wilayah tersebut sebagai *show window* dari pengembangan program KRPL untuk wilayah Kabupaten Kediri (BPTP Jatim, 2012: 16).

Latar belakang Desa Puhjarak dijadikan sebagai lokasi implementasi program KRPL antara lain karena potensi lahan di desa tersebut masih cukup luas. Selain itu, kegiatan pemberdayaan kesejahteraan dan keluarga (PKK) dan posyandu yang ada di Puhjarak termasuk aktif. Ditambah lagi, angka polipangan harapan (PPH) di Kabupaten Kediri yang mencakup Desa Puhjarak juga masih sebesar 60-70%. Hal ini dipertegas pula oleh Bapak Junadi dari BKP3 Kab. Kediri dalam kutipan wawancara berikut:

“Alasan program KRPL di Desa Puhjarak antara lain karena potensi pekarangan yang ada di Desa Puhjarak masih cukup luas. Bahkan luas pekarangannya hampir sama dengan luas lahan sawahnya. Kemudian ibu-ibu PKK-nya aktif, posyandunya aktif. Disamping itu, dilihat dari skor PPH yang ada di Kabupaten Kediri ini masih 60-70%. Padahal target 2015, diharapkan sampai 90%” (Wawancara dengan Bapak Junadi pada 12 November 2013 pukul 10.28 WIB).

Salah satu faktor penentu kesuksesan dan keberlanjutan implementasi program KRPL adalah pelaku KRPL yaitu ibu-ibu rumah tangga. Hal ini karena dalam mengusahakan tanaman skala kecil dan terbatas perlu ketelatenan yang tinggi dan mempunyai rasa suka untuk mengerjakannya. Pada tahap awal biasanya semangatnya tinggi, kemudian sejalan dengan waktu semakin hari semakin menurun semangatnya. Perlu kiat-kiat tertentu untuk mempertahankan motivasi yang tinggi, misalnya pendampingan secara berkala setelah berjalan (BPTP Jatim, 2012: 29).

Permasalahan implementasi KRPL saat ini adalah mengenai keberlanjutannya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh BPTP Jatim yang mengungkapkan bahwa dalam implementasi KRPL sangat rentan dengan permasalahan keberlanjutan apabila tidak didukung dan disiapkan secara seksama pada saat program tersebut diberhentikan sarana pelaksanaannya. Oleh karena itu pada tahap awal ini sesegera mungkin manfaatnya dirasakan oleh pelaku RPL. Nilai manfaat yang dirasakan diharapkan menjadi motivasi, maka dari itu pendampingan yang intensif oleh petugas yang kreatif dan inovatif menjadi kunci sukses keberlanjutan suatu program (BPTP Jatim, 2012: 32).

Pelaksanaan KRPL di Desa Puhjarak juga rentan terhadap keberlanjutan implementasinya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Junadi dari BKP3 Kabupaten Kediri:

“Keberlanjutan KRPL yang ada di Puhjarak belum maksimal, kemarin kesana banyak yang mati. Baru yang agak nampak budidaya lele. Untuk sayurnya mereka terbiasa menanam di sawah. Sehingga kalau budidaya di pekarangan, kadang-kadang alasannya dimakan ayam atau ternak yang lain. Lha, itu harus juga disampaikan kepada pendamping yang mendampingi di sana” (Wawancara dengan Bapak Junaedi di BKP3 Kab. Kediri Pada hari Selasa 12 November 2013 pukul 09.30).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik ingin mengetahui serta menganalisis implementasi program KRPL yang ada di Kabupaten Kediri agar program tersebut dapat mendukung ketahanan pangan yang ada di wilayah tersebut. Sehingga Judul yang diambil dalam penelitian ini adalah

“Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan (Studi Implementatif Pada KRPL di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran dan sinergitas *stakeholders* dalam mendukung keberlanjutan implementasi Program KRPL di Desa Puhjark Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam keberlanjutan implementasi program KRPL di Desa Puhjark?
3. Bagaimanakah manfaat implementasi program KRPL terhadap ketahanan pangan masyarakat di Desa Puhjark?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan serta menganalisis peran dan sinergitas *stakeholder* dalam mendukung keberlanjutan implementasi program KRPL di Desa Puhjark Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam keberlanjutan implementasi program KRPL di Desa Puhjark.
3. Untuk mendeskripsikan serta menganalisis manfaat implementasi program KRPL terhadap ketahanan pangan masyarakat di Desa Puhjark.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kemanfaatan baik secara teoritis maupun praktis terhadap kebijakan pemerintah melalui implementasi program KRPL. Kontribusi penelitian dalam penelitian ini antara lain:

1. Kontribusi Akademik

- a. Bagi mahasiswa, agar mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh masa kuliah, khususnya dalam bidang administrasi publik yang bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan analisis maupun interpretasi berbagai masalah yang dihadapi selama penelitian serta dalam penyusunan hasil penelitian.
- b. Bagi Universitas Brawijaya, khususnya Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam implementasi program KRPL.
- c. Sebagai bahan studi untuk melakukan penelitian selanjutnya serta sebagai sarana wacana program KRPL di Indonesia yang dilihat dari aspek kekurangan dan kelebihan, serta keberlanjutannya dalam memanfaatkan pekarangan yang ada dan dalam memenuhi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).
- d. Sebagai bahan diskusi bagi akademisi, praktisi maupun peminat administrasi publik khususnya mengenai bidang kajian implementasi kebijakan.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi Pemerintah serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam implementasi serta keberlanjutan program KRPL.
- b. Bagi *stakeholders* KRPL dan masyarakat, sebagai bahan masukan dalam melaksanakan program KRPL serta untuk bahan masukan dalam mengetahui potensi yang dimiliki juga dalam mengatasi kendala pelaksanaan KRPL. Hingga pada akhirnya, program-program dari pemerintah khususnya mengenai program KRPL ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini mengacu pada sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian yakni pentingnya implementasi program KRPL dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Alasan yang melatarbelakangi penelitian ini diantaranya karena Indonesia sebagai Negara agraris yang seharusnya bisa mencukupi kebutuhan pangan nasionalnya sendiri, namun pada kenyataannya masih saja sering melakukan impor bahan pangan. Apalagi ditambah pula jumlah penduduk serta tingkat

konversi lahan yang semakin tinggi dari tahun ke tahun sehingga memperburuk kondisi untuk berketahanan pangan secara nasional. Maka dari itu, perlu ada terobosan agar bisa berketahanan pangan. Salah satunya yaitu dengan implementasi program KRPL. Program KRPL dilakukan diseluruh kabupaten/kota di Indonesia. Salah satu kabupaten yang menerapkan adalah Kabupaten Kediri. Program KRPL yang pertama kali yang dilaksanakan di Kabupaten Kediri adalah di Desa Puhjark Kecamatan Plemahan. Alasan program KRPL di Desa Puhjark adalah karena melihat potensi pekarangan yang ada disana masih cukup luas, selain itu kegiatan ibu-ibu PKK serta posyandunya juga aktif. Keberadaan program KRPL tersebut diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan yang ada di desa tersebut. Dalam bab ini terdapat pula rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini guna membatasi penelitian, antara lain mengenai peran dan sinergitas *stakeholders* dalam mendukung keberlanjutan implementasi program KRPL yang ada di Desa Puhjark, faktor pendukung dan penghambat dalam keberlanjutan implementasi program KRPL serta manfaat yang dirasakan dari adanya implementasi program KRPL. Kemudian dijelaskan pula tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian dasar teori atau landasan dasar yang digunakan dalam menyusun penelitian skripsi. Terdapat teori pokok yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini antara lain mengenai kebijakan publik, Kebijakan ketahanan pangan, implementasi kebijakan, program KRPL, dan

ketahanan pangan. Dimana teori tersebut akan dipergunakan dalam menganalisa data yang didapatkan dilapangan baik berupa data sekunder maupun primer.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini yang terdiri dari: jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis sumber data, dan teknik pengumpulan data. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitiannya berdasarkan rumusan masalah yang ada. Rumusan yang pertama fokusnya adalah implementasi program KRPL dan peran serta sinergitasnya dalam keberlanjutan implementasi program KRPL tersebut. Rumusan yang kedua adalah faktor yang dapat mendukung dan menghambat dalam keberlanjutan implementasi program. Rumusan yang ketiga mengenai manfaat implementasi program KRPL dari sisi organisasional, ekonomi dan sosialnya. Kabupaten Kediri dijadikan sebagai lokasi penelitian karena lokasi penelitian merupakan salah satu lokasi terjadinya implementasi program KRPL. Situs penelitiannya dilaksanakan di BKP3 Kabupaten Kediri, Desa Puhjarak (tempat implementasi program KRPL), *stakeholders* Program KRPL yakni Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Plemahan yaitu Bapak Ir. Karno, Ibu-Ibu PKK Desa Puhjarak, serta masyarakat Desa Puhjarak. Jenis data yang digunakan primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian meliputi penyajian data yang diperoleh selama penelitian yang menjawab dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Penyajian data yang pertama berupa implementasi program KRPL yang ada di Desa Puhjarak serta peran dan sinergitasnya dalam mendukung keberlanjutan implementasi program tersebut. Penyajian data kedua berupa faktor yang mendorong dan menghambat keberlanjutan program KRPL tersebut. Sedangkan penyajian data yang ketiga berupa manfaat dari implementasi program KRPL dilihat dari sisi organisasionalnya, sosialnya serta ekonominya. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisa berdasarkan teori yang telah ditetapkan oleh peneliti seperti teori kebijakan, implementasi kebijakan maupun ketahanan pangan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan atas rumusan masalah yang telah ditentukan berdasarkan hasil penyajian data lapangan serta analisis teoritik dari peneliti. berdasarkan rumusan masalah yang pertama, peran dan sinergitas *stakeholder* dalam mendukung keberlanjutan program KRPL di Desa Puhjarak masih belum optimal. Untuk rumusan yang kedua, terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam keberlanjutan program yang ada di desa tersebut. Sedangkan untuk rumusan yang ketiga, dari sisi organisasional, sosial dan ekonomi implementasi program KRPL yang ada di desa tersebut dapat mendukung ketahanan pangan minimal ditingkat rumah tangga. selain itu dalam

bab ini juga diuraikan saran-saran untuk meningkatkan keberhasilan implementasi program KRPL dalam rangka mendukung ketahanan pangan di desa penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Administrasi publik menjadi sangat strategis memasuki millennium ketiga. Hal ini karena administrasi publik menghadapi isu-isu penting berkenaan dengan struktur administrasi publik dengan tantangan menguatnya swasta dan menyusutnya pemerintahan. Isu selanjutnya mengenai proses administrasi publik yang menghadapi bahwa proses penyelenggaraan administrasi publik merupakan sumber defisit terbesar di setiap negara. Nilai, yang berhubungan dengan munculnya ikon *entrepreneurial government* dan kapasitas dari administrator publik dalam mengurus urusan-urusan publik menjadi isu juga dalam millennium ketiga ini. Kebijakan publik juga menjadi isu karena dalam konteks persaingan global, tugas sektor publik adalah membangun lingkungan untuk mendukung warga masyarakat mampu berdaya saing. Lingkungan ini hanya dapat diciptakan oleh kebijakan publik. Kebijakan publik didalamnya terdapat perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan (Nugroho, Riant. 2012: 169-170).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua penggunaan konsep kebijakan yakni kebijakan dan kebijaksanaan. Kedua konsep ini mempunyai arti yang sama yakni serangkaian konsep serta asas yang dijadikan

garis besar sebagai dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak (Ali, 2006: 6).

Dalam bukunya, Islamy (2009: 17) menjelaskan bahwa kebijaksanaan (*Policy*) diberi makna yang bermacam-macam. Para ahli kebijakan mengungkapkan masing-masing pendapatnya. Seperti ahli kebijakan Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan yang memberi makna kebijakan sebagai “*A projected program of goals, values and practices*” (Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek yang terarah). Sedangkan Carl J. Friedrich mendefinisikan kebijaksanaan sebagai berikut:

“... *A proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose* (...”Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”).

Makna selanjutnya yang dikemukakan oleh James E. Anderson bahwa kebijaksanaan itu adalah: “*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Kemudian Amara Raksasataya mengemukakan kebijaksanaan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya suatu kebijaksanaan memuat tiga elemen yaitu:

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan

- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi (Islamy, 2009: 17-18).

Terkait dengan pendapat para ahli kebijakan diatas mengenai makna kebijaksanaan (*policy*) atau yang saat ini lebih dikenal dengan istilah kebijakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan mengandung tiga hal pokok yakni tindakan, dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dan yang terakhir untuk mencapai tujuan. Tiga hal pokok ini satu sama lain saling terkait dan bersinergi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Selanjutnya definisi mengenai kebijaksanaan Negara (*public policy*). Dimana definisi *public policy* ini pun juga tidak hanya satu, sama halnya dengan definisi *policy*. Para ahli pun mempunyai pendapatnya masing-masing mengenai definisi *public policy* ini. Dalam bukunya Ali (2006:8) dijelaskan definisi para ahli kebijakan sebagai berikut:

Menurut Thomas R. Dye, kebijaksanaan Negara sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Selanjutnya Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijaksanaan Negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintahpun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah.

Selanjutnya menurut George C. Edwards III dan Ira Sharkansky yang mengartikan kebijaksanaan negara hampir mirip dengan pendapat Dye yang dikutip oleh Islamy (2009: 18), dimana Edwards mengartikan kebijaksanaan negara sebagai berikut:

“... is what governments say and do, or do not do. It is the goals or purposes of government programs..” (“adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah..”).

Pakar selanjutnya yakni James Enderson yang mana sebelumnya telah mengemukakan pendapatnya mengenai kebijakan. Untuk definisi kebijakan negara menurut Enderson yakni:

“ *public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*”. (Kebijakan negara adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah). Menurut Enderson, implikasi dari pengertian kebijakan negara tersebut adalah:

- 1) Bahwa kebijakan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan,
- 2) Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan-tindakan pejabat-pejabat pemerintah
- 3) Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan melakukan sesuatu
- 4) Bahwa kebijakan negara itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif atau dalam artian merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu
- 5) Bahwa kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif, didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa (otoritatif) (Ali, 2006: 10).

Islamy (2009: 20-21) dalam bukunya menyatakan kesimpulan kebijakan negara dibidang administrasi negara antara lain:

- 1) *The organizing framework of purposes and rationales for government programs that deal with specified societal problems;*
(susunan rancangan tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan dengan masalah-masalah tertentu yang dihadapi oleh masyarakat);
- 2) *Whatever government choose to do or not to do;*
(Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakkan atau tidak untuk dilakkan);
- 3) *The complex programs enacted and implemented by government.*

(Masalah-masalah yang kompleks yang dinyatakan dan dilaksanakan oleh pemerintah).

Berdasarkan pemaparan-pemaparan makna kebijaksanaan negara atau yang juga sering dikenal dengan kebijakan publik, intinya adalah merupakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah maupun yang tidak dilakukan pemerintah berupa program-program. Apabila kebijakan tersebut berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan maka hal tersebut bersifat memaksa atau otoritatif yang harus dipenuhi oleh masyarakat suatu negara.

2. Jenis-jenis Kebijakan Publik:

Jenis-jenis kebijakan dibagi kedalam beberapa macam, dimana hal ini bertujuan untuk menunjukkan penekanan dan perhatian dari masing-masing pakar dan analis kebijakan yang terdapat dalam bukunya Ali (2006: 29-30) sebagai berikut:

a. Kebijakan Distributif

Merupakan kebijakan yang berguna untuk mendorong aktivitas masyarakat/ swasta serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu dilakukan bentuk intervensi antara lain: *tangible benefits*, seperti *member* subsidi, transfer dana, insentif pajak, kredit lunak, ijin waralaba (*franchise*), lisensi, dan lain-lain.

b. Kebijakan *Regulatory competitive*

Merupakan jenis kebijakan berupa pemberian barang atau jasa kepada satu atau sejumlah orang secara terbatas dalam memberikan pelayanan jasa publik (*delivers*) yang dipilih dari sejumlah calon secara kompetitif, seperti

memberikan ijin siaran TV, ijin siaran radio swasta, ijin traek bus, penerbangan dan lain-lain.

c. Kebijakan untuk melindungi masyarakat umum

Merupakan jenis kebijakan yang berusaha untuk melindungi masyarakat umum dengan menetapkan persyaratan/ kondisi untuk kegiatan swasta tertentu, seperti peraturan upah minimum, regional, persyaratan tanam kembali HPH, pengujian kendaraan umum, kewajiban tera untuk timbangan, penetapan tarif angkutan.

d. Kebijakan redistributif

Merupakan kebijakan yang bertujuan mengendalikan (*readjust*) alokasi kekayaan, hak milik, pemilikan, atau nilai-nilai lainnya diantara kelas sosial dan kelompok sosial dalam masyarakat, seperti pajak penghasilan atau pajak KB progresif, prioritas pada pengusaha lemah, pendidikan dan latihan di BLKI, Program bantuan desa, IDT dan lain-lain.

B. Implementasi Kebijakan

Ketika pemerintah membuat suatu kebijakan, tentunya kebijakan tersebut harus dilaksanakan atau diimplementasikan. Maka dari itu, berikut ini pemaparan mengenai makna dari implementasi kebijakan. Dalam kamus Webster disebutkan implementasi berarti *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu). Berdasarkan penjelasan

dalam kamus tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden) (Wahab, 2004: 64).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang dikutip oleh Wahab (2004: 65) juga menegaskan bahwa makna implementasi berarti memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian dari implementasi yakni kejadian-kejadian serta kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Hom (1975) sebagaimana dikutip oleh Wahab (2004: 65) menyebutkan proses implementasi sebagai “ *those action by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions* ” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Berdasarkan pemaparan mengenai implementasi kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan cara atau tindakan yang dilakukan individu maupun kelompok baik itu dilakukan oleh pemerintah atau swasta agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dimana kegiatan implementasi kebijakan itu sendiri berarti melaksanakan kebijakan yang telah dibuat baik berupa peraturan perundang-undangan,

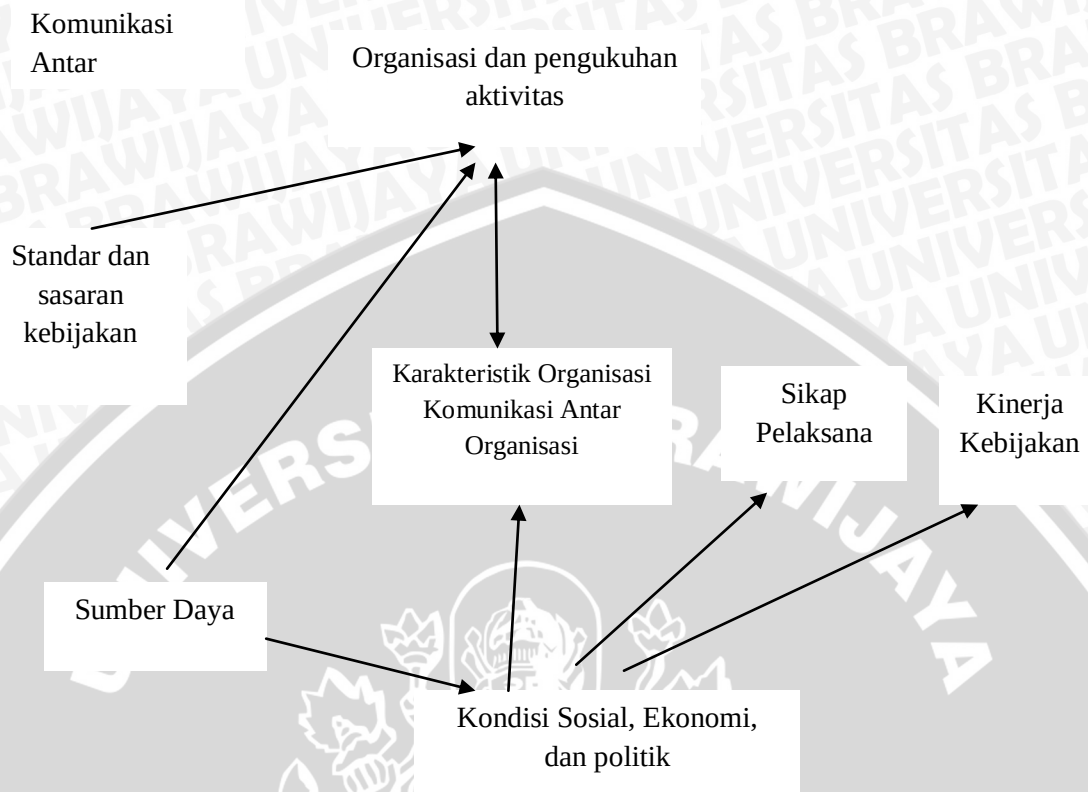
keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, dan lain sebagainya yang diturunkan menjadi program-program atau kegiatan.

1. Model Implementasi Kebijakan

Dalam kebijakan publik setidaknya mengandung tiga komponen dasar yakni, tujuan yang luas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran itu. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci, oleh sebab itulah dalam hal ini birokrasi harus menerjemahkan sebagai program-program aksi dan proyek. Makna “cara” tersebut terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa pelaksananya atau implementatornya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya serta bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur (Ali, 2006: 60).

Komponen “cara” dalam suatu kebijakan merupakan komponen yang berfungsi untuk merealisasikan tujuan yang jelas serta sasaran yang spesifik. Dimana cara ini disebut dengan implementasi. Dalam mengimplementasikan kebijakan, terdapat empat model implementasi. Oleh karena sebagai model, maka keempatnya tidak perlu diaplikasikan secara mentah-mentah, melainkan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan evaluasi. Berikut ini adalah model-model implementasi kebijakan dalam bukunya Ali (2006: 61):

- a. Model Meter dan Horn (1975)



Sumber: Ali (2006: 61)

Bagan 1 Implementasi Model Meter dan Horn

Jika melihat pada bagan diatas maka Meter dan Horn merumuskan abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan. Suatu implementasi kebijakan yang mana pada dasarnya dilakukan secara sengaja untuk meraih kinerja yang tinggi serta berlangsung antar berbagai faktor sebagaimana terlihat pada bagan diatas. Menurut model ini, dalam suatu kebijakan harus menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja dari para pengambil kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian dari standar dan sasaran.

Kejelasan suatu standar dan sasaran juga tidak menjamin implementasi yang efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar organisasi dan aktifitas pengukuhan. Semua pelaksana harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang implementasinya menjadi tanggung jawab mereka. Dimana persoalan ini berkaitan erat dengan karakter birokrasi pelaksana.

Selain itu, dalam kebijakan sumber daya harus tersedia baik berupa dana maupun insentif lainnya. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak disediakan oleh pemerintah secara memadai.

Menurut Meter dan Horn, organisasi pelaksana memiliki enam variabel dan semuanya harus dicermati oleh sang evaluator, yaitu:

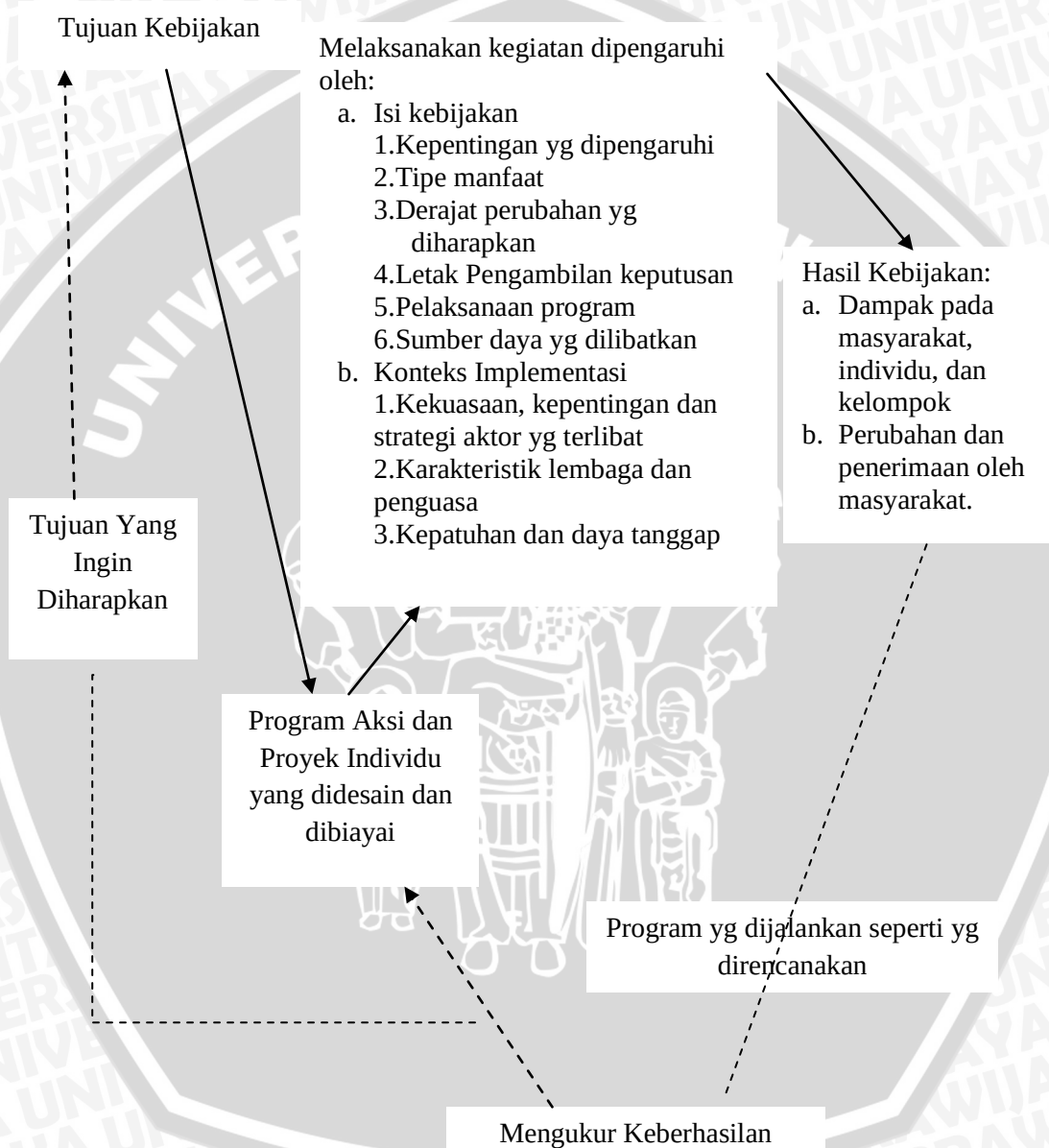
- a. Kompetensi dan jumlah staf,
- b. Rentang dan derajat pengendalian,
- c. Dukungan politik yang dimiliki,
- d. Kekuatan organisasi,
- e. Derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi,
- f. Keterkaitan dengan pembuat kebijakan.

Pada variable terakhir yakni variabel keterkaitan dengan pembuat kebijakan berarti menunjuk pada akses organisasi dalam mempengaruhi kebijakan.

b. Model Grindle

Menurut Grindle (1980) dalam bukunya Ali (2006: 63) menyatakan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks

implementasinya. Dimana pernyataan ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Meter dan Horn yang melihat implementasi dalam keterpengaruhannya oleh lingkungan.



Sumber: Ali (2006: 64)

Bagan 2 Implementasi Model Grindle

Ide utama dari model Grindle ini adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka selanjutnya implementasi kebijakan dilakukan. Berhasil tidaknya suatu kebijakan tergantung pada kemampuan implementasi dari suatu program itu yang dapat dilihat dari isi dan konteks kebijakan.

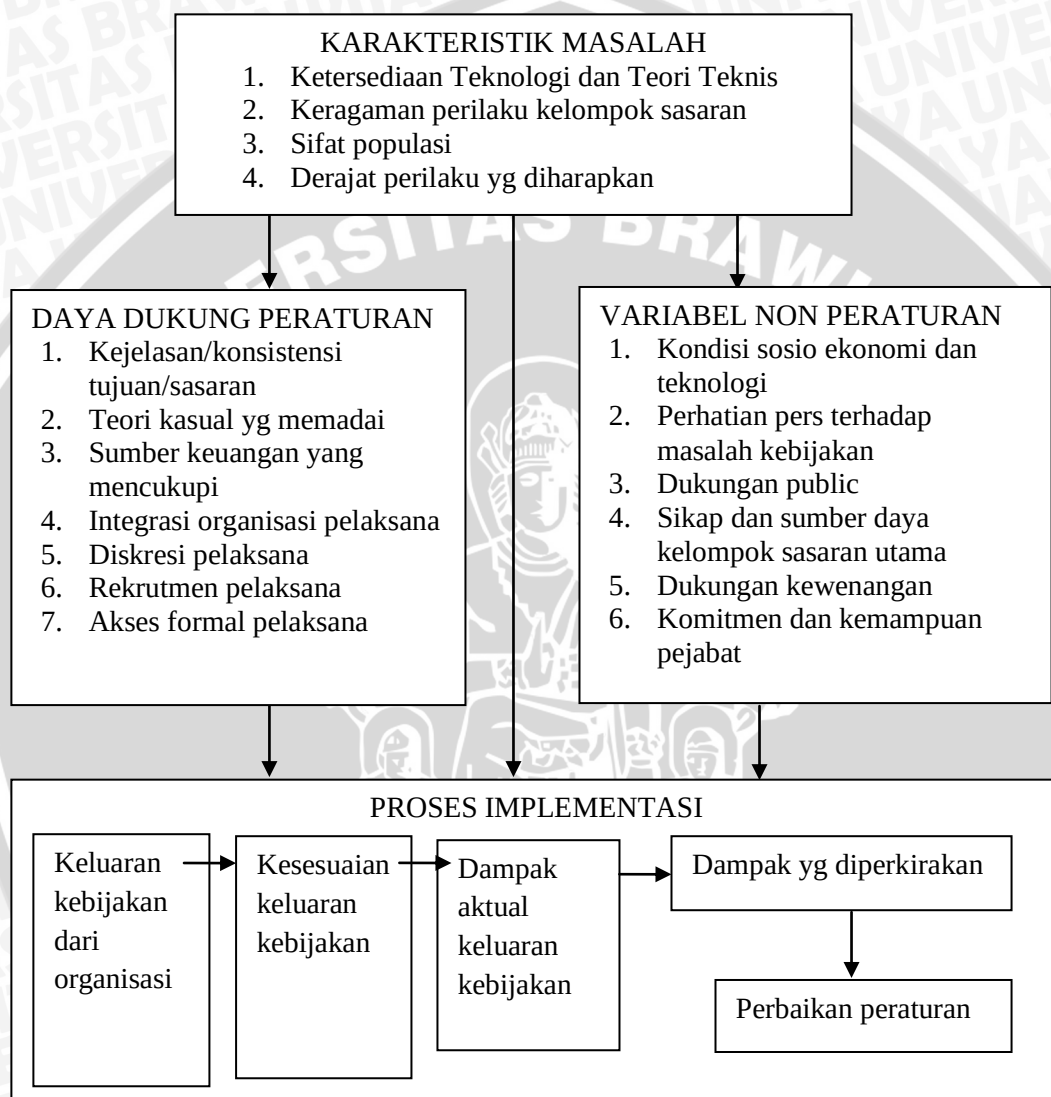
Isi dari suatu kebijakan mencakup: kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang saling berbeda lebih sulit diimplementasikan dibandingkan dengan yang menyangkut sedikit kepentingan.

Konteks suatu kebijakan mempengaruhi proses implementasi sebagaimana pengaruh kondisi sosial, ekonomi dan politik seperti yang dijelaskan pula oleh Meter dan Horn. Sedangkan konteks implementasi menurut Grindle antara lain sebagai berikut: kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga penguasa dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana. Intensitas keterlibatan para perencana, politisi, pengusaha, kelompok sasaran dan para pelaksana program akan bercampur baur mempengaruhi efektifitas implementasi.

c. Model Sabatier dan Mazmanian

Menurut model ini, implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variable, yakni: karakteristik masalah, struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang melaksanakan kebijakan,

faktor-faktor diluar peraturan. Pada dasarnya, kerangka berpikir mereka tidak jauh berbeda dengan kedua model diatas, dalam hal perhatiannya terhadap dua persoalan mendasar yaitu: kebijakan dan lingkungan (Ali, 2008: 66).



Sumber: Ali (2006: 67)

Bagan 3 Implementasi Model Sebatier dan Mazmanian

d. Model Edward

Dalam Nugroho (2012: 693), George Edward III menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*

menurut Edward, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully* (tanpa implementasi yang efektif, keputusan dari pembuat kebijakan tidak dapat diimplementasikan dengan sukses). Edward menyatakan agar implementasi kebijakan menjadi efektif maka perlu memperhatikan empat (4) isu pokok yaitu: *communication, resource, disposition or attitudes* dan *bureaucratic structures*.

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik dan sikap dan tanggapan dari para pihak yang terlibat. *Resource* berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. *Disposition* berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Hanya kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi *ineffective* (Nugroho, 2012: 693).

Berdasarkan penjelasan model-model implementasi diatas, inti dari yang disampaikan tokoh-tokoh diatas memang tidak jauh berbeda. Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model yang dikemukakan oleh Edward. Jika dikaitkan dengan implementasi program KRPL di Desa Puhjarak model Edward dapat digunakan sebagai analisis dalam pembahasan penelitian skripsi ini. Hal tersebut dikarenakan dalam model Edward terdapat aspek-aspek seperti komunikasi, sumber daya (*resource*), sikap (*disposition or attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structures*) yang dapat digunakan untuk menganalisis implementasi KRPL di Desa Puhjarak.

2. Aktor Implementasi

Menurut Ali (2006: 54), dalam setiap kebijakan yang telah dibuat tentunya perlu pelaku atau yang disebut dengan aktor dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Jika dalam pembuatannya saja melibatkan banyak aktor dalam pembuatan suatu kebijakan, begitu pula dalam pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Dimana membutuhkan pelaku atau aktor dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat.

Situasi di Indonesia tidak jauh berbeda dengan Negara-negara berkembang lainnya, dimana lembaga eksekutif mempunyai peranan besar termasuk juga dalam proses pembuatan kebijakan publik. Begitu pula birokrasi pemerintah tentunya, baik birokrasi pusat maupun birokrasi daerah mempunyai peranan yang lebih besar dalam proses implementasi. Di dalam birokrasi terdapat pula departemen yang membuat serta melaksanakan kebijakan disektornya masing-masing (seperti pertanian, kehutanan, perindustrian, keuangan, dalam negeri dan lain-lain). Selain itu, terdapat pula lembaga in sektoral yang mengkoordinasikan banyak instansi, negeri atau swasta dalam penyelenggaraan suatu kebijakan (misalnya Badan ketahanan pangan yang mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tentang ketahanan pangan) (Ali, 2006: 55).

Dalam implementasi kebijakan, pelaksana atau aktor kebijakan senantiasa diawali dari aktor negara atau pemerintah sebagai agensi eksekutif. Namun demikian, aktor implementasi kebijakan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pemerintah. Meliputi kebijakan-kebijakan yang masuk dalam kategori *directed* atau berkenaan dengan eksistensi Negara bangsa. Kebijakan disini disebut sebagai *exintensial driven policy*. Pertahanan, keamanan, penegakan keadilan, dan sebagainya. Meskipun masyarakat dilibatkan, perannya seringkali dikategorikan sebagai periferal.
- b. Pemerintah pelaku utama, masyarakat pelaku pendamping. Kebijakan-kebijakan yang *government driven policy*. Disini termasuk pelayanan KTP dan Kartu Keluarga yang melibatkan jaringan kerja nonpemerintah ditingkat masyarakat.
- c. Masyarakat pelaku utama, pemerintah pelaku pendamping. Kebijakan-kebijakan yang *societal driven policy*. Disini termasuk kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh masyarakat, yang mendapat subsidi dari pemerintah. Termasuk diantaranya panti-panti sosial, yayasan kesenian, hingga sekolah-sekolah nonpemerintah.
- d. Masyarakat sendiri, yang disebut *people (atau private) driven policy*. Termasuk didalamnya kebijakan pengembangan ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan bisnis (Nugroho, Riant. 2012: 706-707).

Aktor implementasi merupakan orang-orang yang berperan dalam menjalankan kebijakan yang dibuat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam implementasi kebijakan tentunya pengelompokan aktor tidak seekstrem yang dijelaskan. Hal ini kaena pada dasarnya implementasi kebijakan senantiasa dilakukan dua aktor/ lebih secara bersama-sama.

3. Kebijakan Ketahanan Pangan

Dalam rangka menghadapi tantangan perubahan fenomena dan dinamika ketahanan pangan, maka pemerintah menyusun Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010-2014 sebagai penyempurnaan dari KUKP 2006-2009. Prinsip dalam penyusunan KUKP 2010-2014 adalah salah satu upaya untuk melaksanakan pembangunan ketahanan pangan dimasa

mendatang secara lebih terarah sehingga dapat membawa bangsa Indonesia pada kondisi ketahanan pangan yang mapan (Dewan Ketahanan Pangan, 2011: 161).

Kebijakan umum ketahanan pangan dirumuskan berdasarkan tiga aspek utama yaitu; ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Arah kebijakan pada aspek ketersediaan, adalah “(a) meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas sumberdaya alam dan air; (b) menjamin produksi pangan utamanya dari produksi dalam negeri; (c) mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; dan (d) meningkatkan kapasitas produksi nasional dengan menetapkan lahan abadi untuk produksi pangan” (Dewan Ketahanan Pangan, 2011).

Prioritas kebijakan pada aspek distribusi menurut Dewan Ketahanan Pangan (2011) diarahkan untuk:

(a) meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pangan, guna memperbaiki efisiensi perdagangan termasuk di dalamnya mengurangi kerusakan bahan pangan akibat proses distribusi yang tidak memenuhi kelayakan; (b) mengurangi dan/atau menghilangkan peraturan daerah yang menghambat distribusi pangan antar daerah; dan (c) mengembangkan kelembagaan pengolahan dan pemasaran di pedesaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi pangan serta mendorong penciptaan nilai tambah.

Sedangkan Arah kebijakan di bidang konsumsi menurut Dewan Ketahanan Pangan (2011) adalah:

(a) menjamin pemenuhan pangan bagi setiap rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dikonsumsi dan bergizi seimbang; (b) mendorong, mengembangkan dan membangun serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi pemenuhan hak atas pangan; (c) mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan; dan (d) meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan

pangan/pangan bersubsidi kepada golongan masyarakat tertentu (golongan miskin, ibu hamil, balita gizi buruk).

Mengacu pada arahan tersebut maka kebijakan umum ketahanan pangan dirinci atas elemen penting yang diharapkan menjadi panduan bagi pemerintah, swasta dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, tingkat wilayah dan tingkat nasional. Selain memberikan arah kebijakan yang lebih jelas dan mudah dicerna, pemerintah berperan dalam menjabarkan secara rinci kebijakan tersebut, menyediakan insentif usaha di bidang.

4. Isu-isu Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan

Rumah tangga di Indonesia, utamanya rumah tangga tani di Indonesia perlu membangun ketahanan pangan. Di Indonesia, pokok-pokok kebijakan pangan mencakup pengembangan: produksi pangan, efisiensi perdagangan dan distribusi pangan, industri pangan, kemampuan mengeksport pangan dan daya beli masyarakat. Dimana kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan (*food security*), mendorong diversifikasi konsumsi pangan, meningkatkan pangan (*food safety*) dan mengembangkan kelembagaan pangan yang efektif (Darmawan, 2011: 12).

Konsep ketahanan pangan dan pencapaiannya mempunyai banyak pengertian, antara lain: peran stok biji-bijian nasional dan internasional, pencapaian swasembada pangan setiap negara, penghilangan hambatan perdagangan pangan, penyediaan pangan yang memadai untuk seluruh

masyarakat selamanya. Dimana interpretasi konsep dan arti terakhir adalah paling luas dan merupakan tujuan ketahanan pangan. Menurut SEARCA dalam Darmawan (2011, 14) mengelompokkan indikator ketahanan pangan menjadi dua tingkat yakni tingkat rumah tangga dan masyarakat serta tingkat nasional. Untuk tingkat rumah tangga dan masyarakat, indikator ketahanan pangan adalah stabilitas pasokan (musiman; distribusi ketersediaan pangan pokok bulanan, dalam kg), ketersediaan (jumlah kg), aksesibilitas (biaya yang diperlukan perbulan). Sedangkan indikator ketahanan pangan tingkat nasional (untuk pangan pokok seperti beras, jagung, ikan dan lain-lain) adalah produksi (ton/tahun, ketersediaan pangan pokok), konsumsi (ton/tahun, pola konsumsi perkapita, rata-rata biaya per pangan pokok perbulan), impor dan ekspor (ton/tahun).

Adapun kebijakan tersebut dituangkan dalam program: pemeliharaan kemantapan swasembada pangan, peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan kemampuan penyediaan pangan. Beragam kebijakan dan program tersebut akan berdampak pada diversifikasi konsumsi baik secara langsung maupun tidak. Menurut Sawit yang dikutip oleh Darmawan (2011, 12-13), Indonesia telah merombak kebijakan pangan, khususnya beras secara drastis, misalnya peran bulog sebagai *state trading enterprise* dihapus, berbagai subsidi *input* dan *output* dipangkas. Selain itu, kebijakan stabilisasi harga tidak diimplementasikan lagi, dan kebijakan swasembada panganpun juga tidak jelas masih dianut atau tidak. Saat ini masih tersisa tiga kebijakan yang terkait dengan beras, yaitu kebijakan harga dasar

gabah, kebijakan *targeted rise subsidy* (program operasi pasar khusus), dan kebijakan tarif untuk membatasi impor.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa program ketahanan pangan yang ada di Indonesia tampaknya belum sejalan dengan pertanian berkelanjutan. Padahal, pertanian berkelanjutan sangat terkait dengan ketahanan pangan. Dalam ketahanan pangan rumah tangga berhubungan dengan kemampuan untuk memenuhi kecukupan pangan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Kecukupan pangan dalam hal ini mencakup segi kuantitas dan kualitas baik dari produksi usahatani yang lestari maupun membeli di pasar.

5. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan paradigma yang digunakan pemerintah dalam pemenuhan pangan penduduk dan pembangunan pertanian pangan umumnya. Konsep ketahanan pangan ini banyak mengalami perubahan. Semula pada tahun 1960-an dan 1970-an ditekankan pada penyediaan pangan yang cukup, pada tahun 1983 kemudian memasukan jaminan akses, lalu diperluas lagi dengan memasukan kemiskinan, pendapatan, bencana alam, krisis ekonomi, dan konflik pada tahun 1983. Kemudian pada tahun 1990-an ditambah lagi dengan memasukkan keamanan pangan (*food safety*) dan kekurangan protein dan energi menurut Syahyuti yang dikutip oleh Yuwono (2011:48).

Pada tahun 1996 ketika *Federation Agriculture Organization* (FAO) mengadakan *World Food Summit* (WFS) dan mengeluarkan Deklarasi Roma mengenai ketahanan pangan (*food Security*) yaitu: “untuk mencapai ketahanan pangan bagi setiap orang dan melanjutkan upaya untuk menghilangkan kelaparan diseluruh Negara” (Yuwono, 2011:74). Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa ketahanan pangan ini merupakan suatu kondisi mengenai tersedianya pangan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan setiap orang setiap saat agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif.

Fardiaz juga menyatakan bahwa “ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau” (Fardiaz, Tanpa tahun: 1). Indikator terwujudnya ketahanan pangan yang kokoh menurut Fardiaz adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan pangan bagi masyarakat (*food availability*)

Dalam upaya membangun ketersediaan pangan bagi masyarakat diversifikasi (penganekaragaman) pangan perlu diterapkan melalui upaya penyediaan pangan yang beragam untuk memenuhi permintaan. Diversifikasi pangan juga berorientasi sumberdaya lokal artinya memenuhi kebutuhan pangan beragam diutamakan dari produksi lokal sekaligus dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang positif di daerahnya.

2. Keterjangkauan pangan oleh seluruh masyarakat (*food accessibility*)

Untuk mencapai keterjangkauan pangan oleh seluruh masyarakat, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan, serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Sistem pangan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.

3. Kelayakan untuk diterima konsumen (*consumer acceptability*)

Dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk dapat diedarkan atau diperdagangkan harus memenuhi ketentuan tentang sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, residu cemaran, dan kemasan pangan.

4. Keamanan untuk dikonsumsi (*food safety*)

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

5. Kesejahteraan masyarakat, keluarga dan perorangan (*People's welfare*)

Ketahanan pangan yang dikembangkan dengan bertumpu pada keragaman sumberdaya bahan pangan merupakan faktor penting. Disamping itu didukung oleh kelembagaan dan budaya lokal/domestik, distribusi dan ketersediaan pangan mencapai seluruh wilayah serta peningkatan pendapatan masyarakat agar mampu mengakses pangan

secara berkelanjutan dengan memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha seluas-luasnya.

Sedangkan dalam bukunya Darmawan (2011: 15) dijelaskan bahwa metode pengukuran ketahanan pangan terus dikembangkan dan secara konseptual ukuran ketahanan pangan yang telah diterima oleh Sidang Komite Pangan Dunia ke-18 pada tahun 1993 mencakup tiga aspek. Ketiga aspek berikut inilah yang dimanifestasikan dalam indeks yang mengukur ketahanan pangan. Ketiga aspek tersebut antara lain:

1. Ketersediaan Pangan,
2. Stabilisasi penyediaan pangan, dan
3. Akses individu dan/rumah tangga untuk pangan.

Ketahanan pangan secara hirarki dapat dibagi pada tingkat global, regional nasional, lokal (daerah), rumah tangga dan individu. Ketahanan pangan pada tingkat yang lebih tinggi merupakan prasyarat terciptanya ketahanan yang lebih rendah, namun prasyarat tersebut belum cukup. Hal ini sama halnya dengan ketahanan pangan nasional untuk mencapai ketahanan pangan daerah dan rumah tangga tetapi hal tersebut belum mencukupi. Konsep ketahanan pangan ini lebih menitikberatkan pada ketersediaan pangan tanpa memperdulikan dari mana dan siapa yang memproduksi pangan (Yuwono, 2011:48).

Ketahanan pangan merupakan dasar utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Dalam rangka ketahanan pangan, Indonesia telah menerapkan kebijakan swasembada pangan absolut, khususnya untuk beras sampai awal dekade 1990 kemudian menganut swasembada *on trend* untuk sesudahnya. Swasembada pangan absolut diartikan bahwa kebutuhan pangan dipenuhi seluruhnya (100%) dari produk domestik. Sedangkan swasembada *on trend* berarti swasembada dengan tingkat 90%. Swasembada *on trend* dimaknai dengan kondisi dimana dalam beberapa tahun tertentu ada kalanya mengimpor pangan, tetapi pada tahun yang lainnya mengekspor, sehingga rata-rata dalam jangka menengah tetap memenuhi swasembada (Suryana, 2003: 175).

Berdasarkan rencana strategis Kementerian Pertanian 2010-2014, swasembada pangan merupakan target utama kementerian Pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/Rc.110/1/2010 selama lima tahun ke depan (2010-2014), dalam membangun pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu:

1. pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.
2. peningkatan Diversifikasi Pangan.
3. peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor.
4. peningkatan Kesejahteraan Petani.

Dalam rencana strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 disebutkan swasembada ditargetkan untuk tiga komoditas pangan utama yaitu kedelai, gula dan daging sapi. Adapun swasembada berkelanjutan ditargetkan untuk komoditas padi dan jagung. Upaya mencapai keberhasilan swasembada dan swasembada berkelanjutan atas tanaman pangan sebagai salah target mencapai ketahanan pangan yang ditetapkan penting untuk mendapat dukungan seluruh pihak karena ketahanan pangan merupakan salah satu faktor penentu dalam stabilitas nasional suatu negara, baik di bidang ekonomi, keamanan, politik dan sosial.

Akhir-akhir ini dalam wacana pembangunan ketahanan pangan nasional, ketua umum HKTI Ir. Siswono Yudo Husodo, memunculkan konsep kemandirian pangan. Dalam makalahnya, Siswono mengartikan kemandirian pangan dengan kebutuhan pangan nasional yang harus dipenuhi secara mandiri dengan memberdayakan modal manusia, modal sosial, dan ekonomi yang dimiliki petani Indonesia, yang pada gilirannya harus berdampak kepada peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi petani dan masyarakat lainnya. Selanjutnya, Siswono menuliskan skenario mandiri dengan kondisi dimana kebutuhan pangan nasional minimal 90% dipenuhi dari produksi dalam negeri. Sebagai pemantapan ketahanan pangan 2015, konsep kemandirian pangan dapat dipakai acuan dengan definisi pemenuhan kebutuhan pangan nasional yang bertumpu seoptimal mungkin pada kemampuan sumberdaya domestik, yang dapat

meningkatkan kesejahteraan konsumen dan melindungi produsen, terutama usaha kecil (Suryana, 2003: 174-175).

Kondisi ketahanan pangan dan kemandirian pangan seharusnya tidak hanya memberikan gambaran makro kondisi pangan di Indonesia, namun juga harus secara nyata menggambarkan kondisi mikro hingga di tingkat pelaku rumah tangga. Upaya mencapai kemandirian pangan merupakan hal penting untuk mencapai kondisi ideal dari kedaulatan pangan. Kemandirian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dapat dicapai dengan cara mengurangi atau meminimalkan ketergantungan akan impor (Tim Peneliti Pangan IPSK-LIPI, 2001: 8).

Membangun ketahanan serta kemandirian pangan menjadi sangat penting dan strategis, sebagai penegasan dalam upaya penyediaan pangan yang dilakukan dengan mengembangkan sistem produksi pangan berbasis pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Upaya penyediaan pangan tersebut tidak bisa dipisahkan dari prinsip kedaulatan pangan itu sendiri. Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO), kedaulatan pangan merupakan hak untuk memiliki pangan secara teratur, permanen dan bisa didapatkan secara bebas, baik secara cuma-cuma maupun membeli dengan jumlah dan mutu yang mencukupi, serta cocok dengan tradisi-tradisi kebudayaan rakyat yang mengkonsumsinya (Tim Peneliti Pangan IPSK-LIPI, 2001: 8).

Berdasarkan pemaparan diatas, inti dari ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketahanan

pangan merupakan kondisi dimana tersedianya pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan setiap orang dan setiap saat. Hal tersebut terjadi pada tingkat global, regional nasional, lokal (daerah), hingga rumah tangga. Ketahanan pangan terjadi melalui swasembada pangan. Swasembada pangan digolongkan menjadi dua macam yaitu swasembada pangan absolut dan swasembada pangan 90 persen. Kondisi swasembada pangan 90 persen ini bisa diartikan dengan kemandirian pangan. Dalam upaya ketahanan pangan dan kemandirian pangan diperlukan prinsip kedaulatan pangan.

C. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

1. Dasar Hukum KRPL

Apabila suatu Negara tidak mandiri dalam pemenuhan pangan, maka kedaulatan negara bisa terancam. Penyelenggaraan urusan pangan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 pengganti Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996, yang dibangun berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Dalam Undang-Undang Pangan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat perorangan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermanfaat (Lampiran Peraturan Menteri Pertanian, 2013: 1).

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertanian (2013: 2) juga dijelaskan mengenai dasar pelaksanaaak KRPL sebagai berikut:

Pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) merupakan implementasi dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian yaitu Empat Sukses Pertanian, yang salah

satunya ialah mengenai Peningkatan Diversifikasi Pangan, yang merupakan salah satu kontrak kerja antara Menteri Pertanian dengan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2009-2014, dengan tujuan untuk meningkatkan keanekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik wilayah. Kontrak kerja ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Peraturan tersebut kini menjadi acuan untuk mendorong upaya penganekaragaman konsumsi pangan dengan cepat melalui basis kearifan lokal serta kerja sama terintegrasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Di tingkat provinsi, kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti melalui surat edaran atau Peraturan Gubernur (Pergub), dan di tingkat kabupaten/kota ditindaklanjuti dengan surat edaran atau Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwalikota).

Sebagai bentuk keberlanjutan program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal tahun 2010, pada tahun 2013 program P2KP diimplementasikan melalui kegiatan:

- a. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL),
- b. Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), serta
- c. Sosialisasi dan Promosi P2KP (Lampiran Peraturan Menteri, 2013).

Melalui tiga kegiatan besar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk membentuk pola konsumsi pangan yang baik. Selain itu perlu dijalin kerja sama kemitraan dengan pihak swasta yang antara lain bisa berupa *Corporate Social Responsibility*

(CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) baik di bidang pangan maupun bidang lainnya lainnya seperti pendidikan dengan sosialisasi baik kepada anak usia dini maupun ke kelompok wanita dan masyarakat dalam konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

2. Pengertian Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertanian (2013) dijelaskan bahwa:

Rumah Pangan Lestari adalah sebuah konsep hunian yang secara optimal memanfaatkan pekarangannya sebagai sumber pangan dan gizi keluarga secara berkelanjutan. Sedangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat.

Program kawasan rumah pangan lestari (KRPL) adalah konsep penumbuhan dan pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga secara diversifikasi yang berbasis sumber daya lokal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan dalam satu kawasan (BPTP Jatim, 2012).

Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan manfaat pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Upaya ini dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah, serta budidaya ternak dan ikan sebagai tambahan untuk

ketersediaan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein bagi keluarga pada suatu lokasi kawasan perumahan/warga yang saling berdekatan. Dengan demikian akan dapat terbentuk sebuah kawasan yang kaya akan sumber pangan yang diproduksi sendiri dalam kawasan tersebut dari optimalisasi pekarangan. Pendekatan pengembangan ini dilakukan dengan mengembangkan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), antara lain dengan membangun kebun bibit dan mengutamakan sumber daya lokal disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal (*local wisdom*) sehingga kelestarian alam pun tetap terjaga (Lampiran Peraturan Menteri Pertanian, 2013).

Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL dengan pendampingan oleh Penyuluh Pendamping P2KP desa dan Pendamping P2KP kabupaten/kota, serta dikoordinasikan bersama dengan aparat kabupaten/kota. Selain pemanfaatan pekarangan, juga diarahkan untuk pemberdayaan kemampuan kelompok wanita membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA), termasuk kegiatan usaha pengolahan pangan rumah tangga untuk menyediakan pangan yang lebih beragam.

3. Tujuan KRPL

Tujuan dari KRPL adalah untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, mengurangi biaya pengeluaran rumah tangga, penambahan pendapatan keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan. KRPL sebenarnya bukan hal baru dalam masyarakat, karena praktek-praktek menanam dalam

skala terbatas (dalam pot) dan banyak jenis tanaman (keragaman tanaman) sudah lama dijalankan oleh masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Hanya saja pola dan sistem pengerjaannya masih dilaksanakan secara individu rumah tangga dan belum mempertimbangkan aspek pemenuhan pangan dan gizi serta keberlanjutannya (BPTP Jatim, 2012).

4. Penerapan KRPL

Dalam penerapan KRPL, RPL dikelompokkan berdasar strata, yaitu strata 1 untuk lahan sempit, strata 2 untuk lahan sedang, dan strata 3 untuk lahan luas. Penerapannya adalah sebagai berikut:

- a. Strata 1 berupa rumah tanpa halaman yang merupakan warung. Tanaman yang dikembangkan adalah sayuran dalam pot/polibag yang diatur dalam vertikultur menggunakan rak dan bambu yang digantung di pagar.
- b. Strata 2 berupa rumah dengan pekarangan yang dimanfaatkan untuk penanaman sayuran, TOGA, dalam bedengan, dan vertikultur sayuran. Intensifikasi pagar untuk RPL di perkotaan umumnya menyukai sayuran, sedangkan untuk pedesaan sebagian besar menggunakan tanaman untuk pakan ternak.
- c. Strata 3, komoditas yang dikembangkan lebih beragam. Pada pekarangan depan dapat dimanfaatkan untuk sayuran, tanaman obat keluarga dan tanaman buah. Pekarangan samping dimanfaatkan untuk kolam ikan dan sayuran secara bedengan. Sedangkan untuk pekarangan belakang dimanfaatkan untuk memelihara ayam atau

ternak kambing serta tanaman buah (Kementrian Pertanian, 2012: 11-15).

5. Prinsip KRPL

Prinsip dasar KRPL adalah: (i) pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk ketahanan dan kemandirian pangan, (ii) diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, (iii) konservasi sumberdaya genetik pangan (tanaman, ternak, ikan), dan (iv) menjaga kelestariannya melalui kebun bibit desa menuju (v) peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Kementrian Pertanian, 2012).

Untuk menjaga keberlanjutan dan mendapatkan nilai ekonomi dari KRPL, pemanfaatan pekarangan diintegrasikan dengan unit pengolahan dan pemasaran produk. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyelamatan hasil yang melimpah dan peningkatan nilai tambah produk.

Dampak yang diharapkan dari pengembangan KRPL antara lain:

- a. Terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari.
- b. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan di perkotaan maupun perdesaan untuk budidaya tanaman pangan, buah, sayuran dan tanaman obat keluarga (toga), ternak dan ikan, serta pengolahan hasil dan limbah rumah tangga menjadi kompos.
- c. Terjaganya kelestarian dan keberagaman sumber pangan lokal.
- d. Berkembangnya usaha ekonomi produktif keluarga untuk menopang kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan lestari dan sehat (Kementrian Pertanian, 2012).

D. Pengelolaan Sumber Daya Lokal

Pada awal 1980-an kelemahan-kelemahan pada paradigma *welfare-oriented* atau *equity-oriented development* (pembangunan kesejahteraan dan keadilan) mulai nampak sehingga hal ini mengundang reaksi berupa kritik dari

pakar yang lain. Kritik dari pakar lain ini kemudian melahirkan paradigma baru, yakni *people-centered development* yang kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal (PSDL) atau *Community-Based Resource Management*.

Menurut Korten yang dikutip Tjokrowinoto (2012: 218) mengungkapkan bahwa pusat perhatian dari *people-centered development* adalah perkembangan manusia (*human growth*), kesejahteraan (*wellbeing*), keadilan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*). Pemikiran utama dalam paradigma ini adalah keseimbangan ekologi manusia (*balanced human ecology*) dimana sumber pembangunannya yang utama adalah informasi dan prakarsa yang kreatif dan takkan pernah habis. Tujuannya yang utama adalah perkembangan manusia dalam artikulasi yang optimal dari potensi manusia.

Paradigma *people-centered development* dalam memberikan peranan kepada individu, bukan sebagai subjek, akan tetapi sebagai pelaku (*actor*) yang menentukan tujuan yang hendak dicapai, menguasai sumber-sumber, mengarahkan proses yang menentukan hidup mereka. Oleh sebab itu, paradigma ini memberi tempat yang penting bagi prakarsa dan keanekaragaman lokal. Paradigma ini menekankan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (*self-reliant communities*) sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri (Tjokrowinoto, 2012: 219).

Pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam paradigma *people-centered development* ini menjadi dasar dari sistem manajemen yang dikenal sebagai Pengelolaan Sumber Daya Lokal (*community Based Resource Management*).

Pengelolaan sumber daya lokal merupakan suatu manajemen pembangunan, yaitu kemiskinan, memburuknya lingkungan hidup, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang menyangkut diri mereka sendiri. Pengelolaan sumber daya lokal merupakan suatu mekanisme perencanaan *people centered development* yang menekankan pada teknologi *social learning* dan strategi perumusan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan diri mereka (*empowerment*) (Tjokrowinoto, 2012: 220).

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat diketahui bahwa pengelolaan sumber daya lokal muncul setelah adanya pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people centered development*). Dimana pengelolaan sumber daya lokal merupakan suatu manajemen pembangunan kemiskinan, lingkungan hidup serta pembangunan-pembangunan lainnya yang menyangkut masyarakat yang ada dalam proses pembangunan. proses pembangunan yang dilakukan berorientasi pada manusia, dimana dalam proses tersebut manusia dijadikan sebagai subjek bukan objek untuk mengaktualisasikan diri manusia itu sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian berguna untuk menemukan, mengembangkan dan melakukan klarifikasi suatu peristiwa dengan menggunakan metode-metode penelitian, sehingga dapat menentukan tingkat hasil penelitiannya. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini karena dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan, guna melihat situasi dan kondisi dalam implementasi program KRPL di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. Hal ini didukung pula oleh pendapat Spradley (1980) dalam Sugiono (2013: 21), yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk meneliti suatu situasi yang sangat mikro yaitu satu situasional (*single social situation*), sampai yang makro masyarakat luas yang kompleks (*complex society*).

Metode yang digunakan oleh peneliti, dipandang sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif dengan fenomena yang diteliti. Penggunaan metode kualitatif yang digunakan oleh peneliti diarahkan untuk mendeskripsikan serta menganalisis fenomena tentang peran dan sinergitas antar *stakeholder* dalam mengimplementasikan program KRPL sebagai upaya optimalisasi pekarangan berbasis sumber daya lokal serta untuk mengetahui manfaat program KRPL.

terhadap masyarakat di Desa Puhjarak, selain itu untuk mengetahui faktor pendukung maupun penghambat implementasi program KRPL yang dilaksanakan di Desa Puhjarak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian deskriptif. Dimana jenis penelitian ini lebih peka dalam menangkap berbagai fenomena informasi, khususnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Melalui jenis penelitian ini pula, peneliti dapat menyajikan bentuk yang menyeluruh dan holistik dalam menganalisis suatu fenomena sosial. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Moleong (1989) bahwa penelitian kualitatif antara lain bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar daripada angka-angka (Basrowi & Suwandi, 2008: 187).

B. Fokus Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menentukan fokus penelitian yang berguna untuk membatasi studi agar penelitian yang dilakukan lebih fokus, terarah dan mendalam serta dapat menyaring informasi yang lebih relevan. Dalam penelitian kualitatif pun juga menghendaki batasan dalam penelitian, hal ini didasarkan pada fokus penelitian merupakan masalah yang akan diteliti dan dikaji oleh peneliti. Seperti dalam bukunya Sugiono (2013: 32), yang mengungkapkan bahwa begitu luasnya masalah, maka dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Sehingga dalam penelitian kuantitatif disebut dengan

batasan masalah. Sedangkan dalam penelitian kualitatif batasan masalah ini disebut dengan fokus yang berisi pokok masalah.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab Pendahuluan serta mengacu pada kajian teoritis, maka peneliti menetapkan fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran dan Sinergitas *stakeholder* dalam mendukung keberlanjutan implementasi Program KRPL di Puhjarak-Kec. Plemahan Kab. Kediri):
 - a. Implementasi program KRPL di Puhjarak,
 - b. Peran dan sinergitas *stakeholder* dalam keberlanjutan implementasi Program KRPL.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam keberlanjutan implementasi Program KRPL di Desa Puhjarak:
 - a. Faktor Pendukung; berupa tanah yang subur, Potensi pekarangan, Sarana dan Prasarana, Program Pemerintah, Kelembagaan.
 - b. Faktor Penghambat; permasalahan teknis yang belum terselesaikan dan motivasi pelaku RPL yang menurun.
3. Manfaat implementasi program KRPL terhadap ketahanan pangan masyarakat Desa Puhjarak dilihat dari kondisi:
 - a. Organisasional,
 - b. Sosial,
 - c. Ekonomi.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Setting penelitian atau lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah-wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek atau tempat penelitian itu akan dilaksanakan (Basrowi & Suwandi, 2008). Berdasarkan pemaparan tersebut maka dalam penelitian ini dilakukan di pemerintahan Kabupaten Kediri. Hal ini karena lokasi penelitian merupakan salah satu lokasi terjadinya implementasi program KRPL. Penetapan Kabupaten Kediri sebagai tempat implementasi program KRPL didasarkan pada masih cukup luasnya pekarangan yang ada di wilayah kabupaten Kediri sehingga perlu dioptimalisasikan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana implementasi program KRPL yang ada di pemerintahan Kabupaten Kediri ini.

Sedangkan situs penelitiannya dilaksanakan di BKP3 Kabupaten Kediri, Desa Puhjarak (tempat implementasi program KRPL), *stakeholder* Program KRPL yakni Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Plemahan yaitu Bapak Ir. Karno, Ibu-Ibu PKK Desa Puhjarak, serta masyarakat Desa Puhjarak. Pemilihan situs ini dikarenakan situs tersebut yang terlibat langsung dengan implementasi program KRPL. Selain itu pada situs tersebut terdapat data dan informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan keberlanjutan implementasi program KRPL. Penetapan lokasi dan situs penelitian diatas diambil juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan peneliti sendiri sebagai berikut:

1. Peneliti ingin mengetahui proses implementasi program KRPL serta keberlanjutannya di pemerintahan Kabupaten Kediri yang dilaksanakan di

Desa Puhjarak. Serta harapannya program KRPL ini tidak hanya dapat berkembang di Desa Puhjarak namun dapat pula berkembang menyeluruh di Kabupaten Kediri bahkan Nasional.

2. Program KRPL ini merupakan turunan dari kebijakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan (P2KP) dimana tujuannya diharapkan mampu mengoptimalkan pekarangan yang ada sehingga konsumsi pangan lebih beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) serta dapat meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga.

D. Sumber Data

Keberadaan sumber data memegang peranan yang sangat penting dalam setiap penelitian. Oleh sebab itulah dalam penelitian ini, peneliti menentukan siapa saja serta data apa saja yang harus didapatkan guna menjawab fokus dan tujuan penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat Lofland dan Lofland (1984) dalam Basrowi & Suwandi (2008: 169) yang menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Oleh karena dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, maka peneliti tidak menggunakan kuisioner dalam pengumpulan data, tetapi metode yang digunakan adalah metode wawancara, sehingga sumber data dalam penelitian ini disebut informan.

Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung situs penelitian yang menurut peneliti bisa memberikan data-data sekunder sebagai pendukung penelitian sebagaimana yang telah dijelaskan pula pada lokasi dan situs penelitian. Dengan demikian, penelitian ini akan dikelompokkan pada dua jenis data berdasarkan cara memperolehnya, yakni:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dimana sumber tersebut diperoleh dari informan yang berhubungan langsung dengan objek penelitian baik melalui proses wawancara maupun observasi langsung. Adapun yang bertindak sebagai informan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bapak Ir. Junadi selaku Kepala bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan di BKP3 Kabupaten Kediri.
- b. Bapak Wanoto, SP selaku Koordinator BPP Plemahan.
- c. Bapak Ir. Karno selaku PPL Desa Puhjarak
- d. Bapak Sugiyo selaku Kepala Desa Puhjarak serta penanggung jawab program KRPL di Desa Puhjarak.
- e. Ibu Sumitri Selaku Ketua PKK sekaligus ketua KRPL Desa Puhjarak.
- f. Bapak Sayuti Maryono selaku tim teknis program KRPL di Desa Puhjarak.

- g. Beberapa warga Desa Puhjarak yang turut serta dalam pelaksanaan program KRPL.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer yang sebelumnya telah dilaporkan oleh orang lain diluar peneliti biasanya dalam bentuk bahan bacaan. Data tersebut antara lain:

- a. Dokumen-dokumen dari BKP3 Kabupaten Kediri
- b. Dokumen-dokumen dari dinas pertanian Kabupaten Kediri.
- c. Dokumen-dokumen dari BPP Plemahan.
- d. Data Kependudukan Kabupaten Kediri.
- e. Peraturan Perundang-undangan mengenai Pangan, Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), serta petunjuk pelaksanaan pengembangan program KRPL.
- f. Dokumen pemerintahan Desa Puhjarak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan hal pokok yang dapat mendukung serta menunjang dalam suatu penelitian. Didukung pula oleh pendapat Sugiono (2013: 62) bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini agar memperoleh data yang valid dan relevan antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara atau *interview*

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atau dialog secara langsung dengan informan atau narasumber serta pihak-pihak yang terkait dan berkompeten dalam penelitian ini. Dalam melakukan wawancara, dilakukan dengan wawancara secara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan dengan stakeholder terkait implementasi program KRPL dari tingkat kabupaten hingga desa lokasi penelitian. Pada rumusan yang pertama melakukan wawancara berkaitan tentang implementasi program KRPL yang ada di Desa Puharak dan peran serta sinergitas stakeholder dalam mendukung keberlanjutan implementasi program tersebut. Untuk rumusan yang kedua, melakukan wawancara berkaitan manfaat adanya implementasi program KRPL dilihat dari sisi organisasional, sosial dan ekonomi masyarakat desa tersebut. Sedangkan untuk rumusan yang ketiga, melakukan wawancara yang berkaitan dengan faktor pendukung dan penghambat dalam keberlanjutan program KRPL desa tersebut.

2. Teknik Observasi

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap lingkungan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian serta fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Pengamatan dilakukan dengan melihat keberlanjutan implementasi program KRPL di Desa Puhjarak serta melihat peran dan sinergitas stakeholder dalam mendukung implementasi program tersebut meski tidak semuanya dapat dilihat karena beberapa kejadian sudah terjadi di masa lalu. Kemudian untuk manfaat adanya program ini, peneliti berusaha mengamati keadaan yang ada di desa tersebut. Sedangkan faktor pendukung dan penghambat dalam keberlanjutan implementasi program tersebut, peneliti juga melakukan observasi terhadap keadaan di desa tersebut.

3. Teknik Dokumentasi

Yaitu suatu metode pengumpulan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen dan dapat menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga menghasilkan data yang lengkap. Untuk rumusan masalah yang pertama, peneliti mendapatkan beberapa data dokumen mengenai implementasi program KRPL yang telah dilakukan dan sedang dilakukan di Desa Puhjarak dari BPP Plemahan, sedangkan peran dan sinergitas stakeholder terkait program KRPL berasal dari petunuk pelaksanaan pengembangan KRPL yang diterbitkan oleh BKP Provinsi Jawa Timur. Untuk rumusan yang kedua, mengenai manfaat program ini juga

didapat dari petunjuk pelaksanaan pengembangan KRPL serta data dari profil KRPL Desa Puhjarkit itu sendiri. Begitu pula untuk rumusan yang ketiga, didapat petunjuk pelaksanaan pengembangan KRPL serta dari berbagai sumber lain yang mendukung.

Pada saat melakukan pengumpulan data, dalam satu rumusan masalah tidak semuanya didapat dari tiga teknik yang dijelaskan diatas, tetapi ada beberapa yang hanya didapat dari dokumen yang diperkuat wawancara saja tidak ada observasinya karena ada beberapa kejadian yang sudah dilakukan di masa lalu. Begitu pula sebaliknya, ada beberapa yang hanya berdasarkan wawancara dan observasi saja tidak ada dokumennya. Berdasarkan data yang diperoleh kemudian melakukan triangulasi untuk menentukan legitimasi hasil penelitian. Triangulasi ini dilakukan dengan menyajikan data baik dari dokumen, wawancara maupun observasi kemudian dari berbagai data tersebut ditarik kesimpulannya.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh maupun mengumpulkan data untuk menyelesaikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Seperti dalam bukunya Sugiono (2013: 59) yang menyatakan bahwa kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data merupakan dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil dengan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan berkembang terus (*snowball*) secara bertujuan (*purposive*)

sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Alat pengumpul data dalam metode kualitatif adalah peneliti sendiri. Sehingga peneliti merupakan *key instrument*, maka dari itu dalam pengumpulan data peneliti terjun sendiri kelapangan secara aktif. Hal ini ditegaskan pula oleh Nasution dalam Sugiono (2013: 60-61) yang menyatakan bahwa:

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri

Dalam penelitian kualitatif kedudukan peneliti cukup rumit. Hal ini karena, dia sekaligus merupakan perencana pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya dia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Selain itu dalam penelitian kualitatif diharapkan peneliti senantiasa berhubungan dengan subjeknya. Oleh sebab itulah, peneliti dalam penelitian ini merupakan instrumen yang penting.

2. Pedoman wawancara (*interview guides*)

Pedoman wawancara digunakan untuk mengungkapkan data secara kualitatif. Data kualitatif bersifat lebih luas dan dalam, mengingat data ini

digali oleh peneliti sampai peneliti merasa cukup. Basrowi & Suwandi (2008: 138) dalam bukunya juga memaparkan bahwa:

Pedoman wawancara ini digunakan oleh peneliti sebagai pemandu, hal ini agar:

- a. Proses wawancara berjalan atas rel yang telah ditentukan,
- b. Informan dapat memberi jawaban seperti yang dikehendaki peneliti,
- c. Peneliti tidak terlalu sulit membedakan antara data yang digunakan dan tidak,
- d. Peneliti dapat lebih berkonsentrasi dengan lingkup penelitian yang dilakukan.

3. Catatan Lapangan (*Field notes*)

Menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Basrowi & Suwandi (2008: 178), menyatakan bahwa catatan lapangan merupakan catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.

4. Perangkat penunjang meliputi handphone, alat tulis, buku, dan sebagainya yang digunakan untuk menunjang kegiatan penelitian.

G. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data merupakan jantungnya sedangkan analisis data merupakan jiwanya. Setelah melakukan pengumpulan data, langkah yang perlu ditempuh yakni analisis data. Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data dipergunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Data-data mentah yang telah diperoleh dan

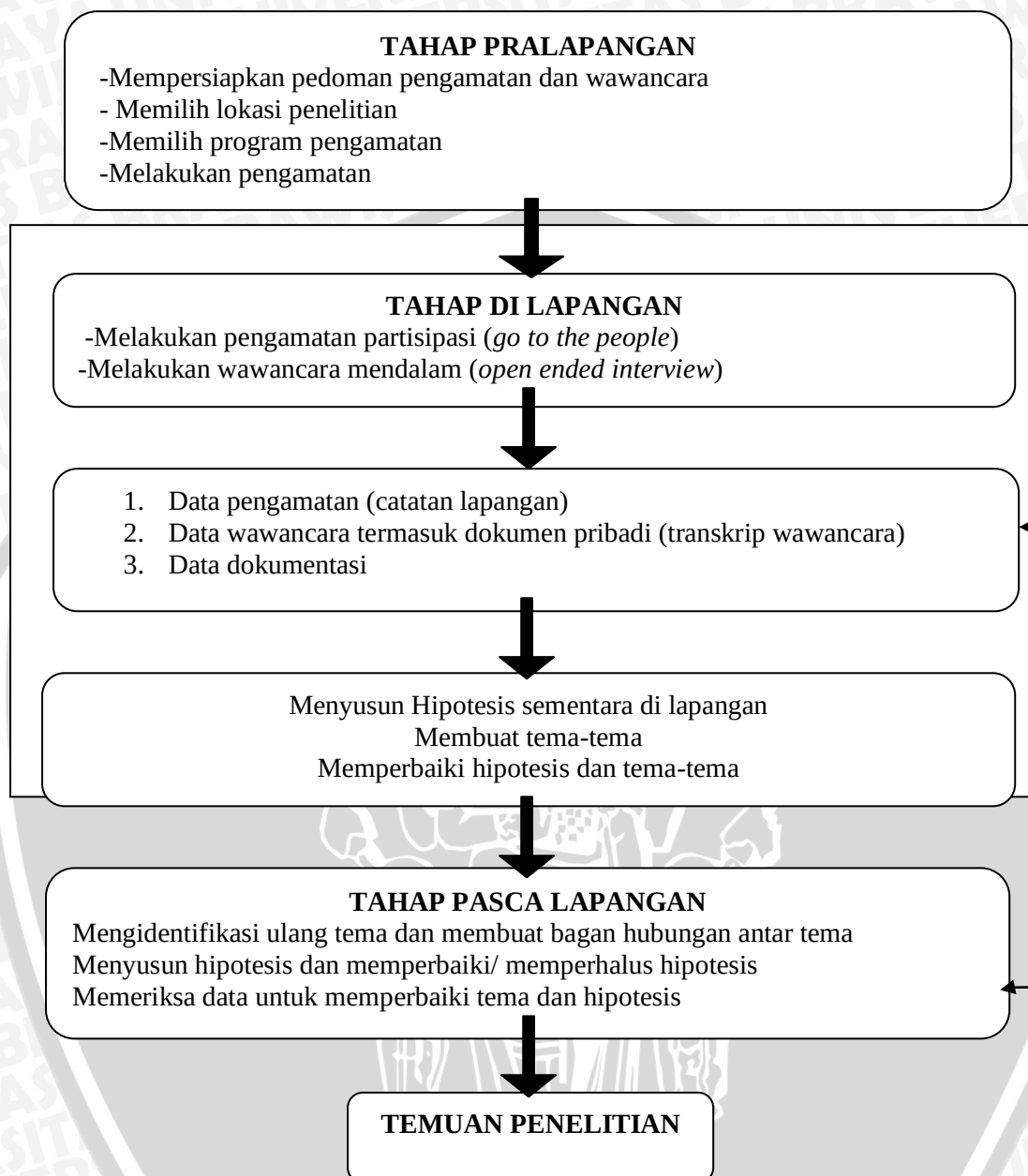
dikumpulkan peneliti tidak akan berguna jika tidak dianalisis. Data mentah yang telah diperoleh dan dikumpulkan perlu dikelompok-kelompokkan kemudian disaring sedemikian rupa sehingga dapat menjawab dan memecahkan masalah.

Analisis data merupakan suatu usaha atau proses dalam memilih, memilah, membuang, menggolongkan data guna menjawab permasalahan pokok sebagai berikut: 1) tema apa yang dapat ditemukan pada data-data ini; 2) seberapa jauh data-data ini dapat menyokong data tersebut. Diuraikan pula secara lebih jelas oleh Trip (1996) sebagai berikut: Analisis data merupakan proses mengurai (memecah) sesuatu kedalam bagian-bagiannya. Terdapat tiga langkah penting dalam analisis data: 1) identifikasi apa yang ada dalam data, 2) melihat pola-pola, dan 3) membuat interpretasi (Basrowi & Suwandi, 2008: 192-193).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menganalisis berdasarkan objek penelitian yang telah disusun sebelumnya sehingga penelitian ini lebih terarah. Selain itu, dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dengan mencatat peristiwa dilapangan berupa catatan lapangan yang dikumpulkan, dipilah dan diklasifikasikan kemudian mencari dan menemukan pola serta hubungan-hubungan dengan membuat temuan-temuan umum. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (1992) dalam Basrowi & Suwandi (2008: 214-226), dimana analisis data tersebut meliputi tiga tahap, yaitu: Tahap pralapangan, tahap di lapangan dan tahap analisis data. Pemilihan analisis data ini karena dalam analisis data ini untuk mencari jawaban dan pemahaman

penelitian melalui metode kualitatif dengan cara pengamatan partisipasi, wawancara terbuka, dan dokumen pribadi. Hal tersebutlah yang akan dilakukan peneliti dalam mencari jawaban dan pemahaman penelitian. Tahapan dalam melakukan penelitian digambarkan dalam bagan dibawah ini:





Sumber: Basrowi & Suwandi (2008: 226)

Bagan 4 Analisis Data yang dikemukakan Bogdan dan Taylor

1) Tahap Pralapangan

Tahap ini meliputi, proses pengamatan awal (*go to people*), mempersiapkan pedoman pengamatan dan pedoman wawancara, pemilihan

lokasi penelitian, pemilihan program pengamatan, dan program wawancara. Dalam kegiatan pralapangan ini berupa pengamatan awal dengan mengunjungi lokasi penelitian di Desa Puhjarak hanya mengamati subjek, lingkungan subjek, tindakan subjek, tanpa melakukan wawancara. Sifat pengamatan awal ini, hanya untuk mendapatkan gambaran global tentang lingkungan fisik, dan sosial subjek penelitian. Selanjutnya mempersiapkan pedoman pengamatan dan pedoman wawancara, baik yang bersifat substantif maupun masalah sosiologi dan teoritis yang lebih luas. Setelah mempersiapkan pedoman pengamatan dan wawancara kemudian memilih lokasi di Desa Puhjarak yang memenuhi syarat substantif maupun sesuai minat peneliti sehingga dapat menentukan program pengamatan secara terbuka yang digunakan dalam penelitian. Setelah memilih model pengamatan, peneliti melakukan pengamatan pendahuluan.

2) Tahap Di Lapangan

Ketika memasuki lapangan, pengamatan dengan ikut berperan serta diharapkan dapat menjalin dengan subjek atas dasar kepercayaan, dan adanya saling tukar informasi yang bebas dan terbuka. Dimana dalam hal ini peneliti dianggap pihak yang netral yang tidak mempunyai persekutuan yang khusus dengan subjek dan tidak mempunyai hubungan diluar lingkungan yang sifatnya dapat merugikan subjek. Pada hari-hari pertama pengamatan, peneliti mengajukan pertanyaan atau melakukan wawancara secara mendalam dengan tujuan agar subjek berbicara tentang apa yang ada dalam pikiran mereka dan yang menjadi perhatian mereka. Disamping itu peneliti juga membuat catatan

lapangan untuk mencatat kejadian-kejadian penting dilapangan. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data-data dokumentasi yang dapat menunjang penelitian. Berdasarkan catatan-catatan lapangan (pengamatan), transkrip wawancara serta dokumentasi, peneliti berusaha menyusun hipotesis sementara dilapangan antara lain: 1) implementasi program KRPL di Desa Puhjarkah terhadap ketahanan pangan di wilayah tersebut; 2) manfaat implementasi terhadap masyarakat desa tersebut; 3) faktor internal dan eksternal dalam mendukung implementasi program tersebut. Sedangkan tema sementara yang dapat ditemukan dalam penelitian dilapangan adalah keberlanjutan implementasi program KRPL; peran *stakeholder* dalam implementasi serta ketahanan pangan ditingkat rumah tangga.

3) Tahap Pasca Lapangan

Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi ulang tema serta membuat bagan hubungan antar tema, menyusun hipotesis dan memperbaiki atau memperhalus hipotesis, kemudian memeriksa data untuk memperbaiki tema dan hipotesis. Setelah mengidentifikasi ulang hipotesis dan tema yang ada maka peneliti memperbaiki hipotesis yaitu: 1) peran dan sinergitas *stakeholders* dalam mendukung keberlanjutan implementasi program KRPL;; 2) faktor pendukung dan penghambat dalam keberlanjutan implementasi program KRPL; 3) Manfaat implementasi program KRPL terhadap ketahanan pangan di desa tersebut. Hingga pada akhirnya memperoleh temuan penelitian.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Wilayah Kabupaten Kediri

a. Kondisi Geografis dan Demografi Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Posisi geografis Kabupaten Kediri, yang terletak di antara $111^{\circ} 47' 05''$ sampai dengan $112^{\circ} 18' 20''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 36' 12''$ sampai dengan $8^{\circ} 0' 32''$ Lintang Selatan Kabupaten Kediri diapit oleh kabupaten 5, yaitu:

- Barat : Tulungagung dan Nganjuk
- Sebelah Utara : Nganjuk dan Jombang
- Timur : Jombang dan Malang
- Selatan : Blitar dan Tulungagung

Kondisi topografi terdiri dari dataran rendah dan pegunungan yang dilalui aliran sungai brantas yang membelah selatan ke utara. Pada tahun 2011 tingkat curah hujan rata-rata sekitar 15,81 mm perhari, lebih rendah dari tahun lalu 16,76 mm perhari. Secara keseluruhan luas wilayah kabupaten Kediri sekitar 138.605 hektar, terdiri dari lahan sawah 47.580 hektar dan lahan non sawah 91.025 hektar. Untuk mengantisipasi luas lahan sawah yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tahun 2012 Pemerintah kabupaten Kediri melakukan ekstensifikasi. Hasilnya, ditahun tersebut luas lahan sawah bertambah



Sumber: <http://www.kedirikab.go.id>

- 1) Regosol coklat kekelabuan seluas 77.397 Ha atau 55,84 %, merupakan jenis tanah yang sebagian besar ada di wilayah kecamatan Kepung, Puncu, ngancar, Plosoklaten, Wates, Gurah, Pare, kandang, kandat, Ringinrejo, Kras, papar, Purwoasri, Pagu, Plemahan, Kunjang dan Gampengrejo
- 2) Aluvial kelabu coklat seluas 28,178 Ha atau 20,33 %, merupakan jenis tanah yang dijumpai di Kecamatan Ngadiluwih, Kras, Semen, Mojo, Grogol, Banyakan, Papar, Tarokan dan Kandangan
- 3) Andosol coklat kuning, regosol coklat kuning, litosol seluas 4.408 Ha atau 3,18 %, dijumpai di daerah ketinggian di atas 1.000 dpl seperti Kecamatan Kandangan, Grogol, Semen dan Mojo.
- 4) Mediteran coklat merah, grumosol kelabu seluas 13.556 Ha atau 9,78 %, terdapat di Kecamatan Mojo, Semen, Grogol, banyakan, tarokan, Plemahan, Pare dan Kunjang.
- 5) Litosol coklat kemerahan seluas 15.066 Ha atau 10.87%, terdapat di kecamatan Semen, Mojo, Grogol, banyakan, tarokan dan kandang (<http://www.kedirikab.go.id>).

Wilayah Kabupaten Kediri diapit oleh dua gunung alam yang berbeda, yaitu Gunung Kelud di timur dan sifat vulkanik Gunung Wilis di sebelah barat non vulkanik, sedangkan tepat di tengah-tengah daerah seberang sungai Brantas Kabupaten Kediri yang terbagi menjadi dua bagian Kediri, bagian barat sungai Brantas: ini berbukit-bukit dan lereng gunung gunung Wilis gunung Klotok, dan bagian timur dari sungai Brantas (<http://www.kedirikab.go.id>).

Berdasarkan proyeksi Sensus penduduk 2010, jumlah penduduk kabupaten Kediri tahun 2011 berjumlah 1.518.121 jiwa, bertambah 9.915 jiwa. Komposisi laki-laki sebanyak 755.959 jiwa dan perempuan 762.162 jiwa, sehingga *sex ratio*-nya turun dari 100,8 menjadi 99,19 (Kediri dalam Angka 2013, 2013). Berikut ini kondisi pemerintahan kabupaten, berupa

jumlah kecamatan, desa/ kelurahan, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) hingga luas daerah kabupaten Kediri perkecamatan:

Tabel 2 Wilayah Administratif Kabupaten Kediri:

NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH RUKUN WARGA (RW)	JUMLAH RUKUN TETANGGA (RT)	LUAS WILAYAH
MOJO	20	87	234	1.027,3
SEMEN	12	162	428	804,2
NGADILUWIH	16	126	364	418,5
KRAS	16	108	377	448,1
RINGINREJO	11	94	319	423,8
KANDAT	12	94	382	519,6
WATES	18	163	683	765,8
NGANCAR	10	87	296	940,5
PLOSOKLATEN	15	105	430	885,9
GURAH	21	129	477	508,3
PUNCU	8	79	315	682,5
KEPUNG	10	90	332	1.056,5
KANDANGAN	12	133	320	416,7
PARE	10	159	480	472,1
BADAS	8	152	382	392,1
KUNJANG	12	104	292	299,8
PLEMAHAN	17	116	404	478,8
PURWOASRI	23	148	425	425,0
PAPAR	17	86	318	362,2
PAGU	13	79	252	246,7
KAYENKIDUL	12	110	321	357,7
GAMPENGREJO	11	47	187	198,9
NGASEM	12	79	376	187,0
BANYAKAN	9	114	323	725,5
GROGOL	9	92	258	345,0
TAROKAN	10	69	290	472,0
KABUPATEN KEDIRI	344	2812	9265	138.605

Sumber: Kabupaten Kediri dalam Angka Tahun 2013 dalam <http://kedirikab.bps.go.id> (Diolah penulis)

Agama yang diakui diakui di NKRI berjumlah 6 agama. Setiap agama memiliki sumber ajaran yang berbeda-beda, baik dalam hal keimanan, ibadah, hukum maupun moral. Untuk mengembalikan moral bangsa, sebagai salah satu cara, perlu kiranya umat beragama dikembalikan ke tempat ibadahnya masing-masing. Tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2012 jumlah pemeluk agama islam masih tetap mayoritas yakni 97 persen dari total penduduk kabupaten Kediri. Jumlah pemeluk tersedikit adalah pemeluk agama Budha, yakni hanya 0,02 persen.

b. Visi-Misi Kabupaten Kediri

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, Mandiri, Tenteram dan Sejahtera yang Berbasis pada Lima Sektor Utama Pembangunan, yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Industri-Perdagangan dan Pariwisata, yang Didukung oleh Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional”

Misi:

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2011 – 2015 sebagai berikut:

1. Melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai wujud peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta terwujudnya keluarga sehat.
3. Menumbuh-kembangkan aktivitas pendidikan formal, non-formal dan informal untuk meningkatkan sumber daya generasi muda sebagai upaya mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pola hidup sehat sebagai langkah nyata menuju keluarga sejahtera.
5. Membangun kehidupan masyarakat yang tertata, taat hukum dan peraturan perundangan, saling menghargai satu sama lain sebagai dasar

pemahaman atas hak asasi manusia, gotong-royong, dan toleran, dalam rangka menciptakan suasana aman, tertib dan damai di masyarakat.

6. Mengembangkan industri dan perdagangan berbasis pertanian yang berorientasi pada mekanisme pasar bersama Koperasi dan UKM.
7. Menggalakkan promosi di sektor pariwisata, produk-produk home-industry, pertanian, perkebunan, perikanan di tingkat regional, nasional dan global.
8. Menciptakan susana kondusif sehingga membuat kehidupan masyarakat menjadi tenteram.
9. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN, transparan, akuntabel, responsif terhadap permasalahan masyarakat sebagai upaya meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat (www.kedirikab.go.id).

2. Profil Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3)

Kabupaten Kediri

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) kabupaten Kediri beralamat di Jalan penanggungan Kediri. Dasar Pembentukan BKP3 antara lain:

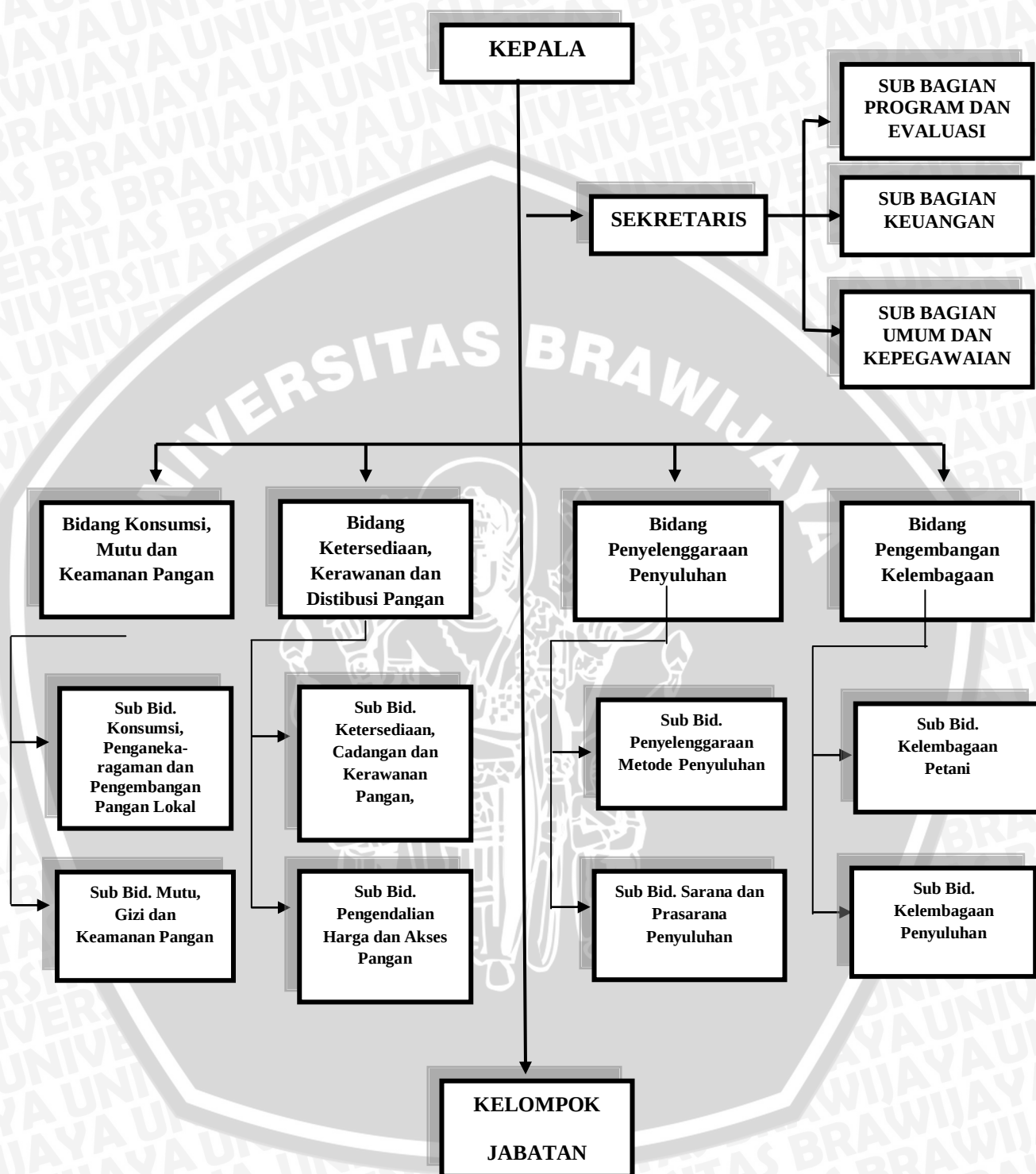
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kediri.
- b. Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kediri.

a. Visi dan misi dari BKP3 antara lain:

- Visi : Memantapkan Ketahanan Pangan dengan Penyuluhan
- Misi : 1) Memantapkan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan dan distribusi pangan yang berkelanjutan
2) Meningkatkan kualitas pola konsumsi, mutu dan keamanan pangan masyarakat

- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan melalui pengembangan dan penerapan metodologi dan sarana prasarana penyuluhan
- 4) Meningkatkan keberdayaan kelembagaan petani dan pelaku usaha di bidang pertanian yang tangguh didukung kapasitas penyuluh yang profesional
- 5) Optimalisasi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan untuk mewujudkan profesionalisme lembaga Ketahanan Pangan dan Penyuluhan beserta aparturnya.

BKP3 Kabupaten Kediri dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, empat Kepala Bidang, dan kelompok Pejabat Fungsional seperti dapat dilihat pada Bagan 6. Struktur organisasi tersebut telah sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BKP3 Kabupaten Kediri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.



Sumber: Profil BKP3 Kabupaten Kediri, 2013

Bagan 6 Struktur organisasi BKP3 Kabupaten Kediri

b. Tugas Pokok dan Fungsi BKP3 Kabupaten Kediri antara lain:

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 30 Tahun 2008 dan Keputusan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2008, BKP3 Kabupaten Kediri mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas – tugas tersebut, BKP3 Kabupaten Kediri mempunyai fungsi – fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas dan fungsi dari setiap pejabat struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan, mempunyai tugas :

Melaksanakan ketahanan pangan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, serta pembinaan dan pengendalian Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Inspektur mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan ketahanan pangan;

- 2) Perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris, mempunyai tugas :

Membantu Kepala Badan dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan bidang, membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan sarana prasarana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rancangan kebijakan Badan;
- b) Penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Badan;
- c) Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi kepegawaian, keuangan dan sarana prasarana ;
- d) Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang – bidang ;
- e) Pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;

- f) Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan ;
- g) pelaksanaan analisa jabatan dan beban kerja ;
- h) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis Badan;
- i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Program dan Evaluasi, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Badan.

Untuk melaksanakan tugas- tugas tersebut Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a) penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan dan pelaporan Badan;
- b) penyusunan perencanaan program ;
- c) penyusunan profil Badan ;
- d) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang – bidang ;
- e) penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ;
- f) penyiapan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;

- g) monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Badan;
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas- tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian

Keuangan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), belanja tidak langsung dan belanja langsung ;
- b) Penyiapan bahan pembayaran gaji pegawai dan tunjangan lainnya ;
- c) Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan dan capaian kinerja keuangan;
- d) Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan keuangan ;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, sarana prasarana, dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas - tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan kegiatan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, dan sarana prasarana ;

- b) pengelolaan administrasi perkantoran rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, dan sarana prasarana ;
- c) penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian barang di lingkungan dinas;
- d) pengelolaan, pengamanan dan perawatan barang/ peralatan inventaris serta gedung;
- e) pengelolaan inventaris barang/peralatan serta pemeriksaan barang secara berkala;
- f) penyiapan bahan pelaksanaan keprotokolan, dan pengurusan administrasi perjalanan dinas;
- g) penyiapan bahan pelaporan inventarisasi barang dan gedung;
- h) penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan pegawai;
- i) penyiapan bahan penilaian angka kredit pejabat fungsional;
- j) penyiapan bahan pembinaan administrasi disiplin pegawai;
- k) penyiapan bahan analisa jabatan dan beban kerja;
- l) penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan kepegawaian;
- m) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Kepala Bidang Konsumsi, Mutu, dan Keamanan Pangan mempunyai tugas:

Melaksanakan koordinasi, identifikasi, analisis dan penyelenggaraan bimbingan dan pengkajian terhadap konsumsi, penganekaragaman pangan, pengembangan pangan lokal, mutu, gizi dan keamanan pangan.

Untuk melaksanakan tugas- tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Konsumsi, Mutu, dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang konsumsi, penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal, mutu, gizi dan keamanan pangan ;
- b) Perencanaan teknis dibidang konsumsi, penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal, mutu, gizi dan keamanan pangan ;
- c) Pelaksanaan koordinasi, identifikasi, analisis dan penyelenggaraan bimbingan dan pengkajian dibidang konsumsi, penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal, mutu, gizi dan keamanan pangan ;
- d) Pelaksanaan identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat ;
- e) Pelaksanaan pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal ;
- f) Pelaksanaan pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan ;
- g) Pelaksanaan identifikasi pangan pokok masyarakat ;
- h) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibatnya menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;

- i) Pelaksanaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat ;
- j) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat ;
- k) Pelaksanaan analisis mutu gizi dan keamanan produk pangan masyarakat ;
- l) Pelaksanaan analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat;
- m) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga ;
- n) Pelaksanaan standar Batas Minimum Residu (BMR) wilayah Kediri ;
- o) Pelaksanaan pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah Kabupaten Kediri ;
- p) Pelaksanaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan Kabupaten Kediri ;
- q) Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima Wilayah Kabupaten Kediri;
- r) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang konsumsi, penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal, mutu, gizi dan keamanan pangan;
- s) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Konsumsi, Mutu, dan Keamanan Pangan dibantu Sub Bidang Konsumsi, Penganeka ragam dan Pengembangan Pangan Lokal dan

Sub Bidang Mutu, Gizi dan Keamanan Pangan, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

▪ **Sub Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan**

Lokal mempunyai tugas melakukan koordinasi, identifikasi dan penyelenggaraan bimbingan terhadap konsumsi, penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas- tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Sub Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan Lokal mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang konsumsi, penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal, mutu, gizi dan keamanan pangan ;
- b) Penyiapan bahan perencanaan teknis dibidang konsumsi, penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal, mutu, gizi dan keamanan pangan ;
- c) Penyiapan bahan identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat ;
- d) Penyiapan bahan pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal ;
- e) Penyiapan bahan pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan ;
- f) Penyiapan bahan identifikasi dan implementasi pangan pokok masyarakat ;

- g) Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan konsumsi, penganekaragaman dan pengembangan pangan lokal ;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi, Mutu, dan Keamanan Pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- **Sub Bidang Mutu, Gizi dan Keamanan Pangan** mempunyai tugas melakukan kordinasi, pengkajian dan penyelenggaraan bimbingan terhadap mutu, gizi dan keamanan pangan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas- tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Mutu, Gizi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang konsumsi, penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal, mutu, gizi dan keamanan pangan ;
- b) Penyiapan bahan perencanaan teknis dibidang konsumsi, penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal, mutu, gizi dan keamanan pangan ;
- c) Penyiapan bahan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan ;
- d) Penyiapan bahan peningkatan mutu konsumsi masyarakat;
- e) Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat ;
- f) Penyiapan bahan analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan ;
- g) Penyiapan bahan analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat ;

- h) Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga ;
- i) Penyiapan bahan penerapan standar BMR wilayah kabupaten ;
- j) Penyiapan bahan pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kabupaten ;
- k) Penyiapan bahan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten ;
- l) Penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten ;
- m) Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan mutu, gizi dan keamanan pangan ;
- n) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi, Mutu, dan Keamanan Pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan, dan Distribusi Pangan mempunyai tugas:

Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, identifikasi dan merumuskan dalam hal ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan dan pengendalian harga bahan pangan dan akses pangan dengan harga dinas/instansi terkait.

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan, dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang ketersediaan, kerawanan, dan distribusi pangan ;

- b) Perencanaan teknis dibidang ketersediaan, kerawanan, dan distribusi pangan ;
- c) Pelaksanaan penyelenggaraan ketersediaan, kerawanan, dan distribusi pangan;
- d) Pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian harga dan akses pangan ;
- e) Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan ;
- f) Pelaksanaan identifikasi cadangan pangan masyarakat ;
- g) Pelaksanaan pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten;
- h) Pelaksanaan pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat ;
- i) Pelaksanaan penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten;
- j) Pelaksanaan identifikasi kelompok rawan pangan ;
- k) Pelaksanaan pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kabupaten;
- l) Pelaksanaan identifikasi infrastruktur distribusi pangan Kabupaten Kediri ;
- m) Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan ;
- n) Pelaksanaan informasi harga di kabupaten ;
- o) Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kabupaten ;

- p) Pelaksanaan pengembangan “*trust fund*” di kabupaten ;
- q) Pelaksanaan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten ;
- r) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ketersediaan, kerawanan, dan distribusi pangan ;
- s) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Bidang Ketersediaan, Kerawanan, dan Distribusi Pangan dibantu Sub Bidang Ketersediaan, Cadangan dan Kerawanan Pangan dan Sub Bidang Pengendalian Harga dan Akses Pangan, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- **Sub Bidang Ketersediaan, Cadangan dan Kerawanan Pangan** mempunyai tugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, identifikasi dan merumuskan dalam hal ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan dengan dinas/instansi terkait.

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Ketersediaan, Cadangan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang ketersediaan, kerawanan, dan distribusi pangan ;
- b) Penyiapan bahan perencanaan teknis dibidang ketersediaan, kerawanan, dan distribusi pangan ;
- c) Penyiapan bahan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan;
- d) Penyiapan bahan Identifikasi cadangan pangan masyarakat ;

- e) Penyiapan bahan pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten ;
- f) Penyiapan bahan pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
- g) Penyiapan bahan penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten ;
- h) Penyiapan bahan identifikasi kelompok rawan pangan ;
- i) Penyiapan bahan identifikasi infrastruktur distribusi pangan kabupaten;
- j) Penyiapan bahan pengembangan infrastruktur distribusi pangan kabupaten ;
- k) Penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kabupaten;
- l) Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan ;
- m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan, dan Distribusi Pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- **Sub Bidang Pengendalian Harga dan Akses Pangan** mempunyai tugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan merumuskan dalam hal pengendalian harga bahan pangan dan akses pangan masyarakat dengan dinas/instansi terkait.

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Pengendalian Harga dan Akses Pangan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang ketersediaan, kerawanan, dan distribusi pangan ;
- b) Penyiapan bahan perencanaan teknis dibidang ketersediaan, kerawanan, dan distribusi pangan ;
- c) Penyiapan bahan infrastruktur distribusi pangan Kabupaten Kediri ;
- d) Penyiapan bahan pengembangan infrastruktur distribusi pangan Kabupaten Kediri ;
- e) Penyiapan bahan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan ;
- f) Penyiapan bahan informasi harga di kabupaten ;
- g) Penyiapan bahan pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kabupaten ;
- h) Penyiapan bahan pengembangan “trust fund” di kabupaten ;
- i) Penyiapan bahan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten;
- j) Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian harga dan akses pangan ;
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan, dan Distribusi Pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas:

Melaksanakan koordinasi, integritas, dan sinkronisasi dalam bidang penyelenggaraan penyuluhan maupun dengan bidang lainnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan penyuluhan ;
- b) Perencanaan teknis dibidang penyelenggaraan penyuluhan ;
- c) Penyelenggaraan Metode Penyuluhan ;
- d) Penyelenggaraan sarana dan prasarana penyuluhan ;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan ;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan dibantu Sub Bidang Penyelenggaraan Metode Penyuluhan dan Sub Bidang Sarana dan Pasarana Penyuluhan, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- ◆ **Sub Bidang Penyelenggaraan Metode Penyuluhan** mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan penerapan metode penyuluhan dan tata penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Metode Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan penyuluhan ;
- b) Penyiapan bahan perencanaan teknis dibidang penyelenggaraan penyuluhan ;

- c) Penyiapan bahan penyelenggaraan pelatihan / kursus bagi petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan lembaga petani lainnya ;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertanian ;
- e) Penyiapan bahan penyelenggaraan magang bagi petani, kelompok tani, gapoktan, KTNA dan lembaga petani lainnya ;
- f) Penyiapan bahan penyelenggaraan temu lapang (Farm Field Day) ;
- g) Penyiapan bahan penyelenggaraan studi banding bagi penyuluh, petani, kelompok tani, gapoktan, KTNA dan lembaga petani lainnya;
- h) Penyiapan bahan penyelenggaraan Temu Usaha antara petani, kelompok tani, gapoktan, KTNA dan lembaga petani lainnya dengan pihak lain;
- i) Penyiapan bahan penyelenggaraan temu wicara petani, kelompok tani, gapoktan, KTNA dan lembaga petani lainnya dengan pihak lain;
- j) Penyiapan bahan penyelenggaraan pameran dalam rangka penyuluhan pertanian;
- k) Penyiapan bahan penyelenggaraan pertunjukan dalam rangka penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan;
- l) Penyiapan bahan penyelenggaraan ceramah materi penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan;
- m) Penyiapan bahan penyelenggaraan sayembara bidang di penyuluhan pertanian ;

- n) Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan metode penyuluhan ;
- o) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

♦ **Sub Bidang Sarana dan Pasarana Penyuluhan** mempunyai tugas melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi dan menyelenggarakan kegiatan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertanian dan kegiatan pengelolaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Sarana dan Pasarana Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan penyuluhan ;
- b) Penyiapan bahan perencanaan teknis dibidang penyelenggaraan penyuluhan ;
- c) Penyiapan bahan identifikasi dan pengiriman penyuluh dan petani untuk mengikuti pelatihan / kursus di lembaga lain;
- d) Penyiapan bahan penyelenggaraan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan penerapan hasil pengkajian (demplot, demfarm dan dem area);

- f) Penyiapan bahan pemasyarakatan / pelayanan teknis hasil pengkajian dan penerapan inovasi pertanian spesifik lokasi;
- g) Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi intensifikasi pertanian ;
- h) Penyiapan bahan pendampingan dalam penyediaan dan monitoring penerapan sarana usaha tani dalam menyusun Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ;
- i) Penyiapan bahan verifikasi materi penyuluhan pertanian perikanan kehutanan dari penyuluh swasta dan swadaya;
- j) Penyiapan bahan pengelolaan materi penyuluhan (mendapatkan / menghimpun, mengolah, mengemas dan menyebarkan inovasi teknologi);
- k) Penyiapan bahan pengelolaan perpustakaan;
- l) Penyiapan bahan pelayanan dan pengembangan teknologi informasi penyuluhan;
- m) Penyiapan bahan pengelolaan multi media untuk penyiapan materi penyuluhan ;
- n) Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana dan pasarana penyuluhan;
- o) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani dan Penyuluhan

mempunyai tugas:

Melaksanakan pengembangan kelembagaan petani dan penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan kelembagaan ;
- b) Perencanaan teknis dibidang pengembangan kelembagaan ;
- c) Pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelompok tani serta gabungan kelompok tani ;
- d) Pelaksanaan pelatihan petani dalam penyelenggaraan penyuluhan ;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan kelembagaan ;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dibantu Sub Bidang Kelembagaan Petani dan Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

♦ **Sub Bidang Kelembagaan Petani** mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kelembagaan petani.

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Kelembagaan Petani mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan kelembagaan ;

- b) Penyiapan bahan perencanaan teknis dibidang pengembangan kelembagaan ;
- c) Penyiapan bahan penumbuhkembangkan dan registrasi kelompok tani, gapoktan, KTNA dan lembaga petani lainnya ;
- d) Penyiapan bahan pembinaan kelompok tani, KTNA dan lembaga petani lainnya;
- e) Penyiapan bahan penilaian atas prestasi petani, kelompok tani, gapoktan, dan lembaga petani lainnya
- f) Penyiapan bahan pembinaan kemitraan antara kelompok tani, gapoktan, KTNA dan lembaga petani lainnya ;
- g) Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kelembagaan petani ;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

♦ **Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan** mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kelembagaan penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan kelembagaan ;
- b) Penyiapan bahan perencanaan teknis dibidang pengembangan kelembagaan ;

- c) Penyiapan bahan pembinaan Penyuluh PNS, Tenaga Harian Lepas / Tenaga Bantu penyuluh Pertanian, Penyuluh swadaya dan swasta;
- d) Penyiapan bahan pembinaan pengelolaan balai penyuluhan;
- e) Penyiapan bahan pembinaan penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
- f) Penyiapan bahan supervisi, monitoring dan evaluasi Penyuluh Pertanian;
- g) Penyiapan bahan pembinaan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Balai Penyuluhan dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian (RKPP);
- h) Penyiapan bahan penilaian Penyuluh berprestasi ;
- i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kelembagaan penyuluhan ;
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Profil Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Plemahan

Badan penyuluhan pertanian (BPP) plemahan terletak di jalan Merak No. 4 Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. Visi dan misi BPP plemahan antara lain:

Visi: Meningkatkan sumber daya manusia pertanian guna mendorong peningkatan produktifitas usaha tani menuju ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan keluarga petani yang mengacu program pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Misi:

- 1) Menumbuhkembangkan kegiatan kelembagaan usaha ditingkat petani dan kelompok tani.
- 2) Mengembangkan penyuluhan dengan konsep terpadu, efisiensi dan peningkatan produktifitas secara berkelanjutan.
- 3) Mengembangkan produk unggulan berbasis sumber daya lokal dan membangun jejaring usaha antara pelaku utama dan pelaku usaha.

a. Kelembagaan BPP Kecamatan Plemahan:

1. Perangkat BPP

Tabel 3 Perangkat Kelembagaan BPP Kec. Plemahan

No	NAMA	DINAS	JABATAN
1.	Wanoto, SP	BKP3	Koordinator BPP plemahan & Koord. P2KP kab. Kediri
2.	Moch. Soleh, SP	BKP3	PPL-PNS
3.	Suyitno, SP	BKP3	PPL-PNS
4.	Mulyono, AMd	BKP3	PPL-PNS
5.	Agus Supramono	BKP3	PPL-THLTBPP

No	NAMA	DINAS	JABATAN
6.	Ir. Marliah	BKP3	PPL-THLTBPP
7.	Ir. Karno	BKP3	PPL-THLTBPP
8.	Safe Indra S, SP	Dinas Pertanian	Mantri Pertanian
9.	Sawung Kuncoro	Hutbunling	Mantri Perkebunan
10.	M. Taufik	Disnakan	Mantri Pet & Perkebunan
11.	Mujib, SP	Dinas Pertanian	Pengamat Hama& penyakit

Sumber: Profil BPP Kec. Plemahan, 2012: 1

b. Kegiatan BPP Kecamatan Plemahan

1. Penyuluhan

a) Jumlah Kelompok Tani

Tabel 4 Jumlah Kelompok Tani di Kecamatan Plemahan

No	Kelompok Tani	Jumlah Kelompok	Keterangan
1.	Kelompok tani	75	Pria
2.	Kelompok wanita tani	16	Wanita
3.	Taruna tani	2	Pria&Wanita
4.	Kelompok P2KP	2	Wanita
5.	Kelompok ternak ikan	1	Pria&Wanita
6.	Gapoktan	17	Pria&wanita
	Jumlah	113	

Sumber: Profil BPP Plemahan, 2012: 2

b) Pembinaan Kelompok Tani dengan Pertemuan Rutin

Tabel 5 Pembinaan kelompok Tani di Kecamatan Plemahan

No	Kelompok Tani	Jumlah kelompok	Jml Kelompok pertemuan rutin	Prosen tase	Keterangan
1.	Kelompok Tani	75	57	75	Setiap bulan

No	Kelompok Tani	Jumlah kelompok	Jml Kelompok pertemuan rutin	Prosen tase	Keterangan
	(pria)				
2.	Kelompok wanita tani	16	13	80	Setiap bulan
3.	Taruna tani	2	2	100	Setiap bulan
4.	P2KP	2	2	100	Setiap bulan
5.	Kelompok ternak tani	1	1	100	Setiap bulan
6.	Gapoktan	17	17	100	Setiap 2 bulan
		113	92	81,4%	

Sumber: Profil BPP Plemahan, 2012: 2

Pertemuan dilakukan secara berkala/rutin pada tiap kelompok tani maupun kelompok wanita tani berdasar kesepakatan baik bulanan atau selapanan (tiap bulan bersangkutan).

c) Pertemuan Gapoktan

Pertemuan Gapoktan dilakukan ditiap-tiap Gapoktan Desa secara berkala yang dihadiri oleh pengurus kelompok tani pada desa bersangkutan guna membahas kegiatan pengembangan usaha kelompok tani.

d) Temu Teknis KTNA

Temu teknis KTNA dilakukan secara rutin tiap bulan, untuk memberikan informasi program pertanian serta hasil kegiatan teknologi terbaru hasil kajian maupun dari petani, BPP, BPTP maupun pihak swasta. Temu teknis KTNA dihadiri oleh seluruh pengurus kelompok tani se-kecamatan Plemahan, pihak swasta serta Muspika.

2. Pengembangan Teknologi

a) Kaji terap

Kaji terap dilakukan untuk melakukan uji kesesuaian komoditas berdasar lokalitas terhadap hasil teknologi dari pihak swasta maupun BPTP yang nantinya dapat disebarakan kepada petani.

b) Agen Hayati

Kegiatan pengembangan agen hayati dimaksudkan untuk mendukung pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan dan sebagai sarana belajar bagi kelompok tani dan anggota kelompok tani di Kecamatan Plemahan maupun luar Kecamatan Plemahan.

c) Bengkel Alsintan

Bengkel alsintan dilakukan di kelompok tani sebet Jaya Desa Sebet Kecamatan Plemahan yang digunakan untuk rekayasa teknologi alsintan dibawah bimbingan BPP Kecamatan Plemahan, dengan kegiatan pembuatan Alat pengolah pupuk organik granul, Chopper (alat pengolah pakan ternak) dan alat pengolah hasil.

3. Penumbuhan Ekonomi Rakyat

Penumbuhan ekonomi kerakyatan dilakukan melalui pembentukan kelembagaan ekonomi mikro dengan mempertimbangkan potensi lokal baik bentuk kelompok usaha bersama (KUB), asosiasi dan koperasi.

4. Konseling Klinik Konsultasi Agribisnis

Konseling dilakukan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha yang memerlukan informasi, bimbingan teknis, pelatihan maupun pendampingan.

Kegiatan ini dilakukan oleh klinik konsumtasi agribisnis (KAA) BPP Kecamatan Plemahan.

5. Teknologi Olahan Pangan

Teknologi olahan pangan dititikberatkan pada pemberdayaan kelompok wanita tani, untuk dapat melakukan diversifikasi olahan pangan berbasis potensi lokal. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan gizi masyarakat juga meningkatkan pendapatan keluarga bagi pelaku utama (keluarga tani) dan mendorong tumbuhnya usaha kecil menengah (UKM) dengan jenis usaha spesifik lokasi.

6. Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani

Peningkatan kapasitas kelompok tani ini dilakukan dengan:

- a) Program yang mendukung peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura
- b) Program yang mendukung kegiatan peternakan dan perikanan
- c) Program pemberdayaan petani melalui teknologi dan informasi pertanian (FEATI)
- d) Program Percepatan dan penganeekaragaman konsumsi pangan (P2KP)
- e) Program Pelatihan Pengolahan Pangan
- f) Program Kawasan Rumah Pangan Lestari

4. Profil Desa Puhjarak

a. Pemerintahan Desa Puhjarak

Puhjarak adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, di Desa Puhjarak mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Puhjarak dibagi menjadi delapan dusun, yakni Dusun Puhjarak, Dusun Babatan, Dusun Recosolo, Dusun Genukrejo, Dusun Tempursari, Dusun Gebyaran, Dusun Puhrejo, dan Dusun Supiturang. Dari ke delapan pembagian tersebut, masing-masing dusun memiliki sejarah yang berbeda. Desa Puhjarak merupakan salah satu dari 17 desa di wilayah Kecamatan Plemahan yang terletak 3 km ke arah timur dari ibu kota Kecamatan. Iklim Desa Puhjarak sebagaimana desa lain di Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Puhjarak, Kecamatan Plemahan. Desa Puhjarak mempunyai luas wilayah seluas 419.845 hektar, adapun batas-batas wilayah Desa Puhjarak :

1. Sebelah Utara Desa Sidowarek dan Desa Sebet
2. Sebelah Selatan Desa Tegowangi dan Desa Mejono
3. Sebelah Timur Desa Sekoto
4. Sebelah Barat Desa Payaman

Desa Puhjarak terdiri dari 8 dusun dengan jumlah penduduk 4925 jiwa atau 1648 KK. Keadaan penduduk Desa Puhjarak berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Table 2. Dari Tabel 2 diketahui bahwa

jumlah penduduk laki-laki di Desa Puhjarak lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Penduduk Desa Puhjarak berjumlah 4.925 orang, 49,27% terdiri atas penduduk laki-laki dan 50,73% terdiri atas penduduk perempuan.

Tabel 6 Jumlah Penduduk Desa Puhjarak Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	2.448	49,27
2.	Perempuan	2.477	50,73
Jumlah		4.925	100,00

Sumber : Data Monografi Desa Puhjarak, 2013



B. PENYAJIAN DATA FOKUS PENELITIAN

1. Peran dan Sinergitas *stakeholder* dalam mendukung keberlanjutan

Implementasi program KRPL di Desa Puhjarak:

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan konsep penumbuhan serta pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga secara diversifikasi yang berbasis sumber daya lokal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan dalam satu kawasan. KRPL sebenarnya bukan merupakan hal baru dalam masyarakat, karena menanam dalam skala terbatas (dalam Pot) dan banyak jenis tanaman sudah lama dijalankan oleh masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Hanya saja pola serta sistem pengerjaannya masih dilaksanakan secara individu rumah tangga dan belum mempertimbangkan aspek pemenuhan pangan dan gizi keluarga serta keberlanjutannya (BPTP JATIM, 2012: 1).

a. Implementasi program KRPL di Desa Puhjarak

Makna dari implementasi kebijakan yaitu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dimulai dari program, kemudian proyek dan ke kegiatan (Nugroho, Riant, 2012: 674-675).

Implementasi kebijakan publik KRPL ini berupa program yang kemudian dijalankan oleh pihak-pihak terkait. Program KRPL

merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI pada acara konferensi Dewan Ketahanan Pangan pada bulan Oktober 2010 di Jakarta mengenai ketahanan dan kemandirian pangan nasional yang harus dimulai dari rumah tangga. Berkaitan dengan hal tersebut, maka munculah program KRPL ini sebagai upaya pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan rumah tangga sebagai salah satu alternatif guna mewujudkan ketahanan maupun kemandirian pangan ditingkat rumah tangga. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Karno selaku PPL Desa Puhjarak dalam kutipan wawancaranya menyatakan bahwa:

“KRPL maknanya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan disekitar rumah untuk pemenuhan gizi keluarga” (Wawancara dengan Bapak Karno PPL BPP Plemahan Pada 7 Maret 2014 Pukul 11.13 WIB).

Konsep ketahanan pangan selalu identik dengan ukuran kemandirian pangan. Kemandirian pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan (nasional/kawasan) secara mandiri dengan memberdayakan modal manusia, sosial dan ekonomi (termasuk lahan pekarangan dan pertanian serta sekitarnya) yang dimiliki, dan berdampak kepada peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat/petani. Kemandirian pangan hanya dapat terwujud jika pembangunannya/penumbuhannya dilaksanakan atas dasar prakarsa (partisipatif aktif) masyarakatnya sendiri sebagai

bentuk kesadaran untuk membangun ketahanan pangan yang andal (BPTP JATIM, 2012: 1).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka program KRPL ini dinilai sangat tepat untuk mendukung ketahanan pangan. Terlebih lagi, KRPL ini difokuskan dari skala rumah tangga terlebih dahulu. Hal ini karena rumah tangga sebagai bentuk masyarakat terkecil, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Rumah tangga sangat strategis sebagai sasaran dalam setiap upaya peningkatan kemandirian pangan hingga tingkat nasional. Pada tahap implementasinya agar KRPL dapat berjalan baik dan lancar di lapangan maka perlu direncanakan dan dilakukan secara partisipatif, disosialisasikan secara informatif dan komunikatif, dan didukung secara terintegratif dan komprehensif. Hal ini dipertegas pula oleh Bapak Junadi dari BKP3 bahwa:

“KRPL itu program keterpaduan artinya harus ada kerjasama atau koordinasi antar satker/ dinas-dinas terkait sehingga secara lestari program KRPL ini bisa berjalan” (Wawancara dengan Bapak Juanedi di BKP3 Kab. Kediri pada 19 Maret 2014 Pukul 13.29 WIB).

Pada awal pelaksanaan KRPL di Jawa Timur di tahun 2012, berdasarkan data yang dihimpun oleh BPTP Jatim (2012: 32), perkembangan KRPL di Jawa Timur menunjukkan persentase kenaikan yang sangat spektakuler setelah program tersebut diimplementasikan. Dalam waktu enam bulan, perkembangan dan penumbuhan Rumah pangan Lestari (RPL) naik 205,5% dalam skala tingkat provinsi dan kalau ditingkat kabupaten/kota rata-rata

kenaikannya 8,56%. Perkembangan tersebut menunjukkan sinyal yang positif bahwa program KRPL dapat diterima oleh masyarakat.

Terdapat lima faktor yang menyebabkan program KRPL tumbuh dengan baik di Jawa Timur antara lain: program ini muncul secara “*top-down*”, mendapat dukungan secara terstruktur dari *stakeholders* terkait baik dari sarana dan pembiayaan, merupakan cara baru pemenuhan gizi keluarga dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang sempit disekitar rumah/pekarangan, adanya pengawasan dari petugas secara intensif, pelaku sasaran adalah para ibu rumah tangga di pedesaan/perkotaan (BPTP JATIM, 2013: 32).

Tahapan implementasi kegiatan KRPL dilakukan dalam tiga tahap. Setiap tahap dilaksanakan dalam satu tahun antara lain sebagai berikut :

1. Tahap persiapan dan pertumbuhan (tahun Pertama)

- a) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat khususnya ibu-ibu yang tergabung dalam tim penggerak PKK Desa dan Dasawisma dalam mengelola dan mengembangkan usaha/Kegiatannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Proses pemberdayaan dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran ibu-ibu tim penggerak PKK Desa dan Dasa Wisma dalam mengembangkan usahanya secara partisipatif. Ruang lingkup pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- Sosialisasi pengembangan kawasan rumah pangan lestari mencakup aspek: kerangka pikir, strategi pengembangan, tujuan dan sasaran dan output yang diharapkan.
- Pemberian stimulant, pemberian stimulant ini dimaksudkan untuk mendukung rencana pengembangan usaha kelompok (tim penggerak PKK). Sedangkan motor penggerak utama usaha adalah kemauan dan kemampuan kelompok (Tim penggerak PKK) itu sendiri.

- Pemanfaatan stimulant tersebut disesuaikan dengan besarnya dana kondisi agroekosistem, keinginan/kemauan usaha yang dituangkan dalam proposal/RUKRUB.
 - Pemanfaatan stimulan tersebut hanya boleh digunakan untuk usaha bidang pertanian secara terpadu (tanaman pangan, ternak unggas dan ikan).
 - Dalam rangka pengembangan kelembagaan, manajemen, dan usaha kelompok difasilitasi dengan kegiatan pembinaan, pelatihan, telaah lapangan, pendampingan, serta kemitraan dengan swasta.
- b) Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan

Ruang lingkup kegiatan yang dilakukan meliputi:

- Pengembangan kebun bibit desa
Setiap desa yang mengembangkan kawasan rumah pangan lestari harus mempunyai kebun bibit desa. Pengembangan kebun bibit desa ini bertujuan agar kebutuhan bibit desa dan setiap anggota masyarakat yang ada di desa tersebut dapat dipenuhi dengan mudah di desa itu sendiri.
- Pengembangan intensifikasi pekarangan
Semua pekarangan rumah masyarakat, lahan-lahan kosong milik desa dan kanan kiri jalan desa diharapkan dapat dikembangkan usaha pertanian yang dapat menjadi sumber bahan pangan bagi keluarga.
- Pemanfaatan hasil pekarangan
Pemanfaatan hasil pekarangan tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu:
 - dikonsumsi: hasil pekarangan tersebut dapat dikonsumsi langsung sebagai sumber pangan keluarga. Diolah menjadi pangan olahan, hasilnya bisa dijual atau disumbangkan ke posyandu sebagai makanan tambahan anak dan balita dan atau makanan pendamping ASI.
 - Dijual Segar: terlebih dahulu dilakukan sortasi dan memanfaatkan KOPWAN sebagai unit lembaga pemasaran bersama.

2. Tahap pengembangan dan pemanfaatan (tahun Kedua)

Penguatan Kelembagaan Usaha:

Koperasi wanita yang semula sebagai lembaga keuangan desa (menangani simpan pinjam) akan ditingkatkan fungsinya menjadi unit usaha yang menangani: permodalan, agroinput dan unit pemasaran bersama.

3. Tahap kemandirian (tahun Ketiga)

Pada tahap ini pemerintahan provinsi tidak lagi memberikan bantuan stimulant, kebutuhan modal untuk pengembangan usahanya akan difasilitasi untuk menjalin hubungan dengan lembaga perbankan (khususnya Bank Umum Provinsi Jawa Timur) (Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2014: 20-22).

Program KRPL di Desa Puhjarak dimulai pada bulan Februari 2012, dan hingga sekarang kurang lebih berjalan hampir tiga tahun. Artinya program KRPL di Desa Puhjarak saat ini berada pada tahap ketiga yakni tahap kemandirian. Dimana pada tahap ketiga atau kemandirian ini pemerintah provinsi tidak lagi memberikan bantuan stimulant, sehingga diharapkan mereka mandiri dan swadaya sendiri. Hal ini dipertegas oleh Bapak Karno selaku PPL Desa Puhjarak yang menyatakan bahwa:

“Saat ini memang sudah tidak ada bantuan lagi, tapi diharapkan masyarakat dapat swadaya sendiri dalam menjalankan program KRPL ini selanjutnya dengan terus didampingi oleh PPL (Wawancara dengan Bapak Karno dari BPP Plemahan Pada 7 Maret 2014 Pukul 11.13 WIB)”.

Kriteria suatu desa atau wilayah dapat dijadikan sebagai pengembangan KRPL diantaranya karena:

Mempunyai sumber daya alam (lahan pekarangan dan air) yang belum termanfaatkan secara optimal, mempunyai koperasi wanita (KOPWAN) yang aktif dan mempunyai unit usaha ekonomi produktif yang berpotensi untuk dikembangkan serta mempunyai kegiatan posyandu (Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim, 2012: 5).

Berdasarkan kriteria tersebut, maka Desa Puhjarak dianggap memenuhi untuk dijadikan sebagai lokasi untuk pengembangan program KRPL karena memenuhi kriteria tersebut. Hal ini juga

disampaikan oleh Bapak Junadi dari BKP3 dalam kutipan wawancara berikut:

“Persyaratan KRPL itu, posyandunya aktif, koperasinya aktif, PKK-nya aktif. Selain itu melihat potensi pekarangan yang ada di Puhjarak masih cukup luas. Bahkan luas pekarangannya hampir sama dengan luas lahan sawahnya” (Wawancara dengan Bapak Junadi dari BKP3 Kab. Kediri Pada 19 Maret 2014 Pukul 13.29 WIB).

Oleh karena itu, dalam impelmentasi program KRPL di Desa Puhjarak diharapkan dapat mandiri dengan swadaya masyarakat. Program tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus untuk pelaksanaan selanjutnya. Jadi, diusahakan masyarakat tidak tergantung dari bantuan pemerintah, namun mandiri dengan swadaya dari masyarakat sendiri. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sayuti selaku tim teknis program KRPL Desa Puhjarak sebagaimana dalam kutipan wawancara berikut:

“Program KRPL yang sudah jalan itu, ketika dananya sudah habis maka masyarakat swadaya sendiri agar programnya tetap berlangsung. Bentuknya berupa tanaman untuk pekarangan mereka masing-masing. Kalau hanya mengandalkan dana bantuan dari pemerintah sendiri. Maka masyarakat kita motivasi sehingga masyarakat mengerti sehingga mereka ngerti, maksudnya apa sih program ini” (Wawancara dengan Bapak Sayuti selaku Tim Teknis program KRPL Desa Puhjarak Pada 17 Maret 2014 Pukul 11.15 WIB).

Dalam implementasi KRPL maka perlu perancangan dengan tahapan-tahapan kegiatan agar tujuan yang diharapkan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dibutuhkan 9 (sembilan) tahapan kegiatan seperti telah

dituangkan dalam Pedoman Umum Model KRPL (Kementerian Pertanian, 2011), yaitu:

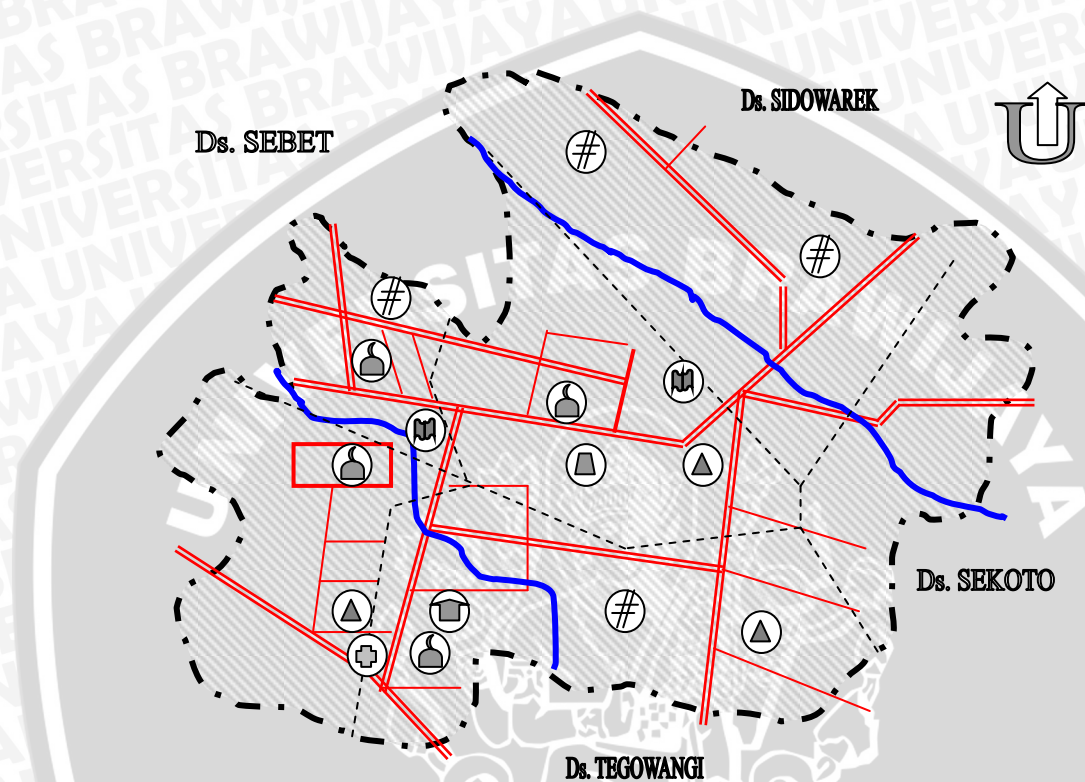
1. **Persiapan:** (1) pengumpulan informasi awal tentang potensi sumberdaya dan kelompok sasaran, (2) pertemuan dengan dinas terkait untuk mencari kesepakatan dalam penentuan calon kelompok sasaran dan lokasi, (3) koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Terkait lainnya di Kabupaten/Kota, (4) memilih pendamping yang menguasai teknik pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
2. **Pembentukan Kelompok:** Kelompok sasaran adalah rumahtangga atau kelompok rumahtangga dalam satu Rukun Tetangga, Rukun Warga atau satu dusun/kampung. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif, dengan melibatkan kelompok sasaran, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Kelompok dibentuk dari, oleh, dan untuk kepentingan para anggota kelompok itu sendiri. Dengan cara berkelompok akan tumbuh kekuatan gerak dari para anggota dengan prinsip keserasian, kebersamaan dan kepemimpinan dari mereka sendiri.
3. **Sosialisasi:** Menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan dan membuat kesepakatan awal untuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Kegiatan sosialisasi dilakukan terhadap kelompok sasaran dan pemuka masyarakat serta petugas pelaksana instansi terkait.
4. **Penguatan Kelembagaan Kelompok,** dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kelompok: (1) mampu mengambil keputusan bersama melalui musyawarah; (2) mampu menaati keputusan yang telah ditetapkan bersama; (3) mampu memperoleh dan memanfaatkan informasi; (4) mampu untuk bekerjasama dalam kelompok (sifat kegotong-royongan); dan (5) mampu untuk bekerjasama dengan aparat maupun dengan kelompokkelompok masyarakat lainnya.
5. **Perencanaan Kegiatan:** Melakukan perencanaan/rancang bangun pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam berbagai tanaman pangan, sayuran dan obat keluarga, ikan dan ternak, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan, kebun bibit desa, serta pengelolaan limbah rumah tangga. Selain itu dilakukan penyusunan rencana kerja untuk satu tahun. Kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan kelompok dan dinas instansi terkait.
6. **Pelatihan :** Pelatihan dilakukan sebelum pelaksanaan di lapang. Jenis pelatihan yang dilakukan diantaranya: teknik budidaya tanaman pangan, buah dan sayuran, toga, teknik budidaya ikan dan ternak, perbenihan dan pembibitan, pengolahan hasil dan pemasaran serta teknologi pengelolaan limbah rumah tangga. Jenis pelatihan lainnya adalah tentang penguatan kelembagaan.
7. **Pelaksanaan :** Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh kelompok dengan pengawalan teknologi oleh peneliti dan pendampingan antara lain oleh Penyuluh dan Petani Andalan. Secara bertahap, dalam pelaksanaanya

menuju pada pencapaian kemadirian pangan rumah tangga, diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, konservasi tanaman pangan untuk masa depan, pengelolaan kebun bibit desa, dan peningkatan kesejahteraan.

8. **Pembiayaan**, bersumber dari kelompok, masyarakat, partisipasi pemerintah daerah dan pusat, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta dan dana lain yang tidak mengikat.
9. **Monitoring dan Evaluasi**, dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan menilai kesesuaian kegiatan yang telah dilaksanakan dengan perencanaan. Evaluator dapat dibentuk oleh kelompok. Evaluator dapat juga berfungsi sebagai motivator bagi pengurus, anggota kelompok dalam meningkatkan pemahaman yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya yang tersedia di lingkungannya agar berlangsung lestari.

Teknis pelaksanaan program KRPL di Desa Puhjarak berupa pengenalan program KRPL beserta sosialisasinya pada masyarakat. Mengenai pengetahuan program KRPL dibantu dengan 5 Dinas Lembaga yaitu sebagai *leader* sektornya adalah Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Peyuluhan (BKP3), Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Dalam pelaksanaannya masih diaplikasikan di 3 dusun yang digunakan sebagai dusun percontohan yaitu Dusun **Gebyaran**, **Puhrejo**, dan **Puhjarak**, yang berjumlah 107 KK. Mekanisme KRPL adalah dengan menyatukan seluruh lembaga yang ikut andil dalam berjalannya program KRPL (Profil KRPL Puhjarak, 2012: 2). Berikut ini adalah peta KRPL yang diaplikasikan di 3 dusun yang ada di Desa Puhjarak:

PETA KRPL
DS. PUHJARAK KEC. PLEMAHAN



Sumber: Profil KRPL Desa Puhjarak, 2012

Gambar 7 Peta KRPL Desa Puhjarak

Keterangan:

----- : Batas Desa
----- : Jln Desa

----- : Batas Dusun
----- : Jln Raya ~~~~~ : Sungai

TANDA PETA

-  : BALAI DESA
-  : SEKOLAHAN
-  : MASJID
-  : MAKAM
-  : PUSKESMAS

DEMOGRAFI :

JML PENDUDUK : 4.787 (1.305 KK)
LAKI-LAKI : 2.356
PEREMPUAN : 2.431
Luas sawah : 359,07 Ha
Luas pekarangan : 82,935 Ha

Dalam pelaksanaan program KRPL di Desa Puhjarak dilakukan identifikasi wilayah dan dari hasil identifikasi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa strata sebagai berikut :

Tabel 7 Data Strata Peserta KRPL Desa Puhjarak

No.	Dusun	Pembagian Strata	Jumlah Strata (KK)
1.	Gebyaran	Strata 1	22
		Strata 2	11
		Strata 3	-
2.	Puhrejo	Strata 1	-
		Strata 2	4
		Strata 3	14
3.	Puhjarak	Strata 1	38
		Strata 2	11
		Strata 3	7

Sumber: Profil KRPL Desa Puhjarak, 2012

Penetapan strata tersebut berdasarkan ketersediaan lahan pekarangan masing-masing rumah tangga. Strata 1 diperuntukan bagi yang memiliki pekarangan sempit kurang dari 100 m², atau tanpa pekarangan dan hanya ada teras. Strata 2 diperuntukan bagi yang memiliki pekarangan sedang yakni antara 100-300 m². Sedangkan strata 3 diperuntukan bagi yang memiliki pekarangan luas lebih dari 300 m². Sedangkan pengembangannya terdiri dari 4 kegiatan besar yaitu pola vertikultur dan tanaman pot, bedengan sempit, bedengan luas, dan intensifikasi jalan/ rumah ibadah. Khusus untuk pekarangan luas (strata 3), pemanfaatannya ditambahkan kandang ternak ayam buras/ kambing dan kolam ikan air tawar (Sugihono, Chris., dkk, 2012: 4-5). Jadi berdasarkan hasil identifikasi diatas total sebanyak 60 KK yang

menerapkan strata 1, sebanyak 26 KK menerapkan strata 2 dan sebanyak 20 KK menerapkan strata 3.

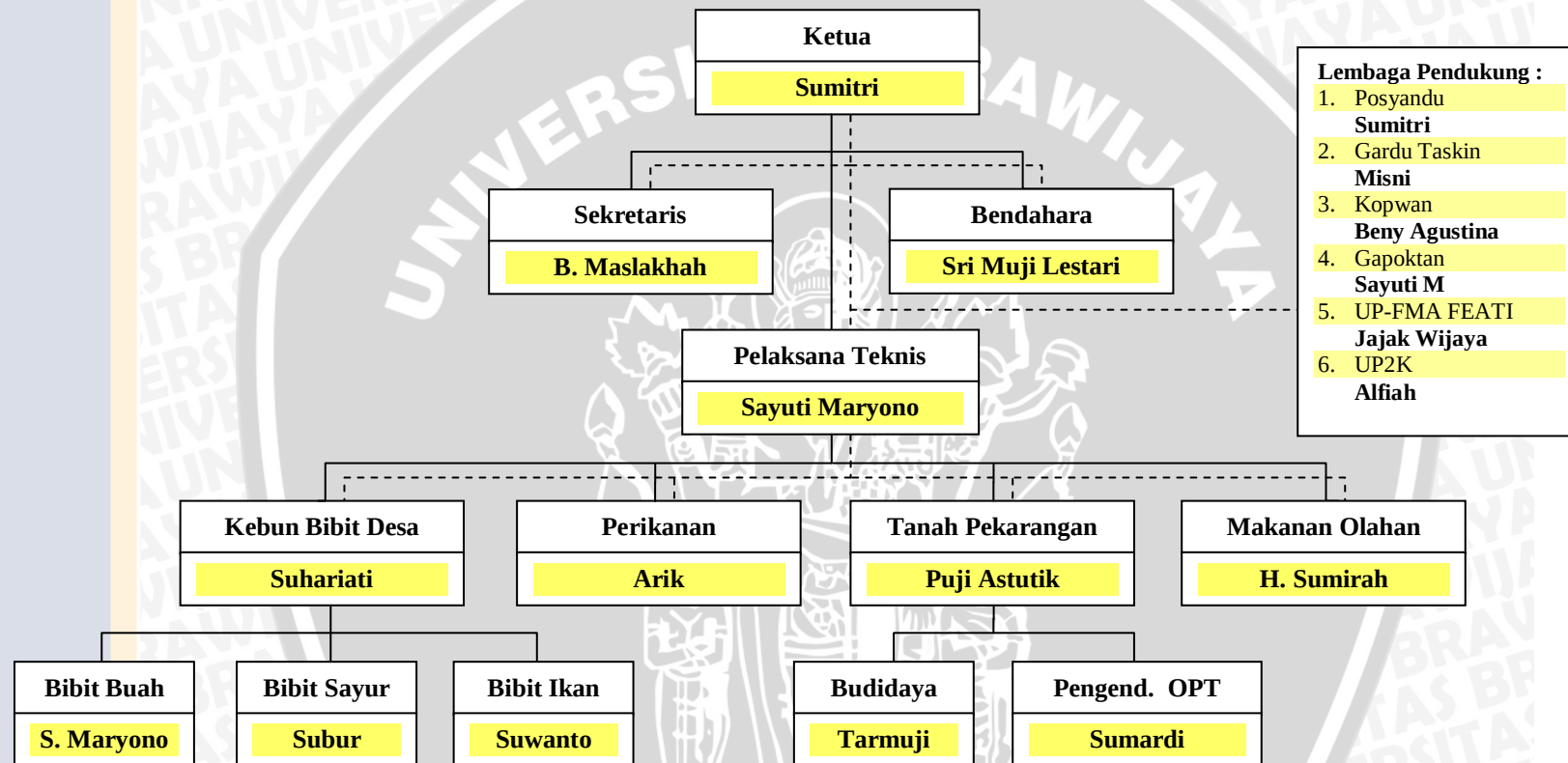
Susunan Pengurus KRPL Desa Puhjarkar antara lain sebagai berikut:

Penanggung Jawab	:	Bapak Sugiyo
Ketua KRPL	:	Ibu Sumitri
Sekretaris	:	Ibu B. Maslakhah
Bendahara	:	Ibu Muji Lestari
Koordinator Dusun I (Dsn. Gebyaran)	:	H. Sumirah
Koordinator Dusun II (Dsn. Puhrejo)	:	Hartiningsih
Koordinator Dusun III (Dsn. Puhjarkar)	:	Puji Astutik
Serta dibantu oleh bidang-bidang/seksi.		
Pendamping Lapangan/PPL	:	Karno
(Sumber: Profil KRPL Puhjarkar 2012)		

Berikut ini adalah struktur organisasi KRPL Desa Puhjarkar yang ditunjukkan dalam bagan dibawah ini:



Struktur Organisasi KRPL Desa Puhjarak



Keterangan



Garis Komando



Garis Koordinasi & kerjasama

Sumber: Profil KRPL Desa Puhjarak, 2012

Bagan 8 Struktur Organisasi KRPL Desa Puhjarak

Kegiatan KRPL di desa Puhjarak meliputi :

A. Kegiatan Pokok :

1. **Budidaya tanaman Sayuran**, meliputi : cabe kecil, cabe besar, terong, tomat, kacang panjang, bawang merah, sawi, kol, kangkung dan lain-lain.
2. **Budidaya tanaman buah-buahan**, meliputi : blimbing, jambu, sirsat, nangka, jeruk, duren, blinjo, kakao dan lain-lain.
3. **Peternakan** : bebek, menthok, ayam dan merpati.
4. **Perikanan darat**, meliputi : budidaya cacing sutra, cacing tanah dan lele.
5. **Pengolahan** : pengolahan bahan pangan berbasis lokal (minuman berbasis toga, makanan berbasis Jagung dan makanan olahan berbasis lele).
6. **Kebun Bibit Desa** : kebun bibit desa berada di tiga lokasi meliputi : KBD Sayuran, KBD buah-buahan dan KBD ikan.

B. Kegiatan penunjang KRPL :

1. **Pembuatan pupuk organik** : pengolahan limbah ternak sebagai pupuk organik
2. **Biogas** : penanganan limbah ternak sebagai sumber energy dan limbah biogas sebagai pakan dasar kolam lele.
3. **Budidaya cacing** : budidaya cacing sutra dan cacing tanah sebagai bahan pakan ikan dan cacing sebagai pupuk organik.
4. **Pengolahan limbah dapur** : limbah dapur yang berupa air leri dimanfaatkan dalam pengembangan pupuk organik cair dan probiotik untuk ikan.

C. Kegiatan pendampingan:

Pendampingan dimulai dari penggalan gagasan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari Penyuluh Pendamping, BPTP Jawa Timur serta dari dinas instansi terkait, meliputi :

1. **Sosialisasi** program dan penggalan gagasan.
2. **Pelatihan-pelatihan** : pelatihan cara budidaya tanaman sayuran, buah-buahan, budidaya cacing sutra dan cacing tanah, pengolahan pakan ikan lele.
3. **Pertemuan berkala** : pertemuan berkala dilakukan setiap bulan sekali dalam kegiatan PKK desa puhjarak serta melalui pertemuan rutin kelompok tani pada dusun pelaksana program.
4. **Kunjungan** : kunjungan dilakukan secara langsung pada masyarakat pelaku program dengan maksud untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh pelaku dan pemecahan masalah.

D. Sasaran Program KRPL Desa Puhjarak.

1. Fasilitas umum :

Fasilitas umum meliputi jalan desa dan lokasi bangunan milik desa. Hal ini menjadi tanggung jawab Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), Kelompok Tani dan Pemerintah Desa.

2. Rumah tangga.

Lokasi rumah tangga meliputi jalan umum depan rumah, halaman dan pekarangan. Hal ini dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab rumah tangga masing-masing.

3. Sekolah

Kegiatan KRPL yang dilaksanakan sekolah adalah berupa school gardeen yang dipusatkan di SMPN II Plemahan yang lokasinya berada di Desa Puhjarak.

E. Rencana Pengembangan

KRPL Desa Puhjarak dilaksanakan secara bertahap, yaitu :

Tabel 8 Tahapan Rencana Pengembangan KRPL di Desa Puhjarak

Tahap	Tahun	Dusun
I	2012-2013	Gebyaran, Puhrejo dan Puhjarak
II	2014-2015	Genukrejo, Babadan dan Supit Urang
III	2016-2017	Tempursari Dan Recosolo

Sumber: Profil KRPL Desa Puhjarak, 2012

F. Pendanaan

Sumber dana dari kegiatan KRPL desa Puhjarak adalah berasal dari : Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur melalui Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3), BPTP Jawa Timur, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kediri, Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, Pemerintah Desa Puhjarak, Gapoktan dan swadaya masyarakat baik secara langsung maupun melalui kegiatan KRPL (Profil KRPL, 2012: 5).

Program KRPL maknanya adalah pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan sekitar rumah untuk pemenuhan gizi keluarga melalui kerjasama *stakeholders* terkait. Implementasi program KRPL yang ada di Desa Puhjarak dimulai pada tahun 2012. Artinya sampai tahun 2014 ini, implementasi KRPL yang ada di Desa Puhjarak kurang lebih berjalan tiga tahun dan berada pada tahap kemandirian. Pada tahap kemandirian, diharapkan masyarakat swadaya sendiri dalam penumbuhan RPL karena sudah tidak ada lagi bantuan stimulan dari pemerintah. Latar belakang program KRPL di Desa Puhjarak antara lain karena potensi lahan pekarangan yang ada di daerah tersebut yang masih cukup luas, kegiatan PKK dan posyandunya aktif. Program KRPL di Desa Puhjarak

dilaksanakan di tiga dusun yitu Dusun Gebyaran, Dusun Puhrejo dan Dusun Puhjarak dengan KK yang turut aktif sebanyak 107 KK. Kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan pokok, penunjang dan pendamping.

b. Peran dan Sinergitas *Stakeholder* dalam Keberlanjutan Implementasi Program KRPL di Desa Puhjarak

Pengembangan KRPL melibatkan *stakeholder*/ pelaku yang saling terkait satu sama lain untuk mendukung keberlanjutan implementasinya. *Stakeholder* yang berperan melibatkan semua elemen masyarakat dan instansi terkait pusat dan daerah, yang masing-masing bertanggungjawab terhadap sasaran atau keberhasilan kegiatan. Secara rinci, peran setiap elemen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Peran masing-masing pelaku/*stakeholder* dalam KRPL

No.	Pelaksana	Tugas/ Peran dalam kegiatan
1.	Masyarakat: -Kelompok Sasaran - Pamong desa (RT, RW, Kadus) dan tokoh	-Pelaku utama -Pendamping -Monitoring dan Evaluasi
2.	Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura, Dinas Perikanan, Kantor kecamatan, Kantor Kelurahan dan lembaga terkait lainnya)	-Pembinaan dan pendampingan kegiatan oleh petugas lapangan -Penanggung jawab keberlanjutan kegiatan -Replika kegiatan ke lokasi lainnya
3.	-pokja 3, PKK -Kantor Ketahanan pangan	Coordinator lapangan
4.	Ditjen Komoditas/Badan lingkup Kementerian Pertanian	- Pengembangan model sesuai tupoksi Instansi

No.	Pelaksana	Tugas/ Peran dalam kegiatan
5.	Badan Litbang Pertanian	- Membangun model KRPL - Narasumber dan pengawasan inovasi teknologi dan kelembagaan
6.	Perguruan Tinggi/Swasta/LSM	- Dukungan dan pengawasan
7.	Pengembang perumahan	- Fasilitas pemanfaatan lahan kosong di kawasan perumahan

Sumber: Pedoman Umum Model KRPL, Kementerian Pertanian 2011

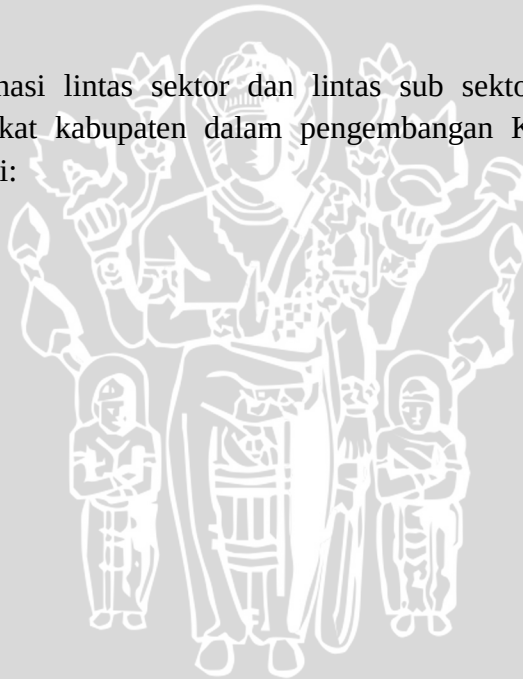
Implementasi KRPL di Desa Puhjark juga melibatkan *stakeholder* *Stakeholder* yang terkait berasal dari kalangan masyarakat serta instansi-instansi yang terkait baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Keberlanjutan program harus didukung *stakeholder* yang kuat agar program ini dapat berjalan mandiri atas swadaya masyarakat. *Stakeholder* yang berperan dalam KRPL di Puhjark diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Bapak Karno dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

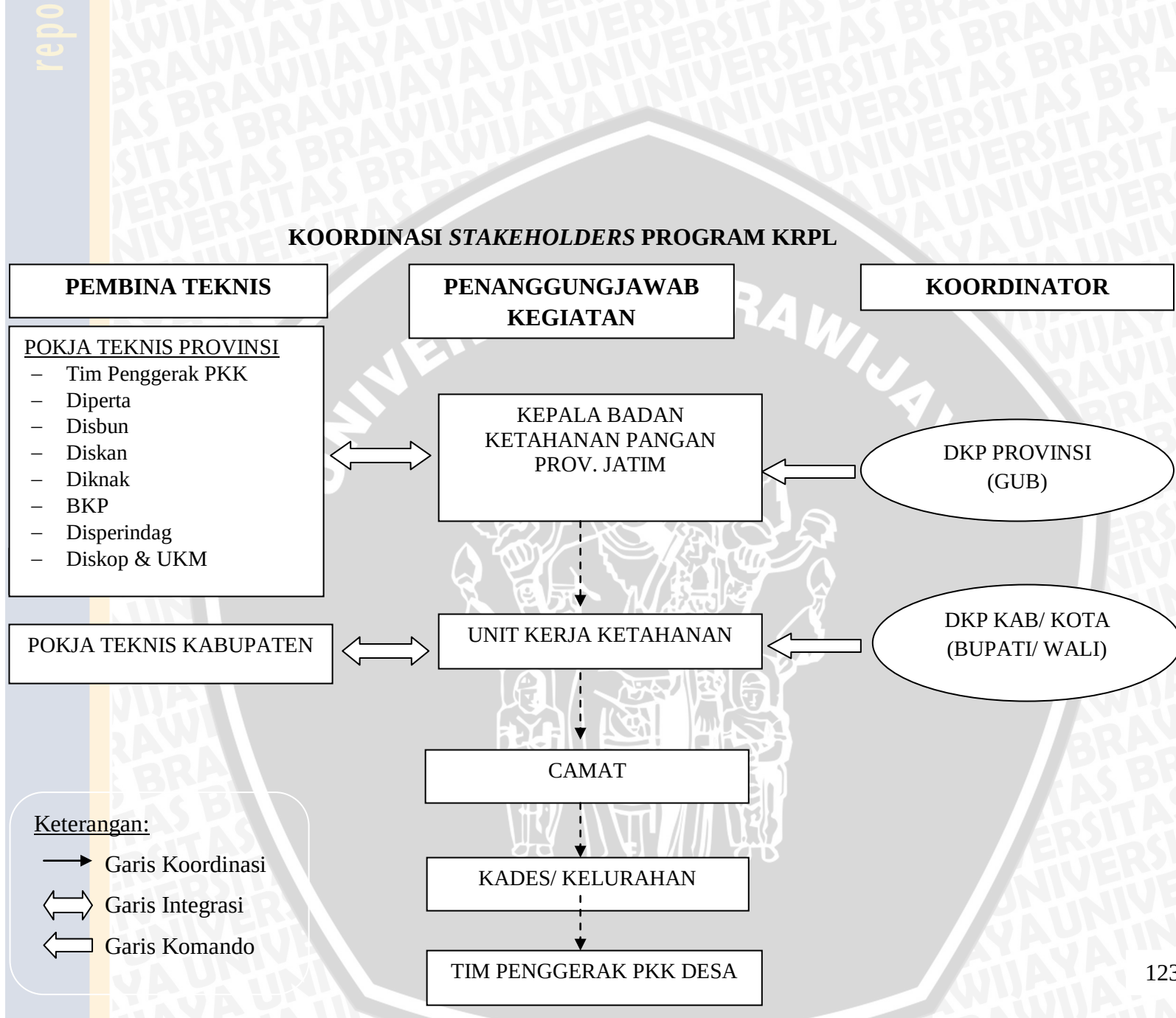
“BKP Provinsi itu melakukan supervisor (evaluator), BKP3 Kab. Kediri melakukan supervisor (evaluator), kalau BPP melakukan pendampingan sedangkan BPTP melakukan pendampingan juga. Kemudian untuk dinas-dinas terkait seperti dinas pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan sebagai pendukung kegiatan. Kalau kepala desa sebagai penanggung jawab program, kemudian untuk PKK sebagai pelaksana” (wawancara dengan P. Karno di BPP Plemahan pada 7 Maret 2014 Pukul 11.13 WIB).

Pengembangan KRPL merupakan kegiatan lintas sektor dan lintas sub sektor. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengorganisasian baik ditingkat provinsi dan kabupaten. Untuk mempertegas peran dan fungsi masing-masing lembaga dapat ditegaskan sebagai berikut:

1. Dewan ketahanan pangan tingkat provinsi dan kabupaen bertindak sebagai koordinator pelaksana program.
2. Badan ketahanan pangan tingkat provinsi dan unit kerja ketahanan pangan tingkat kabupaten bertindak sebagai penanggungjawab kegiatan.
3. Badan/ Dinas terkait/ tim penggerak PKK tingkat provinsi maupun kabupaten/ Kota sebagai anggota pokja tingkat provinsi/ kabupaten/ kota bertindak sebagai Pembina teknis pelaksanaan model pengembangan kawasan rumah pangan lestari.
4. Camat, bertindak sebagai koordinator pelaksana program diwilayah kerjanya.
5. Kepala desa/ kelurahan bertindak sebagai penanggungjawab operasional program ditingkat desa/ kelurahan.
6. Tim penggerak PKK desa/ kelurahan, sebagai pelaksana ditingkat desa/ kelurahan (BPTP Jatim, 2012: 22).

Bentuk koordinasi lintas sektor dan lintas sub sektor baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dalam pengembangan KRPL ditunjukkan dalam bagan berikut ini:





Sumber: BPTP Jatim, 2012

Bagan 9 Koordinasi Stakeholder program KRPL

Dalam implementasi program KRPL Desa Puhjark juga melibatkan *stakeholders* terkait. Dari komoditas yang berkembang di Desa Puhjark yakni komoditas ikan, diantaranya juga karena dukungan dari Dinas Perikanan Kabupaten Kediri. Keterlibatan Dinas Perikanan diantaranya memberikan sosialisasi, konsultasi apabila ada permasalahan dan juga pemberian bibit benih ikan. Hal ini seperti yang disampaikan Bapak karno dalam kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“Program KRPL merupakan program satu kesatuan (terintegrasi). Muali dari perencanaan, penyiapan benih sampai pada pemasaran, melibatkan dari berbagai lintas sektor yang saling mendukung. Dari komoditas yang berkempang pesat yakni komoditas ikan lele. Pembinaannya tidak bisa hanya dari BPP Plemahan atau BKP3 saja tetapi harus terintegrasi dengan instansi terkait lainnya. Sekarang ini menjadi binaan langsung dari Dinas peternakan dan perikanan. Dan banyak mendapat bantuan dari dinas tersebut (Wawancara dengan Bapak Karno dari BPP Plemahan pada 7 Maret 2014 pukul 11.13 WIB).

Integrasi *stakeholders* terkait dalam pelaksanaan program KRPL juga dapat memicu munculnya para *local champion*. *Local champion* merupakan motor penggerak suatu program oleh karena itu biasanya lebih dari satu orang. Hal ini dapat dilihat secara otomatis pada saat awal suatu program di luncurkan atau disosialisasikan. Alasan munculnya *local champion* antara lain tingkat partisipatif, rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang baru, semangat untuk menerapkan informasi teknologi, dan untuk mendapatkan nilai manfaat secara materi maupun non materi. Kemunculan *local champion* merupakan suatu pertanda bahwa suatu program dapat dimulai pelaksanaannya (BPTP Jatim, 2012: 32).

Dalam implementasi KRPL di Desa Puhjarak, *local champion* atau yang menjadi motor penggerak diantaranya karena adanya dukungan pendampingan terus menerus dari pendamping yaitu Bapak Karno. Kemudian komitmen dari Kepala Desa Puhjarak yaitu Bapak Sugiyo. Ibu Sumtitri selaku Ketua PKK sekaligus pelaksana program KRPL yang juga memotivasi warga masyarakatnya agar tetap melaksanakan program KRPL karena paling tidak, bisa bermanfaat dalam mengurangi pengeluaran keluarga untuk belanja. Selanjutnya komitmen juga dari Bapak Sayuti sebagai pelaksana teknis KRPL, yang mengelola KBD sehingga ketersediaan bibit masyarakat tersedia secara berkelanjutan.

Implementasi program KRPL perlu didukung oleh semua pihak yang terkait agar dalam implementasinya dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan agar implementasi program KRPL dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan adalah dengan mensinergikan *stakeholders* terkait. Sinergitas antar *stakeholders* dapat dilihat dari komunikasi dan kerjasama diantara *stakeholder* yang terkait. Komunikasi antar *stakeholders* dalam implementasi program KRPL menurut Bapak Karno selaku PPL Desa Puhjarak cukup baik. Seperti yang diungkapkan dalam kutipan wawancara berikut:

“Komunikasi antar *stakeholder* kalau disini komunikasinya bagus ya, kalau setiap mau ada kegiatan melibatkan semua *stakeholder*” (Wawancara dengan Bapak Karno dari BPP Plemahan Pada 7 Maret pukul 11.13 WIB).

Sinergitas juga akan tercapai jika masing-masing *stakeholders* mengetahui tugas dan fungsi masing-masing. Pengorganisasian pengembangan KRPL tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dibawah koordinasi dewan ketahanan pangan. Tugas dan fungsi masing-masing *stakeholder* mulai dari tingkat provinsi hingga ke petugas penyuluh lapangannya adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat Provinsi
Badan ketahanan pangan provinsi bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan. Kegiatan pengembangan kawasan rumah pangan lestari dilaksanakan dengan melibatkan POKJA KRPL. Badan ketahanan pangan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a) Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengembangan kawasan rumah pangan lestari.
 - b) Melaksanakan koordinasi, identifikasi, seleksi calon lokasi, sosialisasi, dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengembangan kawasan rumah pangan lestari.
 - c) Menetapkan lokasi sasaran dengan surat keputusan gubernur jawa timur.
 - d) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
 - e) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan rumah pangan lestari kepada bapak gubernur.
- 2) Tingkat kabupaten/ kota
Unit kerja ketahanan pangan kabupaten/kota sebagai penanggungjawab kegiatan tingkat kabupaten/kota mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a) Bersama-sama provinsi melakukan identifikasi, seleksi calon lokasi, pembinaan terhadap penyelenggaraan pengembangan kawasan rumah pangan lestari.
 - b) Bersama-sama provinsi melakukan monitoring dan evaluasi.
 - c) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan rumah pangan lestari secara berkala ke provinsi.
 - d) Melakukan pendampingan dengan memanfaatkan tenaga penyuluh yang ada diwilayahnya.
- 3) Tingkat kecamatan
Camat bertugas mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai program yang masuk di desa wilayah kerjanya dalam rangka mendukung keberhasilan pengembangan kawasan rumah pangan lestari.
- 4) Tingkat desa/ kelurahan

Kepala desa/kelurahan bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan yang ada di desa/kelurahan:

- a) Mengenali kondisi, potensi dan masalah yang ada didesanya.
 - b) Mengintegrasikan berbagai program pembangunan yang ada di desa/kelurahannya untuk mewujudkan keberhasilan pengembangan kawasan rumah pangan lestari.
- 5) Tim penggerak PKK desa
Sebagai pelaksana ditingkat desa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a) Menyusun proposal/ RUK/RUB
 - b) Meningkatkan kemampuan manajemen.
 - c) Melaporkan secara berkala perkembangan kegiatannya ketingkat provinsi dan kabupaten.
 - d) Mengkoordinasikan kegiatan kawasan rumah pangan lestari dengan tim penggerak PKK kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, sampai dasa wisma.
 - e) Menyiapkan kader pangan yang mau dan mampu mengembangkan tugas sebagai ujung tombak pengembangan kawasan rumah pangan lestari.
 - f) Mengsinergikan kinerja POKJA III dengan POKJA II, IV dalam pengembangan kawasan rumah pangan lestari (Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim, 2012: 24-26).
- 6) Pendamping
Tugas pokok:
- a) Identifikasi kondisi sarana dan prasarana, SDM, SDA, dan permasalahan.
 - b) Sosialisasi program.
 - c) Membuat rencana kerja
 - d) Membimbing kelembagaan masyarakat dalam berusaha.
 - e) Memfasilitasi kelembagaan masyarakat terhadap: saprodi, teknologi, pasar, modal dan lain-lain.
 - f) Membuat jadwal pembinaan.
 - g) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara rutin.
- Arahan Pembinaan:
- a) Pengambilan keputusan secara partisipatif.
 - b) Peningkatan pemahaman tupoksi pengurus dan anggota.
 - c) Penyusunan rencana kegiatan (RUB/RUK).
 - d) Pengelolaan kawasan rumah pangan lestari.
 - e) Administrasi dan pembukuan.
 - f) Penyusunan laporan (Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim, 2014: 34-35).

Implementasi program KRPL di Desa Puhjark sudah berjalan kurang lebih tiga tahun sampai sekarang ini. Artinya saat ini, program KRPL Desa

Puhjarak berada dalam tahap kemandirian. Pada perjalanannya sampai pada tahap ini, *stakeholders* yang berperan tentunya sudah melaksanakan peran dan fungsi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan diatas. Namun setiap program tetap harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di lokasi KRPL seperti yang ada di Desa Puhjarak ini. Sejauh ini, pelaksanaan KRPL yang ada di desa tersebut tetap berlanjut meski ada sebagian yang tidak berlanjut hal ini karena disesuaikan dengan keadaan di desa tersebut. Maka dari itu perlu ada sinergitas yang lebih lagi guna mendukung keberlanjutannya. Hal ini karena menurut Bapak Junadi sinergitas yang ada di desa Puhjarak masih belum optimal. Namun dalam hal ini, bukan berarti tidak ada sinergitas dalam implementasinya sejauh ini. Seperti yang disampaikan Bapak Junadi sebagai berikut:

“Sinergitas antar aktor belum optimal, karena masing-masing dinas punya pekerjaan punya kegiatan, punya sasaran masing-masing, memang harapannya ada sinergi dibawah koordinasi dewan ketahanan pangan” (Wawancara dengan Bapak Junadi dari BKP3 pada 12 November 2013 pukul 10.28 WIB).

Implementasi program KRPL yang terjadi sekarang ini sangat rentan dengan permasalahan keberlanjutannya apabila tidak didukung dan disiapkan secara seksama pada saat program tersebut diberhentikan sarana pelaksanaannya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Junadi dari BKP3 sebagai berikut:

“Keberlanjutan program yang ada di Puhjarak belum optimal. Hal ini karena kebiasaan masyarakat desa Puhjarak menanam di areal persawahan bukan di pekarangan. Jadi menanam dipekarangan dinomorduakan” (Wawancara dengan Bapak Junadi pada 19 Maret 2014 pukul 13.29 WIB).

Mengenai keberlanjutan yang ada di Desa Puhjarak, Bapak Karno selaku PPL Plemahan menyatakan bahwa:

“Keberlanjutan KRPL yang ada di Desa Puhjarak, ada beberapa yang lanjut, tetapi ada juga yang tidak berlanjut. Dan yang berkembang dikembangkan terus. Yang berkembang pesat di Desa Puhjarak ini adalah komoditas ikan. Dari budidaya ikan ini hingga bisa membentuk kelompok perikanan sendiri yaitu kelompok ikan Gebyar Mina Lestari yang ada di Desa Gebyaran yang dikelola oleh Bapak Riadi” (Wawancara dengan Bapak Karno dari BPP Plemahan pada 7 Maret 2014 pukul 11.13 WIB).

Ibu Sumitri selaku Ketua PKK serta ketua program KRPL Desa Puhjarak menambahkan bahwa KRPL yang ada di Desa Puhjarak masih berlanjut. Hal ini seperti yang diungkapkan Beliau pada kutipan wawancara berikut:

“Mengenai keberlanjutannya masih berlanjut, kendalanya kan kemarin sempat ada Gunung Kelud meletus jadi tanaman-tanamannya kalau sekarang ini ya beberapa ada yang mati. Terus ditambah lagi ini kan musim kemarau mbak, kan tanamannya yang musiman itu juga tidak dapat tumbuh subur” (Wawancara dengan Ibu Sumitri selaku Ketua PKK Desa Puhjarak pada 2 Mei 2014 pukul 9.42 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, mengenai keberlanjutan program KRPL yang ada di Desa Puhjarak dapat dikatakan berlanjut. Namun keberlanjutannya belum optimal. Hal ini dikarenakan pola pikir sebagian masyarakat yang masih enggan memanfaatkan pekarangan. Ditambah pula iklim saat ini yang tidak menentu sehingga penumbuhan RPL terganggu. Namun disisi lain, terdapat komoditas yang berkembang pesat di Desa Puhjarak antara lain dari komoditas ikan hingga pada akhirnya bisa membentuk kelompok ikan dengan nama “Gebyar Mina Lestari”.

Diartikan Gebyar karena terletak di Dusun Gebyaran, Mina artinya ikan dan lestari artinya berlanjut.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam keberlanjutan implementasi program KRPL:

a. Faktor Pendukung

1) Tanah Yang Subur

Dalam implementasi program KRPL terdapat berbagai macam faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi keberlanjutan program tersebut. Faktor yang dapat mendukung keberlanjutan program KRPL ini adalah tanah yang subur seperti yang diungkapkan oleh Bapak Karno dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Faktor yang paling mendukung berlangsungnya kegiatan KRPL di Puhjark antara lain peran serta masyarakat. Serta sumber daya alamnya seperti tanahnya juga mendukung kegiatan KRPL ini” (Wawancara dengan Bapak Karno Selaku PPL Plemahan pada 7 Maret 2014 pukul 11.13 WIB).

2) Potensi Pekarangan yang masih cukup luas

Faktor lain yang mendukung dalam pelaksanaan program KRPL seperti yang dijelaskan Bapak Junadi adalah:

“Potensi Pekarangan khususnya yang ada di Desa Puhjark masih cukup luas. Bahkan luas pekarangan hampir sama dengan luas lahan persawahannya. Jadi apabila dikembangkan, maka bisa-bisa Puhjark itu banjir sayur” (Wawancara dengan Bapak Junadi dari BKP3 Kab. Kediri pada 12 November 2013 pukul 10.28 WIB).

3) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung diantaranya seperti tersedianya lokasi untuk KBD untuk sayur, buah maupun ikan. Penyediaan KBD buah yang diletakkan ditanah milik kantor desa Puhjark juga menjadi bukti bahwa pemerintahan yang ada di Desa Puhjark mendukung program KRPL ini. Untuk KBD sayur, lokasinya juga tersedia yakni di dusun Puhrejo yang dikelola Bapak Subur. Kemudian untuk komoditas ikan dikelola dan dikembangkan didekat kantor Desa Puhjark”.

4) Kelembagaan

KBD merupakan bagian kunci dari program penumbuhan RPL-RPL di pedesaan. Oleh karena itu pada tahap awal program ini disosialisasikan, kelembagaan KBD harus di rencanakan secara baik keberadaannya. Keberadaan KBD di fasilitasi oleh Perangkat Desa setempat dengan memanfaatkan lahan Desa. Penyediaan fasilitas yang berupa lahan desa untuk KBD perlu di dukung struktur kelembagaan yang baik untuk memperlancar kegiatan. Untuk mewujudkan KBD yang tangguh yaitu dapat melayani kebutuhan bibit tanaman yang diperlukan oleh seluruh para pelaku RPL, maka perlu susun/dibentuk pengelolanya.

Kelembagaan pengelola KBD Puhjark di tangani oleh tim teknis dan seseorang yang mempunyai kemampuan taknologi pertanian yang lebih baik dibandingkan yang lainnya. Sehingga dengan begitu, KBD terus bisa memenuhi kebutuhan bibit untuk masyarakat desa tersebut.

5) Program Pemerintah

KRPL merupakan program untuk pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang sampai saat ini sudah dilaksanakan secara nasional. KRPL di Jawa Timur sendiri mulai berkembang sejak 2010 dan kemudian diterapkan di berbagai kota/kabupaten, termasuk salah satunya di Desa Puhjark yang merupakan implementasi program KRPL untuk pertama kali di Kabupaten Kediri sehingga dapat dijadikan sebagai desa percontohan (*show window*) untuk desa-desa lain di Kabupaten Kediri.

b. Faktor Penghambat

Faktor yang mempengaruhi dalam keberlanjutan implementasi program KRPL di Desa Puhjark selain faktor pendukung juga terdapat faktor yang menghambat. Faktor yang menghambat antara lain permasalahan teknis yang belum terselesaikan serta motivasi pelaku RPL yang menurun. Secara rinci dari masing-masing kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1) Permasalahan teknis yang belum terselesaikan

Iklim global yang tidak menentu saat ini tentunya mempengaruhi penumbuhan RPL di Desa Puhjark merupakan faktor kunci untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman karena secara umum tanaman yang di usahakan ditanam dalam pot/polybag. Cara tanam dengan media terbatas sangat rentan sekali dengan kekurangan

air. Hal ini terlihat pada saat tanaman tidak dilakukan penyiraman sekitar 3 hari saja kondisinya sudah mulai layu. Untuk mengantisipasi agar tanaman tidak cepat layu, maka harus dilakukan penyiraman dengan frekuensi yang sangat rapat apalagi pada saat musim kemarau. Hal ini didukung pula oleh pernyataan ibu Sumitri selaku Ketua PKK dalam kutipan wawancara berikut:

“Musim kemarau seperti saat ini mbak, yang menyebabkan tanaman banyak yang layu bahkan tidak bisa tumbuh karena kan kurang air. Apalagi, tanaman yang dibudidayakan itu tanaman musiman. Jadi baru bisa subur kalau musim hujan” (Wawancara dengan Ibu Sumtri selaku Ketua PKK Desa Puhjarak pada 2 Mei 2014 pukul 09.42 WIB).

Oleh karena itu, permasalahan tersebut tidak dapat dibiarkan secara berlarut-larut. Apabila dibiarkan akan mengganggu proses kelancaran implementasi KRPL. Selain itu, juga perlu melakukan komunikasi secara terstruktur antar pelaku RPL-RPL yang ada di kawasan tersebut.

Kendala kelancaran KRPL di Desa Puhjarak yang diidentifikasi adalah serangan hama dan ayam terhadap tanaman di pekarangan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Karno sebagai berikut:

“Kalau yang menghambat dari sisi teknis, keberagaman karakteristik dari tanaman yang dibudayakan sehingga yang sering kita lupakan itu bisa melestarikan OPT, selain itu tanamannya juga bermacam-macam kadang juga saling antagonis. Ini biasanya dapat menimbulkan OPT yang berkelanjutan. Sedangkan kita, kalau pendekatan secara kimiawi kita hindari. Maka kita coba kita lihat saja nanti, KRPL itu tidak bisa terus berkembang dengan keberagaman itu. Jadi hanya salah satu saja yang berkembang. Bisa jadi terjadi peledakan OPT nanti” (Wawancara dengan Bapak Karno selaku PPL Plemahan pada 7 Maret 2014 pukul 11.13 WIB).

Selain itu berdasarkan wawancara dengan warga Dusun Puhrejo yang juga turut dalam program KRPL mengatakan bahwa ayam juga mengganggu tanaman pekarangannya sebagaimana dalam kutipan wawancara berikut:

“Kemarin di polibag itu sempet ada bawan merah subur gitu mbak, tapi ya itu gara-gara dimakan ayam jadi sekarang habis. Kemarin sempet subur tinggi-tinggi gitu mbak” (Wawancara dengan Ibu Erna pada 15 April 2014 pukul 12.20 WIB).

2) Motivasi pelaku RPL (ibu-ibu rumah tangga) menurun

Unsur penunjang berjalannya program KRPL di lapangan adalah keberadaan *stakeholders* mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. *Stakeholders* tersebut diharapkan dapat bekerjasama untuk saling melengkapi, sehingga dapat menumbuhkan KRPL yang baik. Namun dalam kenyataannya di lapangan, dalam mendukung keberlanjutan program KRPL belum sinergi secara optimal. Kondisi ini akan berdampak terhadap penampilan implementasi KRPL. Banyak faktor yang menyebabkan belum optimalnya sinergi antar *stakeholders*. Belum optimalnya sinergi antar *stakeholders* ini diungkapkan pula oleh bapak Junadi dari BKP3 sebagai berikut:

“Sinergitas antar *stakeholders* belum maksimal dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan karena masing-masing dinas punya tujuan/sasaran masing-masing juga. Tapi harapannya antar dinas saling bekerja sama” (Wawancara dengan Bapak Junadi di BKP3 Kab. Kediri pada 12 November 2013 pukul 10.28 WIB).

Setelah program berjalan pada tahun ketiga, kendala-kendala yang muncul terhadap pelaku RPL seperti waktu yang tidak cukup

karena mempunyai lahan yang luas selain di pekarangan. Pengetahuan yang masih kurang terhadap teknologi pertanian tertentu sehingga masih terdapat kendala-kendala teknologi pertanian yang belum teratasi. Sehingga atas dasar tersebut motivasi mereka berkurang dan hal ini pada akhirnya lama kelamaan bisa menyebabkan partisipasi masyarakat menurun. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Sugiyo selaku Kepala Desa Puhjarak sebagai berikut:

“Antusias sebageian masyarakat ada yang enggan karena beberapa ada yang mempunyai sawah sehingga lebih fokus untuk sawahnya. Sedangkan yang tidak mempunyai sawah mereka bisa memanfaatkan KRPL ini sehingga lebih berkembang” (Wawancara dengan Bapak Sugiyo pada 2 Mei 2014 pukul 10.21 WIB).

Selain ditambahkan pula oleh Bapak Junadi mengenai faktor yang membuat motivasi masyarakat semakin berkurang dalam kutipan wawancara berikut:

“Pola pikir masyarakat yang masih enggan mengelola pekarangan juga masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan program KRPL ini. Harapan kami dengan pelaksanaan KRPL ini, ibu-ibu/ rumah tangga dapat memanfaatkan pekarangannya dengan pertimbangan pekarangan masih cukup luas, kemudian bisa dilakukan jam kerja. Masalah selanjutnya adalah lestari/kontinuitas” (Wawancara dengan Bapak Junadi pada 12 November 2013 pukul 10.28 WIB).

Faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas tersebut sangat mempengaruhi keberlanjutan implementasi program KRPL. Hal ini karena mengenai keberlanjutan implementasi program KRPL di Desa Puhjarak sendiri kurang optimal, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Karno dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Keberlanjutannya ada beberapa yang lanjut, ada beberapa pula yang tidak berkembang. Yang berkembang dikembangkan terus. Komoditas yang berkembang pesat di Puhjarak adalah kelompok ikan. Hingga dari kelompok ikan tersebut membentuk kelompok ikan dengan nama Gebyar Mina Lestari yang terletak di dusun Gebyaran. Bahkan sampai saat ini kelompok ikan tersebut berkembang sampai Dusun Puhrejo (Wawancara dengan Bapak Karno dari BPP Plemahan pada 7 Maret 2014 pukul 11.23 WIB).

Sedangkan mengenai keberlanjutan dari program KRPL menurut bapak Junadi menyampaikan dalam kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“keberlanjutan di Desa Puhjarak belum maksimal memang, beberapa waktu lalu kesana banyak yang mati. Yang nampak keberlanjutannya ya, budidaya lele karena memang kegemaran masyarakat disana lele” (wawancara dengan Bapak Junadi dari BKP3 Kab. Kediri pada 12 November 2013 pukul 10.24 WIB).

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, faktor penghambat seperti permasalahan teknis yang belum terselesaikan dan motivasi pelaku RPL yang menurun juga dapat mengganggu keberlanjutan KRPL di desa tersebut. Sedangkan faktor pendukung seperti tanah yang subur, potensi pekarangan yang masih cukup luas, sarana dan prasarana yang mendukung, karena KRPL program pemerintah dan juga kelembagaannya tersedia menyebabkan ada beberapa komoditas berlanjut bahkan berkembang pesat, seperti yang dijelaskan dalam wawancara diatas bahwa komoditas ikan lele berkembang pesat di Desa Puhjarak hingga membentuk kelompok ikan “Gebyar Mina Lestari”.

3. Manfaat implementasi program KRPL dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat desa Puhjarak

a. Organisasional

Dari adanya program KRPL dari sisi organisasional diharapkan ibu-ibu rumah tangga di Desa Puhjarak khususnya yang tergabung dalam PKK Desa dan Dasa Wisma sebagai pelaku dan pengelola pekarangan dapat berdaya. KBD dan sarana penunjang lainnya dapat tumbuh kembang, serta peran Koperasi Wanita yang ada di setiap desa dapat meningkat (BKP Prov. Jatim, 2012: 4). Begitu pula manfaat organisasional yang ada di Desa Puhjarak. Implementasi program KRPL memberdayakan ibu-ibu rumah tangga di desa tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan pula oleh Bapak Karno sebagai berikut:

“Intinya KRPL adalah pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan guna mencukupi kebutuhan pangan keluarga” (Wawancara dengan B. Karno di BPP Plemahan Pada 7 Maret pukul 11.13 WIB).

Selain itu, secara organisasional KBD di Desa Puhjarak juga berkembang terutama untuk memenuhi kebutuhan bibit untuk masyarakat desa tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 10 dokumentasi KBD Puhjarak berikut ini:



Sumber: Profil KRPL Desa Puhjarak 2012

Gambar 10 KBD Puhjarak

Secara umum dapat dikatakan bahwa implementasi program KRPL di Desa Puhjarak jika dilihat secara organisasional dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan di desa tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Karno sebagai berikut:

“Manfaat organisasi bisa meningkatkan kapasitas kelembagaan di desa itu sendiri” (Wawancara dengan B. Karno di BPP Plemahan Pada 7 Maret pukul 11.13 WIB).

Begitu pula menurut bapak Sayuti, dalam kutipan wawancara menyatakan bahwa:

“Antar organisasi-organisasi yang ada di Desa Puhjarak ini saling bekerjasama satu sama lain khususnya dalam mendukung program KRPL” (Wawancara dengan Bapak Sayuti selaku tim teknis KRPL Puhjarak Pada 17 Maret 2014 Pukul 11.13 WIB).

b. Sosial

Manfaat sosial bagi masyarakat adalah terjalinnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatkan pertemuan antara peserta KRPL. Melalui KRPL ini masyarakat dapat membantu tetangga yang membutuhkan sayuran. Selain itu, manfaat dari adanya program KRPL dari sisi sosial diantaranya dapat meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan hidup keluarga, meningkatkan panganekaragaman pangan dan meningkatkan kualitas gizi keluarga. Hal tersebut seperti yang diungkapkan pula oleh Bapak Junadi dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Salah satu tujuan dari program KRPL adalah perbaikan gizi, sehingga pola konsumsi masyarakat lokasi KRPL bisa lebih baik, istilahnya B2SA (Beragam, bergizi, seimbang dan aman). Sebenarnya tujuannya itu, disamping mendukung ketersediaan pangan atau cadangan pangan

keluarga” (Wawancara dengan Bapak Juanedi dari BKP3 Kab. Kediri pada 19 Maret 2014 Pukul 13.29 WIB).

Selanjutnya Bapak Karno juga menambahkan manfaat sosial dari KRPL dalam kutipan wawancara berikut:

“Kalau manfaat dari sisi sosialnya, menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Artinya ketika tanamannya panen, kan bisa berbagi kepada tetangga” (Wawancara dengan Bapak Karno selaku PPL Desa Puhjarak Pada 7 Maret 2104 Pukul 11.13 WIB).

Selain itu fungsi sosial yang telah dilakukan dalam KRPL di Desa Puhjarak antara lain sebagai berikut:

1. Hasilnya yang berlebih dapat disumbangkan untuk kegiatan Posyandu yang ada di Desa Puhjarak.
2. Sebagai tempat pembelajaran dari Kelompok Wanita Tani penerima Program Percepatan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Kabupaten Kediri tahun 2012
3. Menerima studi banding/kunjungan dari Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIP) pada tahun 2012.
4. Sebagai bahan Kajian dari AVRDC tentang pengelolaan KBD
5. Magang Mahasiswa STPP Malang tahun 2013 (Profil KRPL Puhjarak, 2012: 5).

“Posyandu merupakan unit pelayanan terpadu dibidang kesehatan dan perbaikan gizi untuk keluarga dan anak balita. Ditempat inilah hasil pekarangan dapat disosialisasikan dan dikonsumsi. Sehingga akan mendorong keaktifan posyandu sebagai pusat layanan kesehatan dan gizi di tingkat desa” (BKP Prov. Jatim, 2012: 10). Demikian pula untuk program KRPL di Desa Puhjarak, hasil yang berlebih dari pemanfaatan pekarangan seperti telur dibagikan kepada ibu hamil dan menyusui di Posyandu Desa Puhjarak. Hal ini seperti yang terlihat dalam gambar 11 berikut ini:



Sumber: Profil KRPL Desa Puhjarak, 2012

Gambar 11 Foto pemanfaatan pekarangan untuk kegiatan posyandu

c. Ekonomi

Berdasarkan pengakuan masyarakat Desa Puhjarak, manfaat ekonomi yang dirasakan dari program KRPL diantaranya; mereka dapat mengurangi pengeluaran untuk belanja sayuran karena kebutuhan beberapa jenis sayuran dapat dipenuhi dari pekarangan sendiri. Hal ini didukung oleh pernyataan warga yang merasakan manfaatnya secara langsung, seperti dalam kutipan wawancara dengan salah satu warga Desa Puhjarak yaitu ibu Erna yang turut serta dalam program KRPL sebagai berikut:

“Manfaatnya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari mbak, jadi ya lumayan. Kalau butuh sayuran ya tinggal ambil”
(Wawancara dengan salah satu warga Desa Puhjarak yang turut serta dalam KRPL Pada 15 April 2014 Pukul 12.20 WIB).

Selain itu, manfaat yang dirasakan dari adanya program KRPL dari sisi ekonomi antara lain meningkatkan pendapatan keluarga serta menumbuhkembangkan ekonomi kreatif di setiap desa. Pernyataan mengenai manfaat KRPL untuk kebutuhan sehari-hari tersebut juga dipertegas lagi oleh Ibu Sumitri selaku Ibu PKK Desa Puhjarak yang juga ketua pelaksana KRPL Puhjarak ini, dalam kutipan wawancara berikut:

“Dengan KRPL ini, kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi mbak, uang yang awalnya buat belanja, beli sayur kan bisa ditabung untuk keperluan lain karena sayuran ndak usah beli sehingga dapat meringankan beban rumah tangga” (Wawancara dengan Ibu Sumitri selaku Ketua PKK sekaligus Ketua pelaksana KRPL Puhjarak pada 2 Mei 2014 pukul 9.42 WIB).

Implementasi program KRPL di Desa Puhjarak juga menumbuhkembangkan ekonomi kreatif di desa tersebut. Dari komoditas yang berkembang yakni budidaya ikan lele, untuk meningkatkan nilai tambah produk tersebut dilaksanakan kegiatan pengolahan lele seperti Krispi lele, Krupuk lele. Sedangkan untuk komoditas lainnya seperti tanaman obat keluarga (kunyit, kencur, jahe, dan lain-lain) dibuat aneka olahan “empon-empon”. Sedangkan untuk komoditas dari unggas seperti telur diolah menjadi telur asin asap.

Selain itu, Bapak Karno juga menjelaskan manfaat KRPL dari sisi ekonomi antara lain:

“Dari sisi ekonomi, program KRPL ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat” (Wawancara dengan Bapak Karno Di BPP Plemahan Pada 7 Maret 2014 Pukul 11.13 WIB).

Program KRPL merupakan salah satu program yang dapat mendukung ketahanan pangan minimal ditingkat rumah tangga. Oleh karena itu program KRPL ini berkaitan dengan ketahanan pangan. Kaitan program KRPL dengan ketahanan pangan antara lain sebagai berikut sebagaimana kutipan wawancara dengan Bapak Karno:

“Kaitannya KRPL dengan ketahanan pangan bisa mencukupi kebutuhan pangan dari segi protein maupun nabati, keanekaragaman pangan juga” (Wawancara dengan Bapak Karno selaku PPL Desa Puhjarak Pada 7 Maret 2014 Pukul 11.13 WIB).

Sedangkan menurut Bapak Junadi, program KRPL harapannya dapat menyediakan kebutuhan pangan tingkat rumah tangga seperti dalam kutipan wawancara berikut:

“Ketahanan pangan tidak bisa hanya dari BKP3 saja tapi harus bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Menyatukan persepsi untuk mencapai sinergitas. Masalah ketahanan pangan sulit mengontrol distribusinya. Kalau ada KRPL ini harapannya dapat menyediakan kebutuhan pangan minimal tingkat rumah tangga” (Wawancara dengan Bapak Junadi dari BKP3 Kab. Kediri Pada 12 November 2013 Pukul 10.28 WIB).

Bapak Kepala Desa Puhjark juga menambahkan bahwa KRPL ini dapat menunjang ketahanan pangan, seperti yang disampaikan beliau dalam kutipan wawancara berikut:

“KRPL ini dikatakan dapat menunjang ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari” (Wawancara dengan Bapak Sugiyo selaku Kepala Desa Puhjark serta penanggungjawab program KRPL di Puhjark pada 2 Mei 2014 pukul 10.21).

Berdasarkan pemaparan penyajian data diatas dapat diketahui bahwa implementasi program KRPL khususnya di Desa Puhjark bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di desa tersebut. Manfaatnya dapat dirasakan baik dari sisi organisasi, sosial, maupun ekonomi. Dari sisi organisasi dapat memberdayakan ibu-ibu rumah tangga Desa Puhjark yang menjadi sasaran. Selain itu dapat menumbuh kembangkan KBD dan sarana penunjang lainnya. Dari sisi sosial, manfaat yang dirasakan antara lain terjalinnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat, meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan hidup keluarga, meningkatkan penganekaragaman pangan serta meningkatkan kualitas gizi keluarga. Selain itu dari hasil KRPL yang berlebih bisa

disumbangkan untuk kegiatan posyandu. Adapun manfaat ekonomi yang dirasakan antara lain mereka dapat mengurangi pengeluaran untuk belanja sayuran, meningkatkan pendapatan keluarga serta dapat menumbuhkembangkan ekonomi kreatif yang ada di desa tersebut. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa secara garis besar implementasi program KRPL bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Puhjarko terutama dalam mencukupi kebutuhan pangan keluarga.



C. ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN

1. Peran dan Sinergitas *stakeholder* dalam mendukung keberlanjutan

Implementasi program KRPL:

a. Implementasi program KRPL di Desa Puhjark

Menurut Edward III dan Ira Sharkansky menyatakan bahwa kebijakan publik adalah *“is what governments say and do, or do not do. It is the goals or purposes of government programs”* (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijaksanaan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah) (Islamy, 2009: 18). Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik itu berupa sasaran atau program-program pemerintah. KRPL merupakan program pemanfaatan pekarangan sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka pemanfaatan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan. Program tersebut yang berdasarkan landasan hukum; Perpres Nomor 22 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP); Intruksi Presiden; Permentan Nomor 43/Permentan/ OT.140/10/2009; Pergub Jatim Nomor 71 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan pangan.

Implementasi dari program KRPL di Desa Puhjark ini merupakan program yang dilaksanakan oleh berbagai satker terkait. Hal ini karena, program KRPL sebagai program terintegrasi dengan berbagai sektor untuk mencapai ketahanan pangan. Dimana dalam implementasinya melibatkan aktor implementasi dari tingkat provinsi hingga tingkat desa. Hal ini seperti

yang dikemukakan Van Meter dan Van Hom (1975) dalam Wahab (2004: 65) yang menyebutkan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Implementasi program KRPL yang ada di Desa Puhjarkar merupakan bentuk ketahanan pangan minimal di tingkat rumah tangga. Hal sebagaimana seperti yang diamanatkan dalam arah kebijakan ketahanan pangan dibidang konsumsi yang meliputi penjaminan pemenuhan kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga dalam jumlah mutu yang memadai, aman dikonsumsi dan bergizi seimbang (Dewan Ketahanan Pangan, 2011). Dari ketahanan pangan tingkat rumah tangga tidak menutup kemungkinan bisa mencukupi ketahanan pangan nasional.

Implementasi program KRPL di Desa Puhjarkar diawali pada tahun 2012 dengan melibatkan 107 kepala keluarga (KK) dari tiga dusun yakni Dusun Gebyaran, Puhrejo dan Puhjarkar. Implementasinya dimulai dengan persiapan, pembentukan kelompok, sosialisasi, penguatan kelembagaan kelompok, perencanaan, pelatihan, pelaksanaan, pembiayaan, serta monitoring dan evaluasi melibatkan semua pihak terkait baik dari tingkat provinsi hingga tingkat desa. Dalam pelaksanaan program KRPL di Desa Puhjarkar yang sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun dari tahun 2012 hingga 2014 ini. Jika dilihat dalam petunjuk pelaksanaan pengembangan program KRPL, dalam jangka waktu tiga tahun lokasi KRPL berada dalam

tahap kemandirian. Dalam tahap kemandirian, program KRPL tidak lagi mendapatkan dana bantuan stimulan dari pemerintah melainkan masyarakat sendiri yang harus berusaha swadaya agar program terus berlanjut.

Dalam tahap kemandirian sebagaimana yang dijelaskan dalam petunjuk pelaksanaan pengembangan KRPL yang diterbitkan oleh BKP Provinsi Jawa Timur, pemerintahan provinsi tidak lagi memberikan bantuan stimulan, dan kebutuhan modal untuk pengembangan usahanya akan difasilitasi untuk menjalin hubungan dengan lembaga perbankan (khususnya Bank Umum Provinsi Jawa Timur) (Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2014: 20-22). Namun melihat kondisi dilokasi penelitian, pada kenyataannya implementasi program KRPL belum berada pada tahap ini. Pada saat ini, jika melihat kondisi di lapangan, implementasi program KRPL masih tergolong pada tahap kedua yakni pengembangan dan pemanfaatan. Hal ini dilihat dari pemanfaatan hasil pekarangannya masih sekedar untuk konsumsi pangan keluarga, diolah menjadi pangan olahan, maupun disumbangkan ke posyandu. Namun belum ada usaha fasilitasi dengan lembaga perbankan dari UMKM Jawa Timur.

Jika melihat data dilapangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa antara tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebut *implementation gap* sebagaimana diungkapkan oleh Andrew Dunsire yang dikutip oleh Wahab (2012: 128), yang bermakna bahwa dalam setiap proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa diharapkan oleh pembuat

kebijakan dengan apa yang nyatanya dicapai sebagai hasil atau kinerja dari pelaksana kebijakan. Sedangkan besar kecilnya perbedaan tersebut, tergantung pada yang apa oleh Walter Williams yang dikutip oleh Wahab (2012: 128) disebut sebagai *implementation capacity* dari organisasi/ aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan sedemikian rupa, sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai.

Dalam perjalanannya, implementasi program KRPL di Desa Puhjark tidak berjalan dengan lancar dan rentan keberlanjutannya. Hal ini nampak pada adanya beberapa komoditas yang kurang berkembang dengan baik seperti komoditas sayuran musiman dan unggas. Namun disisi lain, terdapat komoditas yang berkembang pesat yaitu komoditas ikan lele bahkan sampai membentuk kelompok ikan dengan nama “Gebyar Mina Lestari”. Sehingga program KRPL yang ada di Desa Puhjark ini, memang berlanjut namun keberlanjutannya belum optimal.

b. Peran dan sinergitas *stakeholders* dalam mendukung keberlanjutan implementasi program KRPL

Penunjang keberlanjutan implementasi program KRPL dilapangan adalah keberadaan *stakeholders* mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa. Program ini merupakan kegiatan lintas sektoral yang melibatkan beberapa sektor terkait. Sehingga *stakeholders* perlu berkoordinasi dan bersinergi dalam menumbuhkembangkan RPL-RPL

yang ada. Masing-masing peran dan fungsinya sudah ditetapkan. Pada tahap awal KRPL diinisiasi oleh BPTP Jawa Timur, kemudian pada tahap berikutnya pengembangannya diserahkan pada *stakeholders* tingkat provinsi (Dinas pertanian dan Badan Ketahanan Pangan).

Menurut Edward dalam Nugroho (2012, 693), “agar implemnatsi kebijakan berjalan efektif maka perlu memperhatikan empat (4) isu pokok yaitu: *comunication, resource, dispossession or attitudes* dan *bureaucratics structures*”. Oleh karena itu, agar implementasi program KRPL di Desa Puhjark ini berjalan efektif juga perlu memperhatikan empat isu tersebut. Isu yang pertama yakni komunikasi, dalam implementasi program KRPL Desa Puhjark komunikasi yang dilakukan sudah melibatkan *stakeholders*. Bentuk komunikasinya pada awal implementasi berupa kegiatan sosialisasi, pelatihan, pertemuan berkala maupun kegiatan penunjang lainnya yang dilakukan oleh pihak BPTP, BKP3, BPP Plemahan kepada ibu-ibu PKK selaku pelaksana dan ibu-ibu rumah tangga pelaku RPL yang ada di Desa Puhjark. Selanjutnya, setelah program berjalan, komunikasi yang dilakukan berupa pertemuan-pertemuan rutin PKK yang didalamnya membahas mengenai masalah-masalah yang terdapat dalam program-program yang ada di desa tersebut. Namun berdasarkan data di lapangan dan wawancara dengan beberapa ibu-ibu rumah tangga sasaran yang ada di desa tersebut tidak semuanya mengikuti sosialisasi atau perkumpulan-perkumpulan KRPL maupun kegiatan penunjang KRPL. Padahal kegiatan tersebut untuk memberikan pemahaman kepada mereka agar lebih

mengerti mengenai KRPL hingga pada akhirnya tertarik melakukan kegiatan RPL. Berdasarkan komunikasi maupun koordinasi yang telah dilakukan sejauh ini dalam pelaksanaan KRPL di Puhjarak, *stakeholders* terkait sudah melaksanakan komunikasi maupun koordinasi satu sama lain namun hal ini belum maksimal karena belum seluruh pelaku RPL sasaran terlibat sehingga dari RPL-RPL yang ada belum sepenuhnya membentuk kawasan RPL dan keberlanjutan komoditas tertentu belum optimal.

Isu yang kedua yakni ketersediaan dengan *resource*, yang berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. Dalam hal ini berkenaan dengan kecakapan *implementor* untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Dari segi pemahaman tentang konsep KRPL, sebenarnya hampir sama. Namun pada kenyataannya dilapangan, implementasi program KRPL tersebut berjalan sesuai dengan kondisi yang ada diwilayah tersebut. Sehingga jika melihat kondisi di Desa Puhjarak adalah komoditas ikan yang paling berkembang dibandingkan komoditas lainnya, maka *implementor* yang ada terus mengembangkan komoditas tersebut sehingga dapat berkembang pesat. Kecakapan dari pendamping maupun perangkat desa tersebut sebenarnya sudah cukup cakap dalam ilmu pengetahuan dan pengalamannya. Dilain sisi apabila, dari pihak PPL maupun pihak desa kurang cakap terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan KRPL dilapangan, mereka melakukan koordinasi dengan dinas atau instansi terkait. Namun dalam program ini juga melibatkan pelaku RPL yaitu ibu-ibu rumah tangga. Dimana daya tangkap

masing-masing pelaku RPL terhadap yang disampaikan dalam sosialisasi, pelatihan maupun kegiatan komunikasi lainnya berbeda-beda sehingga pemahanan yang didapat pun berbeda. Apalagi, ada beberapa ibu-ibu yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi atau semacamnya sehingga mereka belum memahami makna penting dan pelaksanaan KRPL. Jika dilihat dari peran dan fungsinya *stakeholders* dalam pedoman petunjuk pelaksanaan pengembangan KRPL yang ada sudah melaksanakan peran dan fungsinya namun belum maksimal hal ini terlihat dari belum terbentuknya suatu kawasan dari RPL-RPL yang ada sehingga dapat dikatakan keberlanjutan implementasinya juga masih belum optimal.

Isu yang ketiga yakni *disposition*, kesediaan dan komitmen implementor (*stakeholders*). Sikap juga merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan. Dimana sikap menunjukkan bahwa terdapat kesediaan atau ketidaksediaan *stakeholders* agar implementasi dapat berjalan efektif. Jika *stakeholders* mendukung kebijakan tersebut maka akan timbul komitmen yang kuat sehingga kemungkinan besar kebijakan tersebut dapat terimplementasi dengan baik. Berdasarkan data dilapangan, *implementor* dari pihak desa bersedia bahkan mendukung program KRPL ini, hal tersebut terlihat dari penerimaan pihak desa atas program KRPL ini dan juga bersedianya mereka menjalankan program ini. Kesediaan implementor ini juga harus didukung partisipasi masyarakat desa tersebut, karena tanpa partisipasi masyarakat tersebut program ini tidak akan berjalan dengan baik. Awalnya antusias warga terhadap program ini sangat baik,

namun seiring berjalannya waktu, berpartisipasi dalam implementasi program KRPL menurun yang terlihat dari belum terbentuknya kawasan seperti yang diharapkan.

Sedangkan jika dilihat dari komitmen *stakeholders*, berdasarkan data dilapangan masih kurang. Hal ini nampak dari kurang berlanjutnya komoditas tertentu seperti hortikultura maupun ternak unggas yang masih perlu dicari solusinya buat pengembangan selanjutnya. Meskipun begitu, komitmen mereka dalam pengembangan komoditas yang berkembang yakni ikan lele sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya kelompok ikan yang ada serta dengan kemampuan teknologi yang cukup baik.

Dalam implementasi program KRPL struktur organisasinya terdiri dari berbagai sektor bahkan lintas sektor dari tingkat provinsi hingga tingkat desa sudah diatur dan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan isu keempat yang perlu diperhatikan agar implementasi berjalan efektif menurut Edward III adalah struktur birokrasi. Berjalannya waktu hingga kurang lebih dari tiga tahun ini, fungsi dalam monitoring maupun evaluasi dalam program KRPL di Desa Puhjarak ini terlihat masih kurang, hal ini nampak dari belum membentuknya kawasan secara menyeluruh sesuai dengan sasaran KRPL bahkan pengembangan sasaran KRPL yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pemaparan analisis mengenai implementasi program KRPL serta peran dan sinergitas *stakeholders* dalam mendukung

keberlanjutan implementasi tersebut dapat diketahui bahwa implementasi pada tahun ketiga (tahap kemandirian) peran dan sinergitas yang dilakukan dalam mendukung keberlanjutannya masih kurang. Hal ini nampak dari adanya komoditas yang sudah ditetapkan namun kurang berkembang yakni komoditas hortikultura dan unggas. Namun disisi lain, komoditas ikan leleanya berkembang pesat. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi lagi agar komoditas yang sebelumnya kurang berkembang menjadi lebih berkembang seperti perkembangan ikan lele sehingga keberlanjutan implementasi pada tahap kemandirian ini menjadi optimal dan membentuk kawasan RPL.

Keterpaduan antar *stakeholders* dalam mengawal pelaksanaan KRPL masih perlu ditingkatkan lagi yang didasarkan pada tupoksinya masing-masing agar program KRPL lancar dan sukses. Petugas lapangan pendamping KRPL yang merupakan motor penggerak harus kreatif, inovatif, dan komunikatif. Para *local champion* yang juga merupakan motor penggerak paling depan dalam memperlancar program KRPL masih perlu didukung eksistensinya. Menumbuhkan motivasi untuk mau menanam, memelihara, dan mengkonsumsi hasil kepada para pelaku RPL harus disebarkan secara terus menerus.

2. Faktor Pendukung dan penghambat dalam keberlanjutan program

KRPL:

a. Faktor Pendukung

Implementasi program KRPL di Desa Puhjarak dalam keberlanjutannya juga tidak lepas dari faktor yang menjadi pendukung program ini. Diantaranya faktor yang menjadi pendukung antara lain adalah:

- 1) Tanah yang subur dapat mendukung berlanjutnya implementasi program KRPL.

Hal ini karena dalam implementasi program terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektifitasnya. Seperti yang dikemukakan oleh Grindle yang dikutip oleh Nugroho (2012: 690-691) bahwa efektifitas atau keberhasilan suatu implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dimana dikatakan bahwa dalam isi kebijakan yang didalamnya meliputi sumber daya yang terlibat dapat mempengaruhi efektifitas implementasi. Dalam hal ini, tanah yang subur merupakan sumber daya yakni sumber daya alam yang dapat mendukung implementasi program KRPL ini sehingga kelestarian tanaman pangan yang dibudayakan dapat berkembang dengan baik dan menjadikan implementasi program KRPL tetap berlanjut.

2) Potensi pekarangan yang masih cukup luas.

Pekarangan juga masih merupakan sumber daya alam. Seperti yang dikemukakan diatas bahwa yang dapat mempengaruhi efektifitas atau keberhasilan implementasi program diantaranya karena adanya sumber daya yang terlibat. Keberadaan potensi pekarangan yang masih cukup luas dapat pula mendukung implementasi program terus berlanjut. Lahan pekarangan yang masih cukup luas dapat dimanfaatkan untuk komoditi yang lebih banyak lagi. Pada akhirnya dengan potensi pekarangan yang luas dan kemudian dimanfaatkan secara optimal dalam penumbuhkembangan RPL, dengan begitu dapat membentuk kawasan dari RPL-RPL yang ada.

3) Sarana dan prasarana yang mendukung.

Menurut Edward III yang dikutip oleh Nugroho (2012: 693) disebutkan bahwa salah satu yang menyebabkan implementasi sebuah program dapat berjalan efektif adalah adanya kesediaan *stakeholders* dalam melaksanakan implementasi program. Dalam hal ini, kesediaan *stakeholders* khususnya di Desa Puhjark dengan terbuka menerima program KRPL ini. Misalnya sarana yang cocok untuk di tumbuh kembangkan di lokasi Desa Puhjark adalah ikan, maka perlu dipilih jenis ikan yang memang benar-benar sesuai. Setelah sarana sesuai perlu ditunjang prasarana yang memadai seperti bentuk kolamnya. Apabila sarana dan prasarana yang disediakan sudah cocok peluang keberhasilannya sangat tinggi. Hal ini dapat diketahui dari

berkembangnya komoditas ikan yakni ikan lele di Desa Puhjarak. Selain dari swadaya masyarakat sendiri, sarana prasarana dalam implementasi program KRPL yang ada di Desa Puhjarak juga mendapat bantuan dari pemerintah provinsi. Oleh sebab itu ketersediaan sarana dan prasarana yang tepat dan sesuai dengan kondisi di lapangan yang akan mempermudah pelaksanaan program.

- 4) Kelembagaan yang ada di desa Puhjarak juga mendukung dalam keberlanjutan implementasi program tersebut.

KBD atau kebun bibit desa merupakan bagian kunci dari program penumbuhan RPL-RPL di pedesaan maupun perkotaan. Selain itu, diungkapkan pula oleh Grindle yang dikutip oleh Ali (2006: 64) bahwa dalam implementasi suatu program diantaranya dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dimana dalam konteks implementasi, lembaga juga menjadi salah satu pengaruh dalam implementasi program. Dalam program KRPL di Desa Puhjarak pada tahap awal program ini disosialisasikan, kelembagaan KDB di rencanakan secara baik keberadaannya. Dimana keberadaan KBD di fasilitasi oleh Perangkat Desa setempat dengan memanfaatkan lahan Desa. Penyediaan fasilitas yang berupa lahan Desa untuk KBD masih belum cukup untuk memperlancar program KRPL tanpa di dukung struktur kelembagaan yang baik. Maka untuk mewujudkan KBD yang tangguh yaitu dapat melayani kebutuhan bibit tanaman yang diperlukan oleh seluruh para pelaku RPL

dibentuklah pengelolanya. KBD sayur yang ada di Puhjarak dikelola oleh Bapak Subur. KBD buah dikelola oleh Bapak Sayuti. Sedangkan KBD ikan dikelola oleh Bapak Suwanto.

5) Program KRPL merupakan program pemerintah.

Program KRPL merupakan program yang sudah dijalankan sejak tahun 2010. Program tersebut diawali dengan melakukan pembinaan di 2000 desa dan diharapkan dapat dilaksanakan diseluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia (Sekertaris Jendral Pertanian, 2013: 1). Program KRPL mengacu pada intruksi presiden yang mengatakan bahwa ketahanan pangan nasional harus dimulai dari ketahanan pangan keluarga atau rumah tangga. Sebagai program pemerintah, program KRPL tentunya mendapat dukungan penuh dari pemerintah sehingga hal ini dapat mendukung program KRPL terus berlanjut. Sebagaimana pendapat Grindle yang dikutip oleh Ali (2006: 64) bahwa yang dapat mempengaruhi implementasi sebuah program diantaranya adalah kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. Dalam program KRPL ini, tentunya pemerintah mempunyai kuasa untuk menginstruksikan program ini dapat di implementasikan di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia sehingga dengan begitu program ini dapat terus berlanjut jika melihat manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pendukung dalam keberlanjutan implementasi program KRPL di desa tersebut antara lain

karena adanya tanah yang subur, potensi pekarangan yang masih cukup luas, sarana dan prasarana serta kelembagaan yang mendukung, dan juga KRPL merupakan program pemerintah yang diharapkan dapat dilaksanakan secara nasional tidak terkecuali di Desa Puhjarak.

b. Faktor Penghambat

Faktor yang menjadi penghambat dalam keberlanjutan implementasi program KRPL di Desa puhjarak antara lain:

1) Adanya permasalahan teknis yang belum dapat diselesaikan.

Permasalahan teknis yang dimaksudkan adalah penanganan terhadap penumbuhan RPL khususnya komoditas hortikultura yang terganggu ketika musim kemarau. Misalnya saja ketika musim kemarau panjang, hal ini menyebabkan tanaman banyak yang layu bahkan tidak dapat tumbuh. Apalagi tanaman yang dibudidayakan sebagian besar adalah tanaman musiman. Hal ini juga menyebabkan dari RPL-RPL yang ada belum membentuk kawasan RPL. Permasalahan teknis lainnya yakni serangan hama maupun ayam yang mengganggu penumbuhkembangan RPL. Karena penumbuhan RPL di Desa Puhjarak diusahakan organik sehingga unsur kimiawinya dikurangi, sehingga mudah terserang hama. Oleh sebab itu, perlu penanganan khusus.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nugroho (2012: 711) bahwa dalam implementasi kebijakan atau program dalam konteks

manajemen berada dalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Dalam implementasi program KRPL ini, ketika kebijakan sudah ada, dan sudah diorganisasikan, dan pelaksanaan kepemimpinannya pun juga sudah dilaksanakan. Namun dalam pengendalian pelaksanaannya masih kurang. Hal ini terlihat dari masih adanya permasalahan teknis dalam program KRPL yang belum terselesaikan. Permasalahan tersebut tidak dapat dibiarkan secara berlarut-larut. Apabila dibiarkan akan mengganggu proses kelancaran implementasi pelaksanaan KRPL. Selain dari itu juga selalu melakukan komunikasi secara terstruktur antar pelaku RPL-RPL yang ada di kawasan tersebut.

2) Motivasi pelaku RPL menurun

Stakeholders yang terlibat dalam program KRPL yaitu petugas dari instansi terkait dari tingkat provinsi dan kabupaten, petugas pendamping di lapangan, *local champion*, dan ibu-ibu para pelaku RPL setempat. Keempat komponen tersebut diharapkan dapat bekerjasama untuk saling melengkapi, sehingga dapat menumbuhkan KRPL yang baik. Menurut Grindle yang dikutip oleh Nugroho (2012: 691) mengenai pemahaman komprehensifnya terhadap konteks kebijakan menyangkut implementor, penerima

implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan dapat mempengaruhi efektifitas implementasi. Dalam implementasi program KRPL dapat diketahui bahwa *stakeholders* yang belum besinergi secara optimal dapat mempengaruhi keefektifan implementasi program tersebut. Kondisi ini akan berdampak terhadap penampilan implementasi KRPL. Banyak faktor yang menyebabkan belum optimalnya sinergi antar *stakeholders*. Hal ini bisa diakibatkan karena tugas dan fungsi mereka khususnya untuk monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal. Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi menyebabkan permasalahan yang di lapangan belum terselesaikan sehingga hal ini juga menjadi salah satu penyebab menurunnya motivasi pelaku RPL.

Selain itu, waktu yang tidak cukup karena mempunyai lahan yang luas selain di pekarangan dan pengetahuan terbatas terhadap teknologi pertanian tertentu menyebabkan motivasi pelaku RPL menurun. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para pelaku RPL tampaknya mempunyai potensi menghambat yang besar dalam menumbuhkembangkan RPL-RPL. Kendala ini sulit untuk diatasi karena waktu yang dimiliki pelaku RPL tercurah seluruhnya untuk keperluan di luar yang berhubungan dengan berlangsungnya kehidupan. Sebagaimana yang juga disebutkan sebelumnya bahwa penerima

implementasi dalam hal ini pelaku RPL (ibu-ibu rumah tangga) dan kondisi-kondisi sumber daya dapat mempengaruhi efektifitas implementasi suatu program. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa motivasi pelaku RPL yang semakin lama semakin menurun dapat mempengaruhi berjalannya implementasi program tersebut.

Alasan yang paling mendasar adalah mencoba hal baru (RPL) yang di luar kebiasaan bukan pekerjaan mudah, karena nilai kepastian yang didasarkan pada pengalaman tidak ada yang bisa menjamin. Dari pada menemui kegagalan lebih baik menekuni pekerjaan yang sudah lama memberikan hasil. Langkah untuk menyikapi pelaku RPL yang demikian antara lain; memberikan pemahaman secara baik mengenai pentingnya RPL, diberikan kesempatan untuk *learning by process*, secepat mungkin menunjukkan nilai manfaatnya, dan pendampingan secara intensif. Apabila upaya-upaya tersebut telah dilakukan, selanjutnya dilakukan evaluasi mengenai keberlanjutan implementasinya. Tanpa melakukan tahapan yang demikian akan sulit untuk menentukan sikap selanjutnya.

Motivasi para pelaku KRPL yang menurun merupakan salah satu kendala dalam penumbuhan RPL. Indikator yang paling mudah diketahui adalah kurang semangatnya dalam melakukan aktivitas yang terkait dengan penumbuhkembangan RPL. Gejala ini muncul karena ada beberapa faktor yang memicu misalnya tidak sesuai harapan dan

hasil. Pada tahap awal menghendaki jenis tanaman tertentu akan tetapi yang diperoleh tanamannya berbeda. Belum diperoleh manfaat yang optimal baik dari aspek kecukupan kebutuhan rumah tangga dan materi ekonomi. Kemampuan yang masih kurang untuk penguasaan teknologi maupun non-teknologi dalam menghadapi kendala-kendala penumbuhan RPRL .

Pengetahuan yang masih kurang para pelaku RPL merupakan hal yang sangat wajar, karena program ini merupakan hal baru untuk para ibu-ibu rumah tangga. Pada tahap awal ibu-ibu tidak berpikir tentang cara bertanam yang baik untuk berbagai jenis tanaman pada saat ini harus memikirkan hal tersebut. Perubahan perilaku dari tidak mengetahui teknologi cara tanam menjadi harus mengetahui teknologi cara tanam inilah yang dimaksud dengan pengetahuan yang terbatas. Tanpa pengetahuan yang cukup dari pelaku RPL setempat akan dapat menghambat kelancaran program KRPL.

Berdasarkan pemaparan diatas, sebagai langkah antisipasi agar suatu program dapat berkelanjutan adalah para pelaku kegiatan merasa membutuhkan aktivitas yang dilaksanakan, dapat merasakan nilai manfaat dari aktivitas yang dilakukan, dan pendampingan/supervisi secara periodik. Apabila ketiga hal tersebut dapat terlaksana dengan baik di tingkat lapangan tanpa disuruh pun pelaku akan melaksanakan aktivitasnya dengan sungguh-sungguh. Karena nilai manfaat yang akan diperoleh sudah jelas dapat dirasakan. Apabila terjadi permasalahan

dengan aktivitas yang dilakukan ada kepastian untuk bertanya mencari solusinya kepada petugas. Inilah pentingnya pendampingan secara periodik dan berkelanjutan.

3. Manfaat implementasi program KRPL dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat desa Puhjarak

KRPL bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, mengurangi biaya pengeluaran rumah tangga, penambahan pendapatan keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan. KRPL sebenarnya bukan hal baru dalam masyarakat, karena praktek-praktek menanam dalam skala terbatas (dalam pot) dan banyak jenis tanaman (keragaman tanaman) sudah lama dijalankan oleh masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Hanya saja pola dan sistem pengerjaannya masih dilaksanakan secara individu rumah tangga dan belum mempertimbangkan aspek pemenuhan pangan dan gizi serta keberlanjutannya (BPTP Jatim, 2012).

a. Organisasional

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam program KRPL diatas, maka ketika melihat kondisi riil dilokasi penelitian secara organisasional, implementasi KRPL di Desa Puhjarak antara lain: PKK Desa Puhjarak sebagai pelaku dan pengelola pekarangan dapat berdaya, KBD dan sarana penunjang lainnya dapat tumbuh kembang, terjalin integrasi antara program KRPL ini dengan program lain yang ada di Puhjarak seperti posyandunya. Menurut Grindle yang dikutip oleh Ali

(2006: 64) yang menyatakan bahwa dalam implementasi suatu program diantaranya ditentukan oleh hasil dari kebijakan/ program itu sendiri yakni berupa dampak pada masyarakat serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat. Jadi dapat diketahui bahwa dari adanya program KRPL ini masyarakat Desa Puhjarak merasakan manfaatnya. Jika dilihat dari sisi organisasional program tersebut dapat meningkatkan kapasitas organisasi yang ada.

b. Sosial

Menurut Korten (1984: 300) yang dikutip Tjokrowinoto (2012: 218), paradigma *people-centered development* dalam memberikan peranan kepada individu, bukan sebagai subjek, akan tetapi sebagai pelaku (*actor*) yang menentukan tujuan yang hendak dicapai, menguasai sumber-sumber, mengarahkan proses yang menentukan hidup mereka. Implementasi program KRPL berusaha memberikan peranan kepada pelaku RPL sebagai pelaku (*actor*) yang menentukan tujuan yang hendak dicapai yang menentukan hidup mereka. Dari sisi sosial, program ini dapat menciptakan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatkan pertemuan antara peserta KRPL. Melalui KRPL ini masyarakat dapat membantu tetangga yang membutuhkan sayuran. Selain itu, dapat meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan hidup keluarga, meningkatkan penganekaragaman pangan dan meningkatkan kualitas gizi keluarga.

c. Ekonomi

Program KRPL adalah konsep penumbuhan dan pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga secara diversifikasi yang berbasis sumber daya lokal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan dalam satu kawasan (BPTP Jatim, 2012).

Jika dilihat dari sisi ekonomi, program KRPL dapat mengurangi pengeluaran untuk belanja sayuran karena kebutuhan beberapa jenis sayuran dapat dipenuhi dari pekarangan sendiri. Selain itu, dapat meningkatkan pendapatan keluarga serta menumbuhkembangkan ekonomi kreatif di Desa Puhjarak. Ekonomi kreatif yang berkembang di Puhjarak menghasilkan produk olahan lele (Kripik lele, krupuk lele), rangginang aneka macam rasa, aneka olahan “empon-empon” yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa Puhjarak. Sehingga dengan begitu, jika dilihat dari sisi ekonomi program tersebut bermanfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat Desa Puhjarak.

Berdasarkan data dilapangan maka manfaat yang dirasakan masyarakat Desa Puhjarak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Masyarakat Desa Puhjarak sejauh ini telah merasakan manfaat dari adanya implementasi program KRPL, baik itu dari sisi organisasional, sosial, maupun ekonomi. Manfaat tersebut tentunya dapat mendukung ketahanan pangan masyarakat yang ada di Desa tersebut. Dikatakan

ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup (Fardiaz,Tanpa tahun: 1). Oleh karena itu, kegiatan KRPL ini disebutkan dapat mendukung ketahanan pangan karena dengan memanfaatkan pekarangannya untuk menanam sayur-sayuran, buah-buahan maka kebutuhan pangan untuk rumah tangga/ keluarga masing-masing menjadi terpenuhi. Jika akses pangan terhadap keluarga terpenuhi sebagai bentuk pengejawantahan konsep ketahanan pangan maka ketahanan pangan nasional, bukanlah suatu hal yang tidak mungkin untuk dicapai. “Indikator terwujudnya ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, stabilitas penyediaan pangan dan akses individu dan/ rumah tangga untuk pangan” (Darmawan, 2011: 15).

Berdasarkan indikator ketahanan pangan diatas, maka dapat diketahui bahwa implementasi program KRPL khususnya di Desa Puhjarak, dapat mendukung ketersediaan pangan keluarga yang ada di Desa tersebut karena kebutuhan pangan mereka diantaranya bisa dipenuhi dari pekarangan mereka sendiri. Kemudian, penyediaan pangan mereka juga menjadi stabil karena mereka memanfaatkan pekarangan untuk kebutuhan pangan yang berkelanjutan, sehingga penyediaan pangan mereka paling tidak selalu ada. Sedangkan dengan pemanfaatan pekarangan untuk menanam kebutuhan pangan

sehari-hari berarti akses pangan terhadap masyarakat juga mudah. Apabila butuh mereka tinggal mengambil di pekarangan rumah.

Implementasi kegiatan KRPL di Desa Puhjarak dapat dikatakan mendukung ketahanan pangan masyarakat desa paling tidak ditingkat rumah tangga. Dimana ketahanan tingkat rumah tangga merupakan ketahanan paling awal untuk mencapai ketahanan pangan secara nasional. Indikator yang dilihat dari ketahanan tingkat rumah tangga pun tergolong kecil karena memang lingkupnya juga kecil. Dimana dianggap berketahanan pangan tingkat rumah tangga apabila memenuhi indikator seperti stabilitas pasokan (musiman; distribusi ketersediaan pangan pokok bulanan, dalam kg), ketersediaan (jumlah kg), aksesibilitas (biaya yang diperlukan perbulan) (Darmawan, 2011:14). Jadi jika dikaitkan lagi dengan keadaan di Desa Puhjarak maka dengan keberadaan implementasi program KRPL ini dapat mendukung ketahanan pangan dimasing-masing tingkat rumah tangga yang dapat melaksanakan program KRPL secara baik dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan fokus permasalahan, dapat dikatakan bahwa peran dan sinergitas *stakeholders* dalam mendukung keberlanjutan implementasi program KRPL yang ada di Desa Puhjarak masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat kesimpulan fokus dibawah ini:
 - a. Implementasi dari program KRPL di Desa Puhjarak dimulai pada tahun 2012 dan sampai saat ini kurang lebih berjalan pada tahun ketiga. Dimana pada tahap ketiga ini berarti berada pada tahap kemandirian. Namun jika melihat kondisi dilapangan dengan pedoman pengembangan KRPL, implementasinya belum pada tahap tersebut. Sehingga keberlanjutan implementasinya belum maksimal. Kegiatan yang dilakukan mulai dari kegiatan pokok, pendukung hingga penunjang.
 - b. Jika melihat peran dan fungsi masing-masing *stakeholders* dalam program tersebut maka dapat dikatakan bahwa *stakeholders* sudah menjalankan peran dan fungsi mereka masing-masing namun belum

optimal sehingga sinergitas antar *stakeholders* pun belum optimal dalam mendukung keberlanjutan program tersebut.

2. Faktor yang mempengaruhi dalam keberlanjutan implementasi program KRPL di desa Puhjarak antara lain:

- a. faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya antara lain berupa tanah yang subur dan potensi pekarangan yang ada di wilayah tersebut, sarana dan prasarana, kelembagaan dan juga karena KRPL merupakan program pemerintah.
- b. faktor yang menghambat antara lain berupa permasalahan teknis yang belum terselesaikan serta motivasi pelaku rpl yang menurun.

3. Berdasarkan manfaat yang telah dirasakan pelaku RPL Desa Puhjarak baik itu dari organisasional, sosial maupun ekonomi dapat mendukung ketahanan pangan minimal ditingkat rumah tangga di desa tersebut. Hal tersebut nampak dalam kesimpulan fokus dibawah ini:

- a. Implementasi program KRPL di Desa Puhjarak dari sisi organisasi manfaatnya antara lain: PKK Desa Puhjarak sebagai pelaku dan pengelola pekarangan dapat berdaya, KBD dan sarana penunjang lainnya dapat tumbuh kembang, terjalin integrasi antara program KRPL ini dengan program lain yang ada di Puhjarak seperti dengan kegiatan posyandu.

- b. Sedangkan dari sisi sosial manfaatnya antara lain; terjalannya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatkan pertemuan antara peserta KRPL. Melalui KRPL ini masyarakat dapat membantu tetangga yang membutuhkan sayuran. Selain itu, juga dapat meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan hidup keluarga, meningkatkan penganekaragaman pangan dan meningkatkan kualitas gizi keluarga.
- c. Untuk sisi ekonomi, dapat mengurangi pengeluaran untuk belanja sayuran karena kebutuhan beberapa jenis sayuran dapat dipenuhi dari pekarangan sendiri.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan serta faktor penghambat dalam implementasi program KRPL di Desa Puhjark maka peneliti memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Perlu melakukan pemilihan jenis tanaman yang tidak perlu pemeliharaan intensif untuk menghadapi permasalahan tanaman musiman pada saat musim kemarau.
2. Diperlukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi pelaku RPL dalam menumbuhkembangkan RPL, seperti melakukan perlombaan KRPL setiap dusun di tingkat desa untuk mencari penumbuhkembangan KRPL yang terbaik.

3. Bagi *stakeholders* terkait, diperlukan pemahaman masing-masing tugas dan fungsinya yang telah ditentukan agar dapat menumbuhkan implementasi program KRPL yang berkelanjutan.
4. Bagi pemerintah kabupaten hingga desa, perlu memberikan pemahaman secara baik mengenai pentingnya RPL bagi pelaku RPL serta motivasi dengan memberikan contoh keberhasilan RPL dan memberikan kesempatan untuk *learning by process*.
5. Bagi pemerintah kabupaten hingga desa, perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar dapat mengetahui perkembangan keberlanjutan implementasi program KRPL dan apabila terdapat permasalahan dapat diidentifikasi dan ditemukan solusinya sesegera mungkin.
6. Bagi pemerintah kabupaten hingga desa khususnya PPL terkait, perlu memberikan pendampingan secara intensif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku RPL melalui komunikasi dua arah, serta intensif.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku:

- Ali, Muhammad. 2006. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lengg Printika.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Darmawan, Dwi Putra. 2011. *Ketahanan Pangan Rumah Tangga Dalam Konteks Pertanian Berkelanjutan*. Bali: Udayana University Press.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara (Edisi 2)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media komputindo
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Givernance*. Refika Aditama. Bandung.
- Sugihono, Chris, dkk., (2012). *Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Perkembangannya di Maluku Utara*. BPTP Kementrian Pertanian.
- Suryana, Achmad. 2003. *Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA
- Soetrisno, Loekman. 2002. *Paradigma Baru Pembangunan Pertanian Sebuah Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yuwono, Triwibowo. 2011. *Pembangunan Pertanian: Membangun Kedaulatan Pangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sumber dari Jurnal:

Anderson, Molly D., & Anne C. Bellows. 2012. Introduction to symposium on food sovereignty: expanding the analysis and application. *Agric Hum Values* (2012) 29:177–184.

Hanjra, Munir A., & M. Ejaz Qureshi. 2010. Global water crisis and future food security in an era of climate change. *Food Policy* 35 (2010) 365–377.

Shetty, Prakash. 2006. Achieving the goal of halving global hunger by 2015. *Proceedings of the Nutrition Society* (2006), 65, 7–18.

Sumber Dokumen yang Dipublikasikan:

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim. 2012. Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (Rumah Hijau Plus-Plus).

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim. 2014. Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Plus Plus Jawa Timur Tahun 2014.

BPTP Jatim. 2012. Serba Serbi Kawasan Rumah Pangan Lestari Di Jawa Timur.

BPS. 2010. Perkembangan Jumlah Penduduk Indonesia.

Dewan Ketahanan pangan. 2011. Kebijakan umum ketahanan pangan (KUKP) 2010-014.

Fardiaz, Dedi. Tanpa Tahun. Membangun Kemandirian Pangan Di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.

Kementrian Pertanian. 2012. Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian. 2013. Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014.

Saliem, Handewi Purwati. 2011. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL): Sebagai Solusi Pemantapan Ketahanan Pangan. Makalah yang

disampaikan pada Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (KIPNAS), di Jakarta tanggal 8-10 November 2011.

Tim Peneliti Pangan IPSK-LIPI. 2001. Penerapan Kebijakan Ketahanan Pangan Bagi Pencapaian Kedaulatan Pangan. Makalah yang disampaikan pada Kongres KIPNAS, diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tanggal 7-9 November 2001 di Hotel Bidakara, Jakarta.

UU Nomor 7 Tahun 1996 Mengenai Pangan.

UU Nomor 18 Tahun 2012 mengenai Pangan.

Sumber Dari Web:

Malau. 2013. *Pertumbuhan Penduduk dan Pangan Dalam Dua Teori*. Diakses pada 18 Desember 2013, dari situs:
<http://analisadaily.com/news/24521/pertumbuhan-penduduk-dan-pangan-dalam-dua-teori/>.

Musta'idah, Alina. 2011. *Dikonversi ke Industri, Lahan Pertanian di Jawa susut 600 ha*. Diakses pada 21 November 2013, dari situs:
<http://investordaily/konversi-ke-industri.htm>.

Ruslan, Kadir. 2011. *Indonesia, Negara Agraris Pengimpor Pangan*. Diakses pada 27 Desember 2013, dari situs:
<http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2011/08/15/indonesia-negara-agraris-pengimpor-pangan-386787.html>.

Sekretaris Jendral Pertanian. 2013. *Mentan: KRPL Penting Bagi Pemenuhan Gizi dan Tambahan Pendapatan Keluarga*. Diakses pada 18 Desember 2013, dari situs:
<http://www.pertanian.go.id/news/detail.php?id=1152&awal=0&page=&ku>
[nci](http://www.pertanian.go.id/news/detail.php?id=1152&awal=0&page=&ku).

Wahyuni, Nursefi Dwi. 2013. *Masihkah Indonesia Disebut Negara Agraris?*. Diakses pada 18 Desember 2013, dari situs:
<http://bisnis.liputan6.com/read/682355/video-masihkah-indonesia-disebut-negara-agraris>.

LAMPIRAN 1

DOKUMENTASI KEGIATAN KRPL DI DESA PUHJARAK



Kegiatan Rapat KRPL dan kunjungan Istri wakil menteri pertanian di Desa Puhjarak (Sumber: Dokumentasi BPP Plemahan)



Kunjungan di kolam ikan lele dan di KBD Desa Puhjarak (Sumber: Dokumentasi BPP Plemahan).

LAMPIRAN 2

INTERVIEW GUIDE

Dengan Bapak Karno selaku PPL Plemahan Kabupaten Kediri

1. Apa makna Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?
2. Bagaimana perencanaan dari program KRPL?
3. Apa kaitannya program, KRPL dengan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)?
4. Apa bedanya makna pekarangan dan halaman?
5. Apa latarbelakang alasan KRPL ditempatkan di Puhjarak? Dan kenapa hanya di tiga dusun dari total dusun di Puhjarak?
6. Mengenai rencana pengembangan KRPL, pada tahap I dan II selama ini, apakah sudah terlaksana? Dan Bagaimana pengembangannya?
7. Siapa saja sasaran dari KRPL? Kenapa jumlah yang ikut disetiap dusun berbeda?
8. Sumber dananya dari mana saja? Kemudian, maksud dari sumber dana dari gapoktan maupun swadaya itu seperti apa?
9. Mengenai visi KRPL Puhjarak adalah untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan. apakah konsumsi pangan di desa Puhjarak masih rendah atau bagaimana?
10. Faktor atau alasan apakah yang digunakan dalam penetapan strata dalam KRPL?
11. Apakah ada kerjasama antar dinas? Jika ada seperti apa kerjasamanya? Serta komunikasinya seperti apa?

12. Bagaimana proses atau tahapan dari pelaksanaan program KRPL ini?
13. Siapa saja stakeholder yang berperan? Bagaimana masing-masing perannya?
Dan bagaimana sinergitas antar stakeholder tersebut?
14. Bagaimana manfaat dari implementasi KRPL ini dari sisi organisasi, sosial maupun ekonomi?
15. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan program KRPL?
16. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan program KRPL?
17. Apa manfaat yang diharapkan dengan adanya program KRPL?
18. Selama ini, manfaat apa yang telah dirasakan oleh masyarakat?
19. Sebagai pendamping penyuluh lapangan (PPL), pendampingan seperti apa yang anda lakukan?
20. Menurut anda, bagaimana kaitannya program KRPL ini dengan ketahanan pangan?
21. Menurut anda, apa indikator dari keberhasilan program KRPL ?
22. Pengelolaan KBD di Puhjarak ini seperti apa?
23. Siapa saja stakeholder ditingkat desa? Bagaimana komunikasinya diantara para stakeholder tersebut? Serta bagaimana kerjasama diantara stakeholder tersebut?
24. Alasan memilih stakeholder ditingkat desa atas dasar apa?

Dengan Bapak Sayuti selaku Pelaksana teknis di desa Puhjarak

1. Apa makna KRPL sepengetahuan bapak?
2. Apa yang anda ketahui tentang makna pekarangan dan halaman?

3. Mengapa desa Puhjarak dijadikan sebagai tempat program KRPL? Dan kenapa hanya di tiga dusun? Atas dasar apa pemilihan tiga dusun tersebut?
4. Apakah anda mengetahui mengenai rencana pengembangan KRPL di desa Puhjarak ini? Serta bagaimnana perkembangannya?
5. Siapa saja sasaran dari program KRPL?
6. Dari mana saja sumber dana program KRPL ini?
7. Bagaimana tujuan program KRPL ini?
8. Siapa saja tokoh-tokoh yang berperan di tingkat desa Puhjarak ini? Bagaimana kerjasama diantara tokoh tersebut? Serta seperti apa komunikasi diantara mereka?
9. Bagaimana proses dari pelaksanaan program KRPL?
10. Bagaimana anda mengetahui program KRPL ini?
11. Apakah manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya program KRPL ini dari sisi organisasi, sosial maupun ekonomi?
12. Apasaja faktor pendukung dalam pelaksanaan KRPL?
13. Apasaja faktor pendukung dalam pelaksanaan KRPL?
14. Tugas anda sebagai apa?
15. Menurut anda, apakah program KRPL ini mendukung ketahanan pangan?
16. Bagaimana mengenai pengelolaan kebun bibit desa (KBD)?
17. Bagaimana pelaksanaan KRPL di Desa Puhjarak dari tahun ketahun hingga tahun ini?

Dengan Bapak Junaedi selaku Tim Teknis dari BKP3 Kab. Kediri

1. Apakah makna dari program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)?

2. Apakah yang melatarbelakangi munculnya program KRPL?
3. Apa saja dasar hukum dari Program KRPL?
4. Apa tujuan program KRPL?
5. Apakah perbedaan makna antara pekarangan dengan halaman?
6. Apa manfaat yang diharapkan dari program KRPL dari sisi organisasi, sosial maupun ekonomi?
7. Siapa saja sasaran program KRPL?
8. Sejak kapan program KRPL dijalankan?
9. Pelaksanaan/ implementasi program KRPL sudah berjalan di berapa desa?
10. Apa faktor yang melatarbelakangi pemilihan desa/kecamatan tersebut?
11. Sejauh mana pelaksanaan program KRPL yang sudah terjadi? Serta bagaimana tingkat keberhasilannya?
12. Bagaimana perencanaan serta evaluasi program KRPL dari Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluhan (BKP3)?
13. Siapa saja pelaku/ stakeholder dalam pelaksanaan program KRPL?
14. Bagaimana sinergitas antara pelaku pelaksana program KRPL?
15. Apasaja hambatan atau tantangan dalam pelaksanaan KRPL?
16. Apasaja faktor yang mendukung dalam pelaksanaan program KRPL?
17. Mengenai program KRPL di desa Puhjarak kecamatan Plemahan, apakah alasan yang melatarbelakangi program KRPL di desa tersebut?
18. Mulai kapan KRPL di desa Puhjarak berlangsung?
19. Bagaimana pelaksanaan KRPL di desa puhjarak? Serta bagaimana tingkat keberhasilannya?

20. Siapa saja pelaku/ stakeholder program KRPL di desa Puhjarak?
21. Potensi apa yang dimiliki desa Puhjarak?
22. Apakah hambatan dalam pelaksanaan program KRPL di desa Puhjarak?
23. Bagaimana kaitannya program KRPL dengan ketahanan pangan?
24. Apakah indikator keberhasilan dari program KRPL?
25. Dari mana saja sumber dana dalam pelaksanaan program KRPL?
26. Seberapa besar dana yang diberikan untuk setiap desa pelaksana program KRPL?
27. Kerjasama dilakukan dengan pihak siapa saja serta bagaimana bentuk kerjasama maupun komunikasinya?
28. Apakah ada kerjasama dengan pihak swasta dalam pelaksanaan program KRPL di Kabupaten Kediri?

Dengan Warga Masyarakat desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri:

1. Apakah anda mengetahui mengenai program KRPL di desa puhajarak ini?
2. Apa manfaat yang dirasakan?
3. Apakah kesulitan yang anda hadapi dalam mengikuti program KRPL?
4. Apa harapan anda terhadap program KRPL di desa PUhjarak?
5. Apakah anda termasuk anggota PKK atau Kelompok wanita tani (KWT)?
6. Apakah anda juga mengikuti sosialisasi yang diadakan di desa mengenai program KRPL?

Dengan Bapak Kepala Desa:

1. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya program KRPL?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi desa Puhjarak ini dijadikan lokasi program KRPL?
3. Bagaimana dengan sumber dana KRPL ini, apakah desa ikut menyumbang?
4. Bagaimana peran kepala desa dan jajarannya dalam program KRPL ini?
5. Bagaimana koordinasinya dengan pihak terkait?
6. Apa sajakah faktor yang mendukung serta faktor yang menghambat dalam pelaksanaan KRPL?
7. Apa harapannya untuk program KRPL?
8. Apasajakah manfaat yang dirasakan warga?
9. Menurut anda, bagaimana kaitannya program KRPL terhadap ketahanan pangan yang ada di desa puhjarak ini sendiri?
10. Sampai saat ini, bagaimana keberlanjutan program KRPL ini?

LAMPIRAN 3



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK & PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 1 TELEPON 689969

KEDIRI

Website : www.Kedirikab.go.id - Email : bakesbangpollinmas@Kedirikab.go.id

Kediri, 27 Januari 2014

Nomor : 070/ 60 / 418.62 / 2014
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

KEPADA
YTH. SDR. 1. KEPALA BKP3 KAB.KEDIRI
2. CAMAT PLEMAHAN
3. KADES PUHJARAK
KEC. PLAMAHAN

REKOMENDASI

Menunjuk Surat dari Saudara Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 21 Januari 2014 Nomor : 818/UN10.3/PG/2014 perihal Riset.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
2. Permendagri Nomor 64 Tahun 2011;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 2008;
4. Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2011;
5. Peraturan Bupati Kediri Nomor 55 Tahun 2008;
6. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri tanggal 6 Agustus 2012 Nomor 070/1541/418.62/2012 Perihal Perubahan Proses Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : **APRILIA DWIM**
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang
Alamat : Jl. MT. Haryono 163 Malang
Kebangsaan : Indonesia

Diberikan Rekomendasi untuk mengadakan kegiatan dimaksud di Unit / Wilayah Kerja Saudara dengan :

Judul : *Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan di Desa Puhjarak.*
Penanggungjawab : Dr. CHOIRUL SALEH, M.Si
Waktu : 3 (tiga) bulan dimulai tanggal 27 Januari s/d 27 April 2014
Lokasi : BKP3 Kabupaten Kediri , Kec. Plemahan dan Ds. Puhjarak Kec. Plemahan.
Peserta : -

Penerima rekomendasi wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan apabila selesai melaksanakan kegiatannya diwajibkan memberikan laporan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

TEMBUSAN : Kepada Yth
1. Ibu. Bupati Kediri (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Bappeda kab. Kediri;
3. Sdr. Dekan Fak. Administrasi UNBRA Malang;
4. Sdr. Yang bersangkutan

a.n. KEPALA BAKESBANGPOLLINMAS
KABUPATEN KEDIRI
Kepala Bidang PKS



HARIUTOMO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19731001 199301 001

LAMPIRAN 4

CURRICULUM VITAE

Nama : Aprilia Dwi Mariyati

Nomor Induk Mahasiswa : 105030101111081

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat dan Tanggal Lahir: Kediri, 04 April 1992

Email : apriliadwi126@gmail.com

No. HP : 085755664923

Pendidikan Formal : 1. SDN Kencong II Kec. Kepung Kediri (1998-2004)

2. MTsN 1 Pare - Kediri (2004-2007)

3. SMAN 1 Pare – Kediri (2007-2010)

4. Universitas Brawijaya Malang (2010-2014)

Pendidikan Non-Formal : 1. Preparation TOIEC

2. IC³ Certiport

3. Magang di Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang

Pengalaman Organisasi dan Kepanitiaan:

1. Pengurus RSC Staf Bidang Perpustakaan Periode 2011.
2. Staf Divisi Konsumsi Dalam Acara Seminar Nasional pada 17 November 2012.
3. Koordinator Divisi Konsumsi Dalam Acara Study Excursie RSC 2012 pada 3 Januari 2012.
4. Sie Acara Dalam Workshop PKM 2012 pada 18 September 2011.

